

POLITIK KEBANGSAAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Akiko Shavira Priyono

1606016059

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Akiko Shavira Priyono

NIM : 1606016059

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Kebangsaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tatatulis



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag



Masrohatun, M.Si

Tanggal : 15 Juni 2022

Tanggal: 15 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2022



Akiko Shavira Priyono

1606016059

PENGESAHAN

Tanggal : 27 Juni 2022

Tanggal: 27 Juni 2022

SKRIPSI

POLITIK KEBANGSAAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH

Disusun Oleh:

Akiko Shavira Priyono


1606016059


Telah dipertahankan di depan majelis pengujian skripsi pada tanggal 27 Juni 2022
dan dinyatakan LULUS

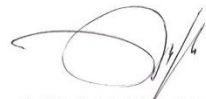
Susunan Dewan Pengujian



Ketua


Drs. H. Nur Syamsudin M.A.
NIP. 196805051995031002

Sekretaris

Masrohatun M.Si.
NIP. 198806212018012001

Pengujian I

Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si
NIP. 198505022019031007

Pengujian II

Solkhah Mufrikhah M.Si
NIP. 198505102016012901

Pembimbing I

Dr. H. Muhyar Fanani M.Ag
NIP. 197303142001121001

Pembimbing II

Masrohatun M.Si
NIP. 198806212018012001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, kemudahan dan kelancaran dalam hidup. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Proses penyusunan skripsi yang berjudul “KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam Politik Kebangsaan” yang telah penulis selesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Program Studi Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terlepas tanpa adanya bantuan, bimbingan, semangat serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum.
3. Ketua jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak H. Adib, M. Si dan Sekretaris Jurusan, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Masrohatun, M.Si selaku dosen

pembimbing II yang telah memberikan saran, kritikan dan selalu bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga semua yang beliau-beliau berikan dapat penulis amalkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Amiin.
6. Seluruh staff dan karyawan TU di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu dalam proses pengurusan administrasi.
7. Mbah Kyai Haris Shodaqoh yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian
8. Kedua orangtuaku tercinta bapak Priyono dan ibu Rini Kuspriyanti terimakasih atas segala dukungan maupun doa yang selalu dipanjatkan untuk setiap langkah perjalanan hidupku. Untuk adikku Reno Hendwi Ananta Priyono yang selalu menjadi tempat curhatku dan yang selalu mensupport kakak tercintanya ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku Elystia Rini, Luthfi Nadhila, Raharjanti Pratiwi, Noviana Dyah, Alfi Nurul, Mardiana Tri, dan Ely Fauziyah. Terimakasih untuk semangat, dukungan dan doa yang selalu tercurahkan.
10. Keluarga besar Ilmu Politik B 2016, teman-teman senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu

11. PT Fuji Metec Semarang yang telah memberiku kesempatan untuk bekerja sebelum lulus.

12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Atas dukungan, bantuan serta doa yang selalu diberikan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin ya Robbal'alamin.*

Semarang, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Akiko Shavira Priyono

1606016059

PERSEMBAHAN

1. Bapak Priyono dan Ibu Rini Kuspriyanti, kedua orangtuaku yang sangat saya cintai.
2. Para Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing saya.
3. Reno Hendwi Ananta Priyono, adik kandung tersayang.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2016.
5. Semua teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Kepada semua teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian.

MOTTO

Lakukan segala sesuatu dengan tulus, karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan tulus tidak akan berakhir sia-sia

*“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”
(Albert Einstein)*

*“Allah tidak akan embebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al Baqarah:286)*

ABSTRAK

Kyai dan politik adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Hal ini merupakan bentuk hubungan yang memperlihatkan interaksi bagaimana figur kyai sebagai tokoh agama dapat memiliki peran lain dalam lingkup sosial politik maupun lingkup lokal masyarakat. Kyai juga sebagian dari warga negara yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat (negara) yang harus berpegang teguh pada dasar negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai pondasi dalam melaksanakan perannya di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebangsaan sendiri juga merupakan identitas bangsa dimana untuk mewujudkan bangsa yang berideologi harus memiliki pandangan dan tingkah laku yang selalu mengupayakan persatuan, kesatuan, perdamaian dan keadilan tanpa membedakan suku, golongan dan agama. Oleh karena itu, pentingnya wawasan kebangsaan yang harus dimiliki setiap warga negara, tidak terkecuali kyai dalam memainkan perannya baik di masyarakat, maupun lingkungan sosial politik. Mengkaji tentang Peran Politik Kebangsaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh meliputi pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh tentang relasi agama dan negara serta tentang peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam politik kebangsaan.

Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian diatas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi tokoh. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah KH. Ahmad Haris Shodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon yang dan pernah menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada Tahun 1993-2000. Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan konsep relasi agama dengan negara yang dikaitkan dengan pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh mengenai politik kebangsaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Ahmad Haris Shodaqoh selama menjadi anggota parlemen pada tahun 1993-2000 sebagai Ketua Komisi E, beliau memberikan masukan kepada pemerintah terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat di masa krisis ekonomi tahun 1997-1998. Selama beliau sebagai legislator beliau menduduki Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) banyak program yang

dilakukan pemerintah atau legislator yakni salah satunya program pemberantasan kemiskinan. Peran lain dari beliau sebagai pemuka agama beliau sebagai penasehat, tauladan atau tokoh panutan yakni selalu menanamkan wawasan kebangsaan untuk mengajak santri ketika sudah berada di masyarakat harus bisa menghormati dan toleransi dengan berpedoman pada Pancasila untuk tujuan yang lebih baik. Sebagai warga negara beliau juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dan ikut menegakkan kerukunan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kebangsaan, Politik, Kewarganegaraan Kyai

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERAN KIAI DAN POLITIK.....	22
A. Relasi Agama dan Negara	22
B. Konsep Politik Kebangsaan.....	37
C. Peran Kiai	46
1) Konsep Peran.....	46

2) Definisi Kiai	50
3) Tipologi Kiai	59
BAB III LANDSCAPE KEBERAGAMAN KOTA SEMARANG DAN GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL ITQON BUGEN SEMARANG	70
A. Gambaran Umum Kota Semarang	70
B. Potret Keberagaman Agama Kota Semarang	78
C. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang	82
BAB IV PANDANGAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH BERKAIT RELASI AGAMA DAN NEGARA.....	95
A. Pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait Hubungan Agama dan Negara Agama menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh	95
B. Pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait Politik Kebangsaan.....	122
BAB V PERAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH DALAM POLITIK KEBANGSAAN	129
A. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam Kancah Perpolitikan.....	129
B. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Pengasuh Pondok Pesantren	139
C. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Warga Negara	151
BAB VI PENUTUP	171

A. Kesimpulan	171
B. Saran	175
DAFTAR PUSTAKA	176

DAFTAR TABEL

Table 1: Kepadatan Penduduk Kota Semarang	75
Table 2: Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) di Kota Semarang (2020)	78
Table 3: Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dipeluk	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kota Semarang 71

Gambar 2: Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Semarang 77

Gambar 3: Banyaknya Tempat Ibadah di Kota Semarang
Tahun 2019 79

Gambar 4: Persebaran Pondok Pesantren 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini hubungan antara agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Agama sebagai pondasi utama dan politik sebagai penjaga. Agama islam meletakkan politik sebagai salah satu penjagaan dalam urusan umat (*ri'ayah syu-un al-ummah*). Politik tanpa islam akan melahirkan masyarakat yang selalu membanggakan kekuasaan, jabatan dan akan jauh dari aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, politik dalam islam sangat penting untuk mengingatkan yang berkaitan dengan kemerdekaan, kebebasan dalam melaksanakan syariat islam boleh dikaitkan dengan politik (Zaki, 2015: 27)

Peran tokoh agama dalam masyarakat berpengaruh di kehidupan, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun bidang politik. Dan tokoh agama tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Kiai. Pada masyarakat pedesaan, istilah *Ndherek Kiai* (yang berarti: Ikut Kiai) lazim terdengar. Hal ini karena bagi masyarakat, kiai adalah sosok pemimpin informal yang bisa mereka andalkan. Terlepas dari pendidikan formalnya, kiai dianggap sebagai orang terdidik dan kaya dalam masyarakat. Sehingga, posisi kiai bisa dibilang strategis dan sentral di masyarakat. Sebagai pemimpin Islam informal, kiai adalah orang yang diyakini penduduk desa yang mempunyai otoritas yang besar

dan kharismatik. Hal ini karena kiai adalah orang suci yang dianugerahi berkah, karena tipe otoritas ini berada di luar dunia kehidupan (Turmudi, 2004:3). Di mata masyarakat, keberadaan kiai dianggap membawa berkah dan maslakhah. Kiai bukan hanya merupakan tokoh panutan sosial bagi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga tokoh panutan ilmu yang paham mengajar dan mewariskan pengetahuannya setiap waktu, dan menjadi panutan tokoh panutan agama yang menjadi tempat bertanya (Syaiful Huda, 2000: 2).

Keberadaan kiai di Indonesia diposisikan strukturnya lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain. Kiai ditempatkan sebagai tokoh, karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan, seringkali didatangi dan dimintai nasihat. Dalam kehidupan masyarakat modern bebrapa fungsi dari psikolog dalam hal layanan konsultasi terdapat dalam peran kiai terhadap lingkungan sekitarnya (Achidsti, 2014: 150).

Kedudukan sosial kiai dianggap cukup berada dalam posisi tertinggi, sehingga kiai termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai tokoh agama, kiai berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata sosial yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat. Suzanne Keller memposisikan tokoh sebagai elit penentu sekaligus sebagai obyek sosial, sehingga berada dalam kondisi tiga hal: *pertama*, mempunyai wewenang dan pengambil keputusan, *kedua*,

sebagai pendukung kekuasaan moral, dan *ketiga*, sebagai orang yang terkenal, berhasil dan berderajat. (Killer dalam Janah, 2015: 213).

Posisi Kiai semakin strategis karena ditunjang kemampuan menguasai dunia agama. Dalam posisi semacam ini, Kiai dan pesantren bukan saja menjadi tempat mencari “benar” dan “salah”, melainkan juga memegang kendali atas perilaku masyarakat. Dengan begitu, hirarki struktural terbentuk atas dasar nilai yang berkembang sebagai ciri khas hubungan antara Kiai-pesantren dengan masyarakat sekitar. Artinya, Kiai berada di atas puncak struktur hirarki itu, sementara masyarakat umum berada di struktur bawah (Thayyib dalam Nashirudin, 2019: 81-99). Kiai yang dimaksud tidak hanya sebagai tokoh ulama atau tokoh agama. Sebutan kiai juga sangat populer di kalangan pondok pesantren. Kiai adalah elemen sentral dalam kehidupan di pondok pesantren. Dalam perkembangan pondok pesantren tidak lepas dari kiprah seorang kiai. Kiai menjadi tokoh utama dalam kelangsungan lingkungan dalam pondok pesantren (Mawar Indah, 2019: 38).

Keberadaan kiai dalam pondok pesantren sendiri juga sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari fungsi dan perannya. Kiai juga berada pada posisi sebagai perintis, pendiri, pengelola, dan sekaligus sebagai pengajar. Bahkan terkadang kiai adalah pemilik tunggal sebuah pondok pesantren (Bonawi, 1993: 90). Dalam pondok pesantren, paling tidak ada lima unsur yang saling berkaitan, unsur pertama yaitu, kyai sebagai tokoh utama yang

olehnya sistem pondok pesantren dibangun. Ia adalah tokoh yang memberi landasan terhadap sistem. Unsur kedua, adalah santri yang belajar pengetahuan tentang keislaman dari kiai. Unsur ini sangat penting karena merupakan sumber daya manusia yang mendukung keberadaan pondok pesantren. Unsur ketiga, adalah pondok yang dibangun dan disediakan oleh seorang kiai untuk mengakomodasi para santrinya. Unsur Keempat, adalah pengajaran kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Dan Unsur kelima adalah masjid sebagai pusat kegiatan ibadah maupun proses belajar mengajar. Dengan demikian pondok pesantren merupakan kompleks perumahan yang meliputi rumah kiai dan keluarganya, asrama dan ruang belajar, dan masjid. (Zamarkhsyari Dhofier 1982:44)

Peran kiai dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Dan akhirnya, peran Kiai yang seperti itu, mempertegas kedudukan Kiai yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat. Peran seorang kiai ternyata tidak hanya sekedar berperan dalam ilmu agama saja melainkan saat ini sudah berperan dalam tingkat nasional. Dan didalam kehidupan bermasyarakat peran kiai sebagai penerjemah antara masyarakat desa yang kurang mengerti akan pengetahuan di tingkat nasional

Kiai dan juga telah menjadi entitas politik yang berpengaruh di Indonesia. Perdebatan tentang keterlibatan Kiai dalam politik selalu berada dalam dua kutup pendapat yang kontradiktif. Keberlawanan tersebut dapat dilihat dari pendapat yang

mengabsahkan dan menganggap keterlibatan Kiai dalam politik adalah sebagai sesuatu yang wajar, serta disisi lain muncul pendapat yang mengkritiknya dan memandang keterlibatan Kiai dalam politik sebagai pengingkaran terhadap nya, yaitu menjadi pendidik dan pengasuh pondok pesantren yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi dari partai politik (Hajad, 2015: 1).

Sebenarnya persoalan antara agama dan politik sudah ada sejak dahulu dalam sejarah islam. Sejak Nabi Muhammad wafat, para sahabat dihadapkan pada masalah siapa yang menjadi penerus setelah nabi (Eka,2019: 5). Dalam kasus lain pada pemilu presiden 2019, sejak Joko Widodo mengumumkan pasangan yang akan mendampingiya yaitu Ma'ruf Amin. Dikutip dalam BBC News Joko Widodo menyebutkan bahwa Ma'ruf Amin sebagai tokoh agama yang bijaksana. Akhirnya pasanagan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendapatkan banyak suara dan memenangkan Pemilu 2019. Sejak saat itu persoalan agama dan politik menjadi hal yang biasa dan selalu di kaitkan. Sosok kiai menjadi kekuatan tersendiri dalam struktur sosial budaya masyarakat, bahkan kiai juga memegang peranan penting dalam mengubah peta kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena sosok kiai menjadi elite sosial di tengah masyarakat (Ibnu hajar , 2019: 17)

Peran ganda seorang kiai sebagai pendidik moral, agama dan keterlibatannya didunia politik saat ini menimbulkan banyak kontroversi ditengah masyarakat (Khoirudin, 2005). Menurut

Endang Turmudi, kiai menjadi perantara bagi umat islam dalam memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi pada tingkat nasional. Masyarakat juga paham bahwa dirinya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melihat peristiwa yang terjadi di tingkat nasional (Turmudi, 2003). Itulah sebabnya banyak kiai yang beranggapan bahwa boleh terjun ke dunia politik dengan cara menjunjung tinggi moralitas, membela kaum-kaum yang tertindas dan memperjuangkan nilai agama (Beny, 2007) Akan tetapi juga ada yang meragukan ke Itulah sebabnya banyak kiai yang beranggapan bahwa boleh terjun ke dunia politik dengan cara menjunjung tinggi moralitas, membela kaum-kaum yang tertindas dan memperjuangkan nilai agama mampuan kiai dalam politik. Godaan akan kepentingan pragmatis menyeret kiai kedalam berbagai konflik bahkan menjauh dari peran sosialnya (Sadi, 2016). Keterlibatan kiai dalam dunia politik dianggap lebih banyak bahaya daripada manfaatnya (Khoiruddin dalam Hajad, 2005). Dalam hal ini menimbulkan sebagian masyarakat mendukung kiai terlibat didunia politik ataupun ada yang menolak bahkan tidak sepakat. Sudah banyak pro kontra peran kiai dengan berbagai macam problema yang di timbulkan dari peran tersebut. Disini saya ingin melihat lebih detail peran kyai dalam politik kebangsaan.

Peran kiai di bidang keagamaan tidak dapat dipisahkan dari peran kiai tersebut di bidang politik. Berpusat pada peranan kiai sebagai guru dan ahli agama, kiai sering kali juga memainkan

perannya dalam berbagai bidang sosial, kemasyarakatan dan politik (Pradjarta,1994). Oleh karena itu hadirnya sosok kiai dalam politik diharapkan dapat mengubah dunia politik menjadi lebih bermoral dan selalu mementingkan kepentingan rakyatnya serta menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut Al Faruqi, kiai adalah simbol dari etika dan moralitas politik, keterlibatan dan peran kiai dalam kancah politik harus bisa memberikan sumbangan besar bagi bangunan struktur politik yang bermoral (Abdul Mu'nim,2000: 120).

Politik kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perwujudan antara nilai-nilai kekuasaan dan nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa perpaduan antara agama dan negara harus berjalan secara proporsional. Agama lebih sering dipergunakan sebagai alat yang bertentangan dengan pemerintah atau pemerintahan sering dijadikan sebagai suatu kekuatan untuk menekan agama (Ali Ismail dan fifiana,2019: 239). Kebangsaan harus ditempatkan sebagai tombak utama karena kebangsaan bertujuan mempertahankan dan menjamin nilai-nilai demokrasi pancasila. Pemahaman politi kebangsaan dikaitkan dengan nilai-nilai pancasila seperti persatuan dan kesatuan, nasionalisme, jiwa patriotisme. Dalam kaitannya dengan politik, pengetahuan yang dimiliki para kiai merupakan power yang sangat potensial untuk mewujudkan tindakan atau proses politik. Kiai harus pandai dalam menunjukkan eksistensinya kepada seluruh

umat baik melalui tulisan maupun perbuatan dan kiai harus berani berbicara benar (Komaruddin dan M yudhie 2004: 15).

Kiai memiliki kendali yang tidak tertulis apabila terjun ke dunia politik. Di sisi lain, masyarakat akan menaruh harapan kepada mereka, yang dianggap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga akan meminimalisir terjadinya penyelewengan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kiai dikenal mampu menjadi pemersatu umat dan mencegah adanya bahaya perpecahan dan konflik.

KH. Ahmad Haris Shodaqoh adalah salah satu tokoh atau ulama yang cukup terkenal di Jawa Tengah Khususnya Kota Semarang. Beliau merupakan tokoh ulama yang kharismatik, sehingga banyak orang yang ingin berguru dan menimba ilmu darinya. Seperti diketahui, bahwa KH. Haris Shodaqoh telah terlibat dalam dunia politik, khususnya di Kota Semarang. Beliau pernah menduduki kursi anggota parlemen yakni menjadi anggota DPRD Kota Semarang untuk fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada Tahun 1993-2000. Posisi beliau yang sangat menonjol dan strategis sangat berpengaruh sebagai kekuatan dalam menyeimbangkan antara perannya dalam islam dan juga politik. Ketika menjadi anggota parlemen beliau dipercaya sebagai ketua Komisi E pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama,

kebudayaan, sosial kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk.

Kebijakan yang diprogram oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai anggota legislator pada tahun 1993-2000 yakni bagaimana pemerintah dapat berupaya dalam penanggulangan kemiskinan dimana sekitar tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Seperti halnya di Kota Semarang sendiri tingkat kemiskinan mengalami kenaikan angka yang sangat cepat dan harus segera ditanggulangi sebab kesejahteraan sosial menjadi kewajiban pemerintah yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melalui program yang dilakukan pemerintah, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dapat meningkat dan dalam penanganan kemiskinan program tersebut dapat berjalan dan menghasilkan perkembangan yang positif dalam menanggulangi kemiskinan pasca krisis moneter pada tahun 1997-1998. Peran kiai yang bersih dipercaya dapat menghadapi persoalan negara dan pemerintah.

Sebagai pemuka agama keberadaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga memiliki banyak pengaruh dan kegiatan dalam pembinaan masyarakat. Seperti dalam skripsi Mochamad Irvan yang membahas peran dakwah KH. Ahmad Shodaqoh dalam

aktivitasnya difokuskan dalam bidang keagamaan yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar seperti mengadakan pengajian yang dikenal dengan sebutan pengajian ahad pagi yang mulanya hanya diikuti oleh 5- 10 saja, dan saat ini jumlahnya semakin bertambah hingga kurang lebih 1000 orang.

Peran kiai sangat berpengaruh kenyataannya didunia politik yang terkadang tidak sejalan dengan ajaran islam dan peran kiai harus membawa perubahan sebagai penjaga apabila terdapat politik yang kotor dan bertolak belakang dengan kebangsaan maka kiai dapat melakukan perannya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah tersebut. Keterlibatan kiai dalam politik juga harus diciptakan dengan rasa keadilan sosial, kemaslahatan umat dan kesejahteraan bangsa bukan untuk memenuhi keambisian dalam politik kekuasaan pribadi. Perjuangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga tidak dapat dicapai dalam waktu yang hanya sebentar, tetapi juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dimulai dari beliau menjadi anggota perlemen pada tahun 1993-200 dan dilanjutkan beliau sebagai pemuka agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran beliau dalam kancah perpolitikan dan sebagai tokoh agama menimbulkan motivasi bagi penulis untuk membahas serta mencari tahu lebih jauh mengenai Peran Politik Kebangsaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang penting dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh tentang relasi agama dan negara
2. Bagaimana peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam Politik kebangsaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pandang KH. Ahmad Haris Shodaqoh tentang relasi agama dan negara
2. Untuk mengetahui peran apa saja yang sudah dilakukan KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam politik kebangsaan

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terkait pemikiran peran tokoh.

- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan wasan tentang konsep peran seorang kyai dengan menerapkan konsep atau nilai kebangsaan baik kepada para santri maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Mengkaji terkait tentang peran politik kebangsaan kyai sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Ulin Nuha, Nofiaturrehman, Nurhadi dan Sunarso, Amrullah, Vellayati Hajad, Faizin, Mawardi.

Ulin Nuha dalam artikelnya yang berjudul “Peran Politik Kyai Dalam Proses Politik di Partai Politik. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dari Ulin Nuha yaitu mengatakan bahwa dalam politiknya, KH. Haris Shodaqoh memegang satu prinsip, yakni *amar makruf nahi munkar* dengan memberikan pesan moral, nasihat (*tausiyah*) kepada pengurus harian Partai PPP dan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota/. Selain itu, ada tiga peran politik yang cukup penting, di antaranya peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik

Penelitian yang dilakukan oleh Nofiaturrehman yang berjudul “Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengatakan bahwa pada zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman pemberontakan, dan zaman orde baru kyai berhasil mengimplementasikan politik kebangsaan sebagai ruh perjuangannya. Sedangkan pada zaman reformasi, gerakan kyai tersita pada urusan politik praktis yang lebih banyak membawa madharat daripada maslahat, dan bahkan membuat citra kyai menjadi negatif di mata umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi dan Sunarso (2018), yang berjudul “Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih”. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai memiliki tiga peran dalam politik, yakni sebagai patron politik masyarakat, elit politik, dan mediator politik. Kiai sebagai patron politik menjadi acuan dalam menentukan pilihan politik. Kiai sebagai elit politik, aktif dalam kepengurusan partai politik dan mobilisasi masa. Kiai sebagai mediator politik, menjadi penengah dalam konflik politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Amrullah (2016) yang berjudul “Peran Kiai dalam Politik (Studi Kasus Atas Pemenangan Calon Legislatif Oleh KH. Arsyad Bushoiri dalam Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Arsyad Bushoiri adalah mengajukan calon legislatif yang kompeten dari

golongan pesantren, memilih calon yang sesuai dengan aqidah syariat Islam, serta sebagai pembimbing dan pembina calon legislatif, supaya sebagai calon legislatif harus mempunyai etika, ahlak, dan moral yang baik

Penelitian yang dilakukan oleh Vellayati Hajad (2015) yang berjudul “Politik Kiai dan Resistensi Sosial”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Kiai di ranah politik yang semakin marak akhir-akhir ini, secara nyata telah menimbulkan berbagai implikasi yang cukup signifikan. Pertama, bahwa keterlibatan Kiai dalam politik secara nyata telah mendeligitmasi peran Kiai sebagai otoritas moral dan reverensi keagamaan. Banyak Kiai yang pengaruhnya berkurang karena Kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Kondisi ini membuat masyarakat memandang Kiai tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegitimasi peran pesantren. Kedua, Kiai telah turut mengukuhkan politik pragmatis-transasional, karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi materi yang diterima. Bias politik Kiai ini tentu akan semakin menjauhkan Kiai dari masyarakat. Setidaknya hal ini mulai terasa belakangan ini, ketika masyarakat mulai menyoroti sikap politik pesantren yang dianggap hanya merusak independensi Kiai dan memecah umat kedalam politik partisan.

Ketiga, terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik Kiai. Hal ini secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik yang diambil oleh Kiai. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan sikap Kiai sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati dan diteladani. Serta sikap Kiai yang sebetulnya adalah murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizin (2007) yang berjudul “Peranan Kiai dalam Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri (Studi kasus tentang peranan kiai dalam mempengaruhi partisipasi politik santri pada Pemilu Prsiden dan Wakil Presiden putaran pertama 2004 di Pondok Pesantren At-Tauhid Sidoresmo)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik santri At Tauhid dalam pemilu presiden tahap pertama cukup tinggi dengan kemenangan pasangan SBY-JK dan Megawati-Hasyim Muzadi masing-masing di dua TPS tempat santri memberikan suaranya. Partisipasi santri tersebut diwarnai oleh upaya yang dilakukan para kyai di Ponpes At-Tauhid.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2013) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai di Daerah Istimea Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai

memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kualitas keberagaman masyarakat dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, posisi penelitian saya dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan. Peneliti ingin menguatkan penjelasan tentang peran politik kebangsaan. Peneliti menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya karena peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada yaitu dalam penelitian ini ingin fokus melihat bagaimana cara pandang seorang kyai tentang relasi agama dan negara lalu diimplementasikan pada perannya dalam politik kebangsaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh. Penelitian studi tokoh hanya berpusat pada orang yang hendak diteleitinya. Dalam perspektif keilmuan, keabsahan data dari studi tokoh adalah sebagai metode penelitian yang dapat dianalisis dari sudut pandang manapun seperti sudut pandang historis, sosio kultural dan agama sang tokoh yang dianalisis dari nilai gunanya.

Ketokohan seseorang dapat dilihat dalam tiga indikator. Pertama, integritas tohoh (keberhasilan). Kedua, karya-karyanya (berupa karya nyata dalam bentuk fisik maupun non

fisik). Ketiga, kontribusi (Pengaruh di dalam masyarakat) (Syahrin,2006).

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2006: 5) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang ataupun perilaku seseorang yang diamati. Sedangkan menurut Sugiyono, metode kualitatif berlandaskan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam pengambilan sumber data agar data dapat dianalisis dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti dengan penelitian ini cukup kompleks untuk mengetahui suatu tokoh dalam sudut pandang ketokohnya dan dapat dijadikan alasan bahwa studi mengenai suatu tokoh sangat penting untuk melihat dan mengembangkan sejarahnya.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland (Moleong,2006) sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya yaitu dokumen.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya (Subagy, 2011: 87).

Dalam penelitian ini, yang dijadikan data primer adalah KH. Ahmad Haris Shodaqoh, pengurus Pondok Pesantren Al-Itqon, para santri, dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Itqon.

Sumber data primer yang dilakukan oleh peneliti ini dapat berupa transkrip wawancara, dokumentasi setiap kegiatan yang diikuti oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada dilapangan karena penerapan suatu teori (Subagyo, 2004).

Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah dokumentasi pribadi KH. Ahmad Haris Shodaqoh, publikasi surat kabar, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2006, 310). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data

langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi dengan penelitian terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Sugiyono, 2006).

Dalam penelitian ini kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti bersama dengan subyek peneliti yang dapat memberikan informasi tentang kegiatan Politik Kebangsaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2006).

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, menurut Bogdan adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh peneliti baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka (penelusuran penelitian terdahulu dan sejenisnya), metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana konsep yang akan digunakan sebagai kerangka analisis berpikir dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai obyek penelitian, gambaran umum tersebut meliputi Landscape Keberagaman Kota Semarang, Profil Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen dan Biografi KH. Ahmad Haris Shodaqoh.

BAB IV PANDANGAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH BERKAIT RELASI AGAMA DAN NEGARA

Bab ini mencakup pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait relasi agama dan negara serta pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait politik kebangsaan.

BAB V PERAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH DALAM POLITIK KEBANGSAAN

Dalam bab ini berisikan peran KH. Ahmad Shodaqoh ketika menjadi anggota parlemen fraksi PPP dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) pada

tahun 1993-1997 dan peran lain selama menjadi pemuka agama serta sebagai warga negara

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian berkaitan peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh di tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERAN KIAI DAN POLITIK

A. Relasi Agama dan Negara

1. Tinjauan umum tentang negara

Sebelum memaparkan relasi islam dan negara, akan dipaparkan terlebih dahulu teori ilmu politik secara umum sebagaimana yang telah digunakan oleh ilmu politik modern. Berikut ini akan dipaparkan dasar-dasar teori ilmu politik.

Miriam Budiardjo mengutip pendapat dari Andrew Heywood, mengatakan bahwa politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan bangsa yang memiliki tujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur segala kehidupan didalamnya dan tidak terlepas dari konflik maupun kerjasama didalamnya. Mengenai teori politik, menurutnya adalah pokok bahasan generalisasi dari segala fenomena yang bersifat politik. Dalam artian lain, teori politik adalah sebagai bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik itu, cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, kemungkinan dan kebutuhan apa saja yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan politik itu. Konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial,

pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya (Miriam Budiardjo,2008: 43).

Negara merupakan konsep yang paling utama dalam ilmu politik. Negara menjadi wilayah kajian dikarenakan pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat maupun dikenalin. Negara juga merupakan zona integrasi dari kekuasaan politik (Abyhara,2010: 229)

Miriam Budiardjo berpendapat mengenai konsep negara adalah suatu organisasi yang berada didalam suatu wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adapun unsur dari negara adalah:

- 1) Wilayah, kekuasaan negara meliputi tanah, laut di sekelilingnya sampai batas 12 mil dan angkasa di atasnya.
- 2) Penduduk, yang menyatukan masyarakat dalam suatu negara adalah Nasionalisme yang berarti perasaan yang subjektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan cita-cita aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika tergabung dalam satu negara
- 3) Pemerintah, organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya.

- 4) Kedaulatan, adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan segala cara

Untuk mengatur pola hubungan antara penguasa tertinggi dengan rakyatnya diperlukan sistem politik yang sudah disepakati bersama. Sistem politik menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan membuat pengaruh. Pengaruh tersebut yakni sistem politik dapat membawa negara dan semua rakyatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya (Dahl, 2001: 53).

Berbeda dengan Agustinus tentang pendapatnya mengenai negara, menurutnya negara yang dimaksud adalah hasil dari sebuah proses hubungan timbal balik antara manusia dengan kebutuhan yang realistis secara sosial politik di sekitar lingkungannya. Agustinus mengibaratkan suatu negara sebagai makhluk hidup yang berkembang, tumbuh dan bergerak dinamis. Negara juga memiliki kewajiban menjadi agen dari perdamaian, dan tujuan dari negara itu sendiri adalah agar manusia dapat mengabdikan dirinya pada keagungan Tuhan (Nasiwan, 2007: 123).

Pendapat lain menurut Harold J. Laski, tujuan berdirinya suatu negara yakni menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Negara juga harus memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penertiban (Law and Order). Melaksanakan penertiban yaitu untuk menacapai tujuan bersama dan menghindari bentrokan di dalam masyarakat. Negara harus melaksanakan penertiban dan bertindak sebagai stabilisator.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- 3) Pertahanan , yakni untuk menjaga dari kemungkinan adanya serangan dari luar.
- 4) Menegakkan keadilan. Untuk mengakkan keadilan dapat melalui badan-badan pengadilan (Budiardjo, 1984: 54-56)

2) Tinjauan umum tentang agama

Kata “Agama” sering disebut dengan istilah : Din (dalam Bahasa Arab) dan religion (dalam Bahasa Inggris) serta religie (dalam Bahasa Belanda). Menurut W.J.S Poerwadarminto dalam bukunya Romli Mubarak, diartikan sebagai suatu kepercayaan (bisa terhadap Tuhan, Dewa, dan sebagainya) serta dengan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut (Romli,2008:29).

Dalam bahasa Al Quran “din” yang diartikan sebagai agama secara umum baik untuk islam maupun lainnya. Kata “din” yang berasal dari akar bahasa Arab dyn memiliki banyak arti pokok yaitu (1) keberuntungan, (2) kepatuhan, (3) kekuasaan, bijaksana dan (4) kecenderungan alami tendensi.

Pendapat lain yaitu Al Syahrustani mendefinisikan din tersebut sebagai suatu peraturan tuhan dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.

Cliffort Geertz dalam bukunya kebudayaan dan agama mengartikan istilah agama sebagai sebuah sistem atau simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi yang kuat dan diresapi dalam diri manusia dengan konsep mengenai suatu tatanan umum sehingga motivasi tersebut bersifat realistik (Geertz,1992).

Menurut Endang Saifuddin, agama pada umumnya merupakan sistem tata keimanan atas adanya suatu yang mutlak diluar manusia. Selain itu ia juga mengatakan bahwa agama adalah sistem tata peribadahan manusia dengan yang mutlak (Endang saifuddin, 2004: 30). Sebagai apa yang telah dipercayai, agama memiliki perranan penting dalam hidup bahkan di kehidupan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Agama secara umum memiliki fungsi sebagai jalan penuntun penganutnya untuk mencapai ketenangan hidup dan kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan selanjutnya. Durkheim menyebut fungsi dari agama adalah sebagai pemujaan masyarakat. Pendapat lain tentang fungsi agama bagi manusia menurut Hendro Puspito meliputi :

- a. Fungsi edukatif dalam agama yaitu mencakup tugas mengajar dan membimbing. Pokok dari penggunaan nilai rohani merupakan kepercayaan terhadap agama, bahkan nilai-nilai

rohani tersebut memiliki makna dari tujuan hidup, hati nurani bahkan tanggung jawab kepada tuhan.

- b. Fungsi penyelamatan dalam agama yaitu memberikan jaminan kepada penganutnya di dunia maupun di akhirat kelak.
- c. Fungsi pengawasan sosial dalam agama yaitu sebagai penyaring antara yang baik dan menolak kaidan yang buruk agar selanjutnya dapat ditinggalkan karena dianggap sebagai larangan. Agama juga memberikan sanksi kepada orang yang melanggar (Sururin,2004: 12)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu kepercayaan manusia dengan tuhan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat dan memiliki fungsi sebagai jalan penghubung penganutnya dengan tuhannya.

3) Relasi negara dan agama

Agama dan negara adalah dua hal yang sangat sulit dan bahkan mustahil dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Hubungan agama dengan negara menarik untuk dikaji sebab keduanya sama-sama memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Politik sellau bisa mempengaruhi agama, sekurang maupun sebanyak agama mempengaruhi politik (Kiki,2016: 1-17). Komarudin Hidayat menjelaskan bahwa secara historis, hubungan agama dengan negara selalu menimbulkan perdebatan karena agama dan negara memiliki

tekanan yang berbeda. Agama menekankan sebuah keimanan, aspek ritual sedangkan negara berkaitan dengan pembagian wilayah dalam konteks kehidupan bernegara (Komaruddin,2019). Dalam praktik kehidupan bernegara saat ini, hubungan antara agama dan negara dapat di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yang pertama Integrated (penyatuan antara agama dan negara), yang kedua Intersectional (persinggungan antara agama dengan negara), yang ketiga Sekularistik (pemisahan antara agama dan negara (Masykuri Abdillah, 2013: 248). Pada model pertama, seorang pemegang otoritas negara harus menjalankan kekuasaan berdasar doktrin atau ajaran agama tertentu yang dapat memungkinkan antara warga negara wajib menganut agama resmi dari negara itu atau warga negara diberi hak kebebasan dalam memeluk agama sesuai keyakinannya. Pada model kedua, negara biasanya tidak menjadikan agama sebagai mazhab resmi tetapi nilai yang terkandung dalam agama dijadikan acuan dalam menjalankan kebijakan suatu negara. Yang terakhir yaitu model ketiga terjadi pemisahan yang tegas antara agama dan negara yang dikenal dengan negara sekular (Hasyim, 2014:1).

Peliknya hubungan antara agama dengan negara dalam konteks moder duraikan dengan jelas oleh J Philip Wogeman yang secara garis besar mengatakan terdapat tiga pola umum hubungan negara (politik) dan agama; Pertama Teokrasi, dimana dalam kehidupan bernegara, pemimpin atau sebuah

lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara dengan berbagai kebijakan untuk tujuan tertentu , Kedua Erastianisme, yaitu model kehidupan bernegara dimana para pemimpin politik mengeksploitasi agama untuk suatu kepentingan tertentu. Ketiga, hubungan sejajar antara agama dan negara dalam pemisahan yang unfriendly dan friendly. Pemisahan unfriendly antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil karena kehidupan keagamaan selalu memiliki pola dimensi sosial dengan bersentuhan aspek hukum yang menjadi wewenang sebuah negara. Oleh karena itu Wogeman menganggap alternatif terbaik pemisahan yang friendly (J Paul Wogeman, 2000: 250-252).

Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi dan budaya kita perlu membahasnya terus menerus sehingga sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang, dimana keduanya memiliki perbedaan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membutuhkan.

Teori tentang relasi negara dan agama dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu: (Din Syamsudin ,1999: 45-46)

a) Paradigma integralistik

Paradigma integralistik berarti menyatu artinya dalam konsep ini agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Paradigma

integralistik ini kemudian melahirkan paham negara-agama dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam din wa dawlah (islam agama dan sekaligus negara). Dalam perspektif paradigma integralistik, pemberlakuan dan penerapan hukum islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang baik, sebagaimana yang dinyatakan Imam Khomeini yang dikutip oleh Marzuki dan Rumaidi, bahwa negara islam wewenang menetapkan hukum berada pada tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku adalah hukum dari Tuhan (Marzuki dan Rumadi, 2001: 144). Pernyataan khomeini diperkuat oleh pernyataan Abu al-A'la Al-Maududi, salah satu tokoh pendukung paradigma ini mengatakan bahwa:

“.. kedaulatan adalah milik Allah. Dia (Allah) sendirilah yang menetapkan hukum. Tak seorang pun, bahkan nabi tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak atau kemauannya sendiri. Nabi sendiri juga terikat pada perintah-perintah Allah” (Al-Maududi, 1984: 272).

Menurut Al-Maududi, syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik (negara). Syariat adalah sebuah skema kehidupan yang sempurna meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan.

b) Penyatuan agama dan negara , juga menjadi panutan kelompok “fundamentalis islam” yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalis menekankan totalitas islam , yaitu bahwa islam meliputi seluruh aspek kehidupan.

c) Paradigma simbiotik

Paradigma yang kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena negara agama dapat berkembang, sebaliknya , negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Aliran pemikiran ini menyadari , istilah negara (dawlah) tidak dapat ditemukan dalam al-Quran. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Quran yang merujuk atau seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa “al-Quran bukanlah buku tentang ilmu politik (Din Syamsudin,2000: 60).

Tampaknya Al-Mawardiy (w. 1058 M), seorang teoritikus politik islam terkemuka , bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Al Mawardi

menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian, memelihara agama, dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian (Imam Al-Mawardi, 2000: 5).

Husein Haikal termasuk dalam paham paradigma ini yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Ia menyatakan sebagaimana disitir Suyuthi Pulungan: "Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan system pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah" (J. Suyuthi, 2002: 295-296).

Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu

negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan relasi agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Dalam konteksnya dengan negara, bahwa dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. Pertama, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (integrated). Paradigma ini menginginkan diwujudkan negara Islam dalam konstitusi negara. Menurut paham ini bahwa Islam ajaran yang serba lengkap. Kedua, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (simbiotik). Paradigma ini menginginkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dan tidak perlu konsep negara Islam dicantumkan dalam konstitusi. Menurut paham ini Islam tidak serba lengkap tapi hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja.

Oleh karena itu paradigma simbiotik mengungkap bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan

adanya negara maka agama akan dapat berkembang secara lebih baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Hanya saja, dalam tatanan praktis, persetujuan agama dan negara yang terjadi justru negara menelikung agama. Ajaran Islam, misalnya, yang semestinya mengatur kehidupan politik dari sektor etika, justru diatur oleh politik kenegaraan. Islam (agama) kerap dieksploitasi secara signifikan oleh elit-elit politik atau politisasi agama, sehingga tetap cenderung menuju konsep “Islam adalah agama dan negara”.

d) Paradigma Sekuleristik

Paradigma ketiga ini bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara (Abdul Mun'im, 1996: 9). Dalam konteks Islam, paradigma sekuleristik menolak pendasaran agama pada negara atau menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pada pemahaman

yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari'ah) (Dede Rosyada,2000: 63-64).

Salah satu orang yang memprakarsai paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq pada tahun 1925 ia menerbitkan sebuah risalah yang berjudul *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*. Menurutnya pembentukan negara tidak disarankan oleh agama (syari'at) melainkan berdasarkan akal umat (Ali Abdul Raziq, 2000: 85). Pada zaman Nabi di Madinah dilihat dari sudut apa pun, menurutnya bukanlah persatuan politik. Disana tidak terkandung makna daulah atau pemerintahan, tetap murni persatuan agama yang tidak dicampuri noda-noda politik. Persatuan iman dan pandangan agama bukanlah persatuan daulah dan pandangan kekuasaan. Secara umum, polarisasi kecendrungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat dikelompokkan menjadi berikut:

1. Skripturalistik dan rasionalistik

Skripturalistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran terhadap ak quran dan hadist yang mengandalkan pengertian bahasa. Rasionalistik menampilkan penafsiran yan rasional dan kontekstual.

2. Idealistik dan realistik

Idealis cenderung menampilkan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai islam yang ideal. Kaum idealis menolak format kenegaraan yang ada, sedangkan kaum realis cenderung menerima karena orientasinya bersifat realistik terhadap kenyataan politik.

3. Formalistik dan substantivistik

Formalistik cenderung mememntingkan bentuk daripada isi yang menampilkan konsep negara dan simbolisasi keagamaan. Sebaliknya, pendekatan substantivistik cenderung menekankan isi daripada bentuknya.

Sebenarnya masalah politik atau pengaturan negara termasuk urusan duniawi yang bersifat umum. Panduan Al-Qur'andan Sunnah pun bersifat umum. Oleh karena itu, tugas cendikiawan Muslim adalah berusaha terus menerus untuk menjadikan AlQur'ansebagai system yang konkret sehingga dapat diterjemahkan dalam pemerintahan sepanjang zaman (Mismubarak, 2019: 40).

Hubungan negara dan agama dalam konstitusi Negara Republik Indonesia nampak jelas dalam sila pertama Pancasila yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini, sangat komprehensif dikaji. Sila “ketuhanan yang maha esa” mengilhami sila-sila berikutnya , dengan demikian dapat

dikatakan bahwa nilai tauhid islam juga mewarnai sila-sila dalam pancasila (Yudi Latif,2011) , jika melihat lebih lanjut Prof Moh Mahfud MD dalam konteks sebagai akademisi memandang bahwa hubungan agama dan negara tidak lepas dari politik hukum dinegara ini dimana dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai alat untuk mencapai yang dinamakan cita-cita bangsa dan tujuan negara (Mahfud MD, 2017) supaya dalam menjalankan sebuah negara senantiasa memerhatikan politik hukum dan reaksi dari hukum tersebut, sehingga hubungan agama dan negara menjadi lebih harmonis dan dapat berdampingan di dalam menghadapi tujuan negara, dapat dipertegas bahwa pluralisme hukum yang ada di indonesia senantiasa mempengaruhi ruang gerak agama dan negara, dan dunia perpolitikan indonesia senantiasa menyandingkan keduanya didalam berinteraksi.

B. Konsep Politik Kebangsaan

1. Definisi Politik

Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu social, yang memiliki kerangka dasar dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik sendiri muncul sejak abad ke 19, akan tetapi pada masa selanjutnya, ilmu politik memiliki focus terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan pemerintah, bahkan saat ini cakupan ilmu politik sangat luas (Anthonius:2012:3). Pemikiran-pemikiran mengenai ilmu

politik barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles yang menganggap politik sebagai suatu bentuk usaha untuk mencapai masyarakat politik yang lebih baik. (Seta:2011:2) Namun demikian pemikiran Plato dan Aristoteles tersebut belum mampu memberikan tekanan pada upaya dalam mencapai suatu hal yang baik.

Menurut Gabriel Almond politik adalah sebagai kegiatan yang berhubungan dengan suatu pembuatan keputusan dalam masyarakat, dimana hal tersebut bersifat otoritatif. (Almond dalam Seta :3). Dalam hal ini untuk membuat suatu keputusan haruslah bersifat otoritatif agar mencapai tujuan dalam keputusan tersebut. Menurut Almond interaksi dalam masyarakat sangat dibutuhkan ketika pengambilan suatu keputusan. Menurut Andrew Heywood politik adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membuat dan mempertahankan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia, dalam kegiatan tersebut tidak terlepas dari konflik yang harus dihadapi.

Dengan demikian konsep politik mengandung berbagai unsur seperti kelembagaan yang menjalankan aktivitas pemerintah, kelompok sebagai pihak yang berkepentingan, dan kegiatan untuk membuat dan mempertahankan peraturan.

2. Wawasan Kebangsaan

a) Definisi wawasan kebangsaan

Definisi kebangsaan adalah salah satu identitas yang menandai dalam hal bangsa, ataupun memandang suatu bangsa. (Badudu-zain, 2001:122;1624). Kebnagsaan sendiri sebenarnya sudah ada dalam diri. Sebab kebangsaan sudah tertanam kepada setiap warga negara dan terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siswono mengemukakan bahwa, semangat dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuh-kembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai salah satu cara rasa cinta tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti mahal dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini (Adi S , 1996:17). Wawasan kebangsaan sendiri merupakan hasil dari perkembangan dinamika rasa kebangsaan untuk mencapai cita-cita bangsa yang melahirkan nasionalisme atau sebuah paham kebangsaan berupa pikiran yang bersifat nasional bahwasanya suatu bangsa memiliki cita-cita dan tujuan nasional serta memiliki karakter atau watak yang meliputi aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. (Kusmayadi, 2017: 11)

Secara umum wawasan kebangsaan terdapat pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945. Seperti yang dijelaskan oleh Kaelan (2002: 33-34) bahwa wawasan kebangsaan berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang

hal-hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan berbangsa untuk mencapai cita-cita nasional. Jadi dapat diartikan politik kebangsaan adalah kegiatan yang bertujuan dan mempertahankan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa sebagai tujuan utamanya dan bagaimana membina persatuan dan kesatuan antar individu dan lingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh Gus Basro Jamhar sebagai berikut:

“Politik kebangsaan politik yang orientasinya bangsa. Jadi tidak untuk kepentingan tertentu baik parpol maupun organisasi tertentu. Lintasnya dalam hal lebih luas. Bagi saya lebih sulit sebab merangkul semua partai, merangkul semua organisasi, sebab partai dan organisasi memiliki kepentingan sendiri, kepentingan yg sifatnya pribadi, kalau kebangsaan kan enggak, kalau kebangsaan yg sifatnya pribadi ditiadakan terlebih dahulu. Intinya untuk bangsa itu sendiri.” (Wawancara dengan Gus Basro Jamhar Anak dari KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 juli 2021)

b) Wawasan kebangsaan di Indonesia

Bangsa Indonesia terbentuk dari zaman ke zaman. Dimulai dari zaman prasejarah, zaman kuno, zaman kerajaan islam, serta kedatangan bangsa barat ke wilayah nusantara untuk menjajah indonesia kala itu, sampai pada akhirnya indonesia mencapai merdeka. Tidak sampai disitu saja bangsa indonesia mengalami perkembangan pada masa orde lama, baru, reformasi dan hingga saat ini adalah sebuah

perjuangan yang sangat panjang yang sudah dilakukan bangsa indonesia (Taniredja, 2012:160).

Perndapat lain juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak ditindas oleh penjajah bangsa indonesia memiliki sikap nasionalisme dan mengaspirasi kehidupan yang bebas serta bangsa indonesia bukanlah bangsa yang tumbuh berdasarkan antropologis atau etnis tertentu (Suhady dan Sinaga, 2006: 21)

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah sejak berdirinya bangsa indonesia, indonesia mengalami proses dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Proses tersebut untuk mewujudkan bangsa yang berideologis dan mewujudkan tujuan nasionalnya sebagai bentuk proses dalam pembentukan jati diri sebuah bangsa. Dalam hal ini konsep atau wawasan kebangsaan indonesia juga dibutuhkan agar bangsa tetap tercipta suasana aman, tentam dan damai.

Wawasan kebangsaan indonesia dalam pelaksanaannya telah menjadi dasar negara dan ideologi nasional dimana sudah tercantum dalam Pancasila pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 bagi Indonesia.

c) Nilai dasar Kebangsaan

Pada dasarnya untuk memahami nilai-nilai kebangsaan adalah salah satu aspek yang terpenting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan adalah untuk menghadapi tantangan global dan sebagai pertahanan suatu negara. Nilai yang harus dibentuk yakni (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Bertanggung Jawab, (3) menghargai dan mengakui serta menerima perbedaan budaya, (4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, (5) mengakui dan menghargai hak setiap manusia secara universal (Tukiran, 2014: 35)

Pendapat lain dikemukakan oleh taniredja dan Abduh (2018: 46) bangsa indonesia mempunyai pedoman hidup yang tertuang pada sila-sila pancasila yang telah diamalkan dalam kehidupan berbangsa, pengamalan dari Sila Persatuan Indonesia yaitu pada sila ke tiga secara rinci adalah : (1) Mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan atau golongan sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa, (2) rela dan sanggup untuk berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, (3) cinta tanah air dan bangsa, (4) bangga menjadi warga negara Indonesia, (5) Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, (6) menjaga persatuan dan kesatuan dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika, (7)memajukan hubungan persaudaraan demi persatuan dan kesatuan.

Nilai dasar kebangsaan juga telah tertuang pada Dasar Negara dan tertulis dengan makna sesuai dengan Tujuan

nasional bangsa Indonesia, didalam sila-sila Pancasila terdapat berbagai nilai dasar sebagai perwujudan dari nilai kebangsaan yakni: (1) Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, (2) Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, (3) mempunyai cita-cita untuk hidup dalam bangsa yang damai, bebas, merdeka dan bersatu, (4) Rasa cinta tanah air, (5) menjunjung demokrasi, (6) bermasyarakat yang adil dan makmur

d) Ciri-ciri dari wawasan kebangsaan

Pemahaman seseorang mengenai wawasan kebangsaan ditentukan oleh cara pandangnya terhadap bangsa dan negara. Ciri-ciri seseorang yang berwawasan tentang kebangsaan antara lain menyadari hakekat Tuhan Yang Maha Esa, salig meghargai dan menghormati kepentingan umum serta hak asasi manusia, memiliki rasa memiliki terhadap bangsa dan negaranya dan peduli terhadap kepentingan bersama (Tampubolon, dan Darmawan, 2016: 25)

Pendapat lain juga menjelaskan ciri-ciri seseorang dalam hal tentang pemahaman mengenai kebangsaan yakni: (1) senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan secara utuh, (2) berupaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat tercipta damai dan aman sesuai dengan aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan

pertahanan negara. (3) mengutamakan kepentingan nasional untuk mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan untuk menciptakan suasana aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 (Agustian dan Julianti, 2010: 16)

e) Fungsi dan Manfaat dari Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan juga memiliki fungsi sebagai cara untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pedoman atau aturan untuk menentukan kebijakan.

Upaya tersebut terdapat konsep-konsep dasar yang mengatur strategi untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara itu sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari wawasan kebangsaan ini lah yang menjadi cara pandang atau pedoman masyarakat bagaimana nilai wawasan kebangsaan dapat ditanamkan dan tentunya sebagai fungsi bagaimana masyarakat dapat menempatkan diri ketika sudah berada di lingkungan masyarakat.

Wawasan kebangsaan sendiri juga memiliki beberapa manfaat yakni: (1) konsepsi bangsa dan nusantara diterima dan diakui oleh internasional, (2) bertambah luas wilayah teritorial Indonesia, (3) bertambah kesejahteraan rakyat Indonesia, (4) memperkuat pandangan masyarakat terhadap keutuhan wilayah nusantara, (5) sarana integrasi nasional (Astawa, 2017: 27)

Kesimpulan dari manfaat wawasan kebangsaan adalah dengan adanya rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air dalam kehidupan kebangsaan maka memiliki manfaat dalam keberlangsungannya kehidupan mulai dari pengakuan wilayah, terjaminnya kesejahteraan rakyat dan penting dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan negara.

Berdasarkan pendapat di atas yang menjelaskan tentang wawasan kebangsaan sendiri dapat disimpulkan bahwa konsep atau nilai kebangsaan adalah sebagai berikut: (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) menghargai dan mengakui serta menerima perbedaan, (3) Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, (4) Rasa cinta tanah air, (5) menjunjung demokrasi, (6) bermasyarakat yang adil dan makmur, (7) mengutamakan kepentingan nasional untuk mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan, 8) Nasionalisme

Maka dari itu Politik kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai cara atau usaha yang dilakukan negara untuk mewujudkan nilai atau konsep dasar yang tertuang pada Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 agar bangsa tetap tercipta suasana aman, tentam dan damai. Pancasila harus menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya pancasila mengandung makna positif untuk kehidupan berwarga negara di Indonesia.

C. Peran Kiai

1) Konsep Peran

Setiap individu pasti memiliki sebuah peran dalam aspek kehidupan, misalnya di lingkungan masyarakat, terdapat peran yang dilaksanakan dari masing-masing individu tersebut, seperti perannya sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama ataupun sebagai masyarakat biasa pada umumnya. Dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peran kiai.

Secara etimologi peran adalah tindakan. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu dimana tindakan tersebut diharapkan oleh individu lain. Hal ini berarti peran adalah sebuah tindakan yang dilakukan individu untuk mempengaruhi individu lain. Tindakan mempengaruhi individu lain adalah bertujuan untuk hal yang lebih baik.

Teori peran atau Role menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah proses dinamis dari suatu kedudukan. Artinya apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan/status dalam menjalankan suatu peran. Menjalankan suatu peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang yang dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang yang dapat ditimbulkan dari suatu jabatan tertentu. Peran yang dilakukan seseorang berpengaruh dalam kepribadian orang tersebut.

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan sebuah interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan pada sebuah peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Robert Linton juga mendefinisikan aktor. Menurutnya aktor adalah orang yang mengambil bagian dalam sebuah interaksi sosial sebagai seseorang yang berperilaku menjalankan suatu peran tertentu.

Mengacu pada penjelasan konsep peran tersebut, peran terbagi atas tiga jenis peran. Jenis peran menurut Soerjono Soekanto (2012:214), yaitu :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang sedang dilaksanakan dalam suatu kegiatan kelompok seperti pengurus, pejabat. Peran aktif dapat dilihat dari bagaimana seseorang aktif dalam berkontribusi untuk kelompok tersebut.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang hanya dilakukan saat seseorang berada di waktu tertentu. Peran partisipatif bisa diartikan dengan peran sumbangan yang berguna pada waktu tertentu.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran yang kurang bahkan tidak dilaksanakan oleh seseorang. Peran pasif hanya dilakukan sebagai simbol dalam keadaan tertentu.

Setiap individu memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pergaulan/lingkungan dimana ia tempati. Hal tersebut berarti sebuah peranan menentukan segala hal yang diperbuatnya untuk masyarakat/ sebuah kepentingan tertentu. Menurut Soekanto peranan lebih banyak menekankan pada fungsinya, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses individu dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto 2002:268-269)

Menurut Soerjono Soekanto (2002:441), unsur suatu peran adalah :

- (a) Aspek dinamis dari sebuah kedudukan
- (b) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- (c) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- (d) Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang

Peran dapat dikatakan berhasil dan menunjukkan suatu proses apabila seorang seseorang melaksanakan suatu perannya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu berhasilnya seseorang dalam perannya merupakan wujud dari suatu fungsi peran. Fungsi peran menurut Soerjono Soekanto (2002:247) adalah :

1. Peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat dianggap mampu untuk kelangsungannya.

2. Peranan seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk kelangsungannya. Individu harus memiliki rasa ingin melakukan perannya.
3. Peran memberikan arahan pada proses sosialisasi
4. Peran dapat mempersatukan kelompok. Hal ini dikarenakan berhasilnya individu dalam perannya dapat melibatkan orang lain.
5. Dalam masyarakat terkadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan peran memerlukan pengorbanan yang besar.
6. Peran dapat melestarikan kehidupan dalam bermasyarakat.

Dari beberapa teori peran yang disebutkan diatas arti peran adalah tindakan. Tindakan tersebut menentukan segala hal yang dilakukan individu untuk kepentingan dilingkungan nya. Berhasilnya suatu peran yang dilakukan oleh individu memberikan dampak/pengaruh di lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini membahas sosok kiai yang memiliki peran dalam kehidupannya. Peran kiai dalam lingkungan masyarakat biasanya seperti peran kiai sebagai pemimpin agama/tokoh agama memiliki kedudukan yang dinilai sakral dalam tingkatan masyarakat. Dalam penelitian ini sosok kiai yang dibahas juga memiliki peran dalam bidang politik seperti menjadi anggota DPRD, menjadi pengurus partai politik. Keterlibatan kiai dalam politik juga bukanlah hal yang baru lagi. Begitu pentingnya

peran sosok kiai dalam masyarakat luas maka fungsi dari adanya tokoh agama haruslah berjalan dengan baik ketika menghadapi persoalan yang timbul dari masyarakat ataupun bangsa.

Peran kiai sangat berpengaruh kenyataannya didunia politik yang terkadang tidak sejalan dengan ajaran islam dan peran kiai harus membawa perubahan sebagai penjaga apabila terdapat politik yang kotor dan bertolak belakang dengan kebangsaan maka kiai dapat melakukan perannya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah tersebut. Keterlibatan kiai dalam politik juga harus diciptakan dengan rasa keadilan sosial, kemaslahatan umat dan kessejahteraan bangsa bukan untuk memenuhi keambisian dalam politi kekuasaan pribadi.

Jadi peran menunjukkan sebuah keterlibatan suatu individu yang melaksanakan suatu tindakan untuk mempengaruhi individu lain berdasarkan pada kedudukan/status yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2) Definisi Kiai

Menurut Zamakhsyari Dhofier, Kiai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam bidang agama Islam yang mengajarkan beberapa kitab kuning atau kitab klasik kepada para santrinya dan memimpin sebuah pondok pesantren.(Dhofier 1982:55)

Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin

pondok pesantren”. (Djamas 2008:55) Sebutan kiai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kiai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu'.

Banyak sebutan kiai yang sebenarnya tidak hanya dari ahli agama yang memimpin bahkan mendirikan pesantren saja. Tetapi sebutan kiai memiliki banyak artian dan makna. Di Indonesia sendiri banyak julukan atau sebutan bagi orang yang ahli atau pintar dalam agama islam. Misalnya, di daerah Jawa Barat (Sunda), banyak orang menyebut seorang yang ahli agama itu adalah Ajengan. Di daerah Sumatra Barat disebut Buya. Di daerah Aceh dikenal dengan panggilan Teungku. Di daerah Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama Tofanrita. Di daerah Madura disebut dengan Nun atau Bendera yang disingkatan “Ra”, dan Lombok atau sekitar wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan Tuan Guru. Hanya di Pulau Jawa sajalah panggilan Kiai itu melekat pada orang yang

ahli dalam bidang ilmu Agama Islam, walaupun ada sebutan lain yaitu Ki Ageng, atau Ki Gede(Ahmad Jaiz 2001:29-30).

Kiai juga memiliki tugas dan kedudukan yang dijelaskan menurut pendapat Menfred Ziemek dan Zamakhsyari Dhofier. Dua tokoh tersebut memiliki pendapat tersendiri mengenai tugas dan kedudukan seorang kiai yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Menfred Ziemek berpendapat bahwa seorang kiai adalah sebagai pemimpin sentral yang berkuasa dan pernah di dalam pesantren. Didalam bukunya “Pesantren dalam perubahan sosial”, Ziemek mengatakakan bahwa dalam pesantren Kiai memiliki otoritas, wewenang yang menentukan semua aspek kegiatan dalam bidang pendidikan dan kehidupan agama atas tanggung jawabnya sendiri (Ziemek, 1986: 138).

Sedangkan Zmakhsyari Dhofier berpendapat dalam bukunya “Tradisi Pesantren” bahwa Profil mereka (kiai) sebagai pengajar islam membuahkan pengaruh yang melampaui batas-batas desa dimana pesantren itu berada (Dhofier, 1982: 56).

Dari pendapat kedua tokohulama tersebut dapat dipahami bahwa tugas ataupun kedudukan seorang kiai tidak hanya monoton dalam mengajar di pesantren tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama di masyarakat. Kiai menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat karena kiai tersebut lahir di lingkup masyarakat dan arti masyarakat sendiri memiliki

penempatan tersendiri, penempatan ini didukung oleh beberapa alasan yakni:

- 1) Kiai adalah personifikasi orang yang dipandang luas dalam pengetahuannya tentang agama.
- 2) Kiai adalah cermin orang yang patuh menjalankan syariat agama Islam.
- 3) Kiai adalah sosok penjunjung moralitas Islam dan sekaligus penterjemah perilaku sehari-hari, mereka diberi ordian orang yang saleh.
- 4) Kiai merupakan tempat pelarian untuk mengadukan kesulitan hidup, tidak hanya soal agama tetapi juga hal-hal duniawi yang kadangkala bersifat sangat pribadi.
- 5) Kiai adalah tokoh yang mempunyai kemampuan membantu usaha-usaha desanya.
- 6) Kiai memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren yang juga dihargai oleh masyarakat, artinya karena pengalaman pendidikannya itu kiai merupakan barisan orang yang terdidik.
- 7) Kiai kebanyakan memiliki status ekonomi yang tidak rendah di masyarakat.
- 8) Kiai memiliki nasib keluarga yang dipandang tinggi.
- 9) Kiai menjadi penggerak perjuangan (Fajar, 1985: 51)

Dhofier juga menyebutkan bahwa kata kiai banyak digunakan untuk sebutan tokoh agama, disebut juga untuk gelar benda-benda pusaka, dan lainnya seperti:

- a) Gelar kiai merupakan sebutan untuk benda-benda kramat, benda-benda pusaka atau barang terhormat. Seperti Kiai Pleret, untuk sebutan tombak di keraton Surakarta, kiai Garuda Kencana untuk sebutan Kereta Emas keraton Yogyakarta, bahkan sebutan kiai juga melekat pada seekor kerbau dikeraton Surakarta yaitu Kiai Slamet.
- b) Gelar kiai juga merupakan suatu penghormatan kepada tokoh masyarakat. Gelar ini terkait kepada figur atau posisi seseorang yang terhormat di masyarakat atau biasa kita sebut dengan tetua. Dalam tradisi Jawa biasanya gelar ini disingkat menjadi Ki. Gelar kiai menjadi Ki berasal dari tradisi kerajaan-kerajaan Jawa dimasa lalu. Seperti Ki Buyut, Ki Ageng, Ki gede dan sebagainya. Pemberian gelar Ki juga bukan hanya sebagai penghormatan saja, tetapi ini adalah sebuah pengakuan dari masyarakat kepada tokoh tertentu yang memiliki kemampuan khusus dalam sebuah bidang tertentu. Dan gelar ini timbul secara alami berdasarkan keikhlasan pandangan masyarakat umum.

- c) Gelar kiai juga merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk orang yang ahli dalam bidang agama islam yang memiliki atau memimpin pondok pesantren yang mengajarkan kitab klasik kepada para santrinya

Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban. (Dhofier 1982:56) Pembagian gelar kiai yang disebutkan oleh Dhofier diatas ternyata mengalami pergeseran arti pada masa sekarang ini. Pasalnya kiai pada masa sekarang ini tidak hanya melekat pada sosok yang memimpin pesantren, tetapi juga digunakan untuk memberi gelar kepada seorang ahli agama islam, ataupun ilmuwan islam yang tidak memimpin pondok pesantren. Bahkan saat ini figur seorang kiai dibedakan dari tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Seorang pendidik atau kiai mempunyai kedudukan layaknya orang tua dalam sikap lemah-lembutan terhadap murid-muridnya, dan kecintaannya terhadap mereka. Dan ia bertanggung jawab terhadap semua muridnya dalam perihal kehadiran kiai atau pendidik. Sebagaimana Rasulullah SAW

bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Mutafaq Alaih) (Nashiruddin 2006:8)

Biasanya, ketokohan antar kiai adalah sebuah dampak dari tindak lanjut sebuah kepemimpinan kiai pesantren. Menurut Pradjarta Dirdjosanjoto, ia melakukan penelitian sejumlah kiai di Pati Jawa Tengah, bahwa sumber kewibawaan kiai terletak pada lima faktor yang mempengaruhinya (Pradjarta 1999:155-158) , yaitu :

- a) Kewibawaan seorang kiai didasarkan atas superioritas dalam bidang agama yang, melebihi orang awam. Kiai tidak dipandang sebagai tokoh agama tetapi juga memiliki kekuatan supranatural.
- b) Kewibawaan seorang kiai didasarkan atas sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa kiai pesantren tidak saja berkedudukan sebagai guru, pemimpin pesantren, tapi sekaligus kiai adalah sabagai pemilik pesantren. Sehingga kedudukan kiai memberikan otoritas yang sangat kuat di lingkungan pesantren.
- c) Kewibawaan seorang kiai didasarkan atas adanya jaringan antar kiai yang bersumber dari beberapa basis pesantren baik melalui perkawinan, maupun persaudaran atau yang lain, sehingga diantara kiai memiliki hubungan kekerabatan dengan kiai lain.

- d) Kewibawaan seorang kiai didasarkan atas adanya relasi kiai dengan pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan di luar seperti partai politik, LSM, ataupun organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama' (NU).
- e) Kewibawaan seorang kiai juga didasarkan atas kualitas secara pribadi dalam penguasaan ilmu keagamaan, terhadap hukum islam, dan faktor keturunan. Karena dalam tradisi masyarakat Jawa orang yang memiliki keturunan kiai atau anak kiai (Gus) dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu laduni atau ilmu pemberian Allah swt yang dibawa sejak lahir.

Menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya *An-Nashaihud Diniyah* mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri kiai di antaranya ialah: Dia takut kepada Allah, bersikap zuhud pada dunia, merasa cukup (*qana'ah*) dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya. Kepada masyarakat dia suka memberi nasehat, ber-amar ma'ruf nahi munkar dan menyayangi mereka serta suka membimbing ke arah kebaikan dan mengajak pada hidayah. Kepada mereka ia juga bersikap *tawadhu'*, berlapang dada dan tidak tamak pada apa yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya daripada yang miskin. Dia sendiri selalu bergegas melakukan ibadah, tidak kasar sikapnya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik, Di dalam *Shahih Muslim* di sebutkan dari Ibnu Mas'ud ra, dia

berkata. Rasulullah saw bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang didalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat zaarah (HR. Muslim). (Salikin 2006:264)

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kiai di antaranya yaitu:

- 1) Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi.
- 2) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- 3) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- 4) Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.(Fuad Noeh 2002:102)

Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kiai di antaranya yaitu:

- 1) Seorang Kiai tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya.
- 2) Seorang Kiai mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan

yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.

- 3) Seorang Kiai harus mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah.
- 4) Seorang Kiai harus menjauhi dirinya dari godaan penguasa jahat.
- 5) Seorang Kiai tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan.

3) Tipologi Kiai

Dalam banyak studi mengenai kiai, maka kiai dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok (Amad Fauzan 2004:23) yaitu:

- a) Kiai Langgar, yaitu kiai yang mengajar para santri di langgar atau di musholla kecil. Biasanya kiai ini tinggal di desa-desa yang tidak memiliki pondok pesantren yang dihuni oleh para santrinya, tetapi kiai ini mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sekitar.
- b) Kiai Pesantren, yaitu kiai yang mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh para santri yang menuntut ilmu agama dari pelosok kampung. Di pondok pesantren inilah seorang kiai mengajarkan berbagai kitab klasik kepada para santrinya.
- c) Kiai Mubaligh, yaitu kiai yang melaksanakan dakwah dan pengajian di desa-desa dan tempat lain. Biasanya kiai ini

tidak memiliki pondok pesantren layaknya kiai pesantren lainnya.

- d) Kiai Politik, yaitu kiai yang banyak terjun kedalam politik praktis meskipun dia menyempatkan diri dalam proses pembelajaran di madrasah dan pesantren.
- e) Kiai Madrasah, yaitu kiai yang tugas dan pekerjaannya adalah mengajar para santri di madrasah.

Endang Turmudi dalam mengklasifikasikan kiai agak berbeda jika dibandingkan oleh Ahmad Fauzan diatas. Endang Turmudi yang meneliti variasi ke-kiai-an di Jombang Jawa Timur mengklasifikasikan kiai kedalam empat kelompok , yaitu (Turmudi 2004:32-34)

- a) Kiai Pesantren, adalah kiai yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan di pondok pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dipondok pesantren. Disini kemudian terjalin hubungan kekerabatan antara kiai dan santri dan membuat lingkungan baru yaitu pondok pesantren. Santri merupakan aset terpenting bagi kehidupan pesantren karena akan sangat menentukan eksistensi pesantren itu sendiri. Disamping itu santri merupakan sumber jaringan antara pesantren yang satu dengan yang lain. Mereka yang menyelesaikan pendidikannya di pesantren dan kemudian menjadi kiai di kampung halamannya, maka mereka akan membangun jaringan antara pesantren yang dulu sebagai tempat

belajarnya dengan para santri yang mereka kelola saat ini. Atau bahkan mereka ditunjuk sebagai pengganti kepemimpinan pesantren ketika sang kiai sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal dunia.

- b) Kiai Tarekat adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan-kegiatan membangun batin (dunia hati) umat islam. Kiai tarekat ini biasanya mempunyai lebih banyak pengikut dibandingkan dengan kiai pesantren. Karena tarekat merupakan lembaga formal, maka pengikutnya adalah anggota formal gerakan tarekat. Ada banyak macam gerakan tarekat yang ada di Indonesia, contohnya adalah Terekat Qodiriyah wa Nahsabandiah dan masih banyak lagi.
- c) Kiai Politik lebih merupakan katagori campuran. Namun ia lebih concern dalam masalah politik praktis, baik terjun sebagai struktural maupun sebagai jurkam sebuah partai politik.
- d) Kiai Panggung adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Biasanya pengikut kiai ini tersebar di beberapa daerah. Namun demikian tidak semua kiai panggung mempunyai banyak pengikut. Hal ini tergantung pada tingkat kepopuleran sang kiai tersebut dalam berdakwah. Dan biasanya kiai ini bersifat lokal, artinya kiai ini hanya terkenal di suatu daerah tertentu dimana kiai itu tinggal.

Sosok seorang kiai memiliki peran yang kehadirannya sangat diharapkan bagi semua masyarakat dengan adanya suatu status atau kedudukan sosial, untuk itu seorang kiai haruslah memiliki suatu kualitas diri yang harus tetap dijaga agar tetap menjadi sumber otoritas. Dengan adanya suatu kualitas maka kiai mampu menjalankan perannya untuk mempengaruhi masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat seorang kiai atau ulama juga memiliki fungsi dan peranan yang penting diantaranya yaitu:

a) Sebagai ulama'

Kiai sebagai ulama' artinya ia harus mengetahui, menguasai ilmu tentang agama islam, kemudian menterjemahkan ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, menyampaikan dan emmberikan contoh dalam pengamalan dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Ulama adalah seorang yang ahli dalam ilmu aga dan ia juga memiliki integritas kepribadian yang sangat tinggi dan mulia serta memiliki akhlakul karimah yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Syarat ulama adalah orang memiliki sifat takut kepada Allah dalam artian koai adalah orang yang bertakwa takut kepada allah dengan menghindari seluruh larangannya dan selalu mengikuti perintahnya (Arifin, 2003: 308) Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama' (QS. Al-Fathir) (Depag RI, 2001: 349).

b) Sebagai pengendali sosial

para kiai yang dominan di Jawa merupakan sektor kepemimpinan islam yang paling dominan dan selama berabad-abad telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial, kultur, dan politik. Berkat pengaruh yang besar sosok kiai di masyarakat, kiai mampu membawa masyarakatnya kemana ia kehendaki. Dengan demikian seorang kiai mampu mengendalikan keadaan sosial masyarakat yang penuh dengan perkembangan dan perubahan itu. Seperti yang dikatakan oleh Horikoshi, bahwa “kiai berperan kreatif dalam perubahan sosial. Bukan karena sang kiai meredam akibat perubahan yang terjadi, melainkan justru karena memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Kiai yang terkenal dengan memimpin secara tradisipnal ini ternyata mmapu mengendalikan masyarakat akibat dari perubahan yang terjadi dengan memberikan solusi yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran islam. Seperti yang dikatakan kembali oleh horikoshi, bahwa ilmu-ilmu agama digunakan secara kreatif untuk melakukan antisipasi terhadap kebutuhan akan perubahan,

disamping sebagai alat penentu mana bagian yang esensi dari kehidupan yang tidak dapat ditawar dan harus diperjuangkan (Arifin, 2003: 309)

c) Sebagai penggerak perjuangan

kiai sebagai pemimpin yang tradisional di mata masyarakat sudah tidak diragukan lagi sebagai penggerak perjuangan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakatnya. Sejak zaman kolonial Belanda, Para kiai sudah banyak yang memimpin rakyat untuk mengusir para penjajah. Pada zaman penjajahan belanda, agama islam adalah faktor nomor satu yang dapat menyatukan kelompok suku bangsa yang memiliki tempat tinggal berpecah dan semua itu tidak lepas dari gerakan perjuangan Kiainya (Dhofier, 1982: 172)

selanjutnya Zamakhsyari Dhofier juga menjelaskan berkat seorang perjuangan kiai, mampu menanamkan rasa anti penjajah kepada beberapa suku bangsa di indonesia. Demikian pada periode setelah kemerdekaan, kiai juga berperan mengisi kemerdekaan seperti yang dijelaskan oleh zamakhsyari Dhofier, bahwa ditengah gejolaknya pembangunan ekonomi di Indonesia kiai adalah kelompok orang yang bersedia untuk membangun kesejahteraan bangsanya. Status kiai yang tinggi itu tidak dapat tergoyahkan oleh para pejabat pemerintah, dan keadaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kiai untuk kepentingan masyarakatnya. Kiai juga

diharapkan mampu melaksanakan tugas kemasyarakatan dan bersama dengan masyarakatan memperjuangkan nilai-nilai agama islam tersebut.

Berdasarkan pada fungsi dan peranan kiai di masyarakat tersebut, maka kiai memiliki sebuah peranan yang menjabarkan segala kharisma yang dimilikinya seperti ilmu pengetahuan, tingkah laku sopan, bahkan dari segi politik juga.

Dalam hal ini segala kelebihan yang ada dalam diri kiai menjadi sebuah otoritas. Otoritas dalam pembahasan ini berarti sebuah kekuasaan yang dijelaskan dalam teori otoritas dari Max Weber. Seorang pemimpin memiliki sebuah otoritas. Otoritas menurut weber adalah sebuah kekuasaan yang sah. Jika dijabarkan maka otoritas adalah suatu kekuasaan yang terdapat dalam seorang pemimpin yang dapat dilakukan dengan segala bentuk. Untuk menggunakan suatu otoritas maka seorang pemimpin harus dapat bertindak untuk menghubungkan seseorang menuju ke hal yang lebih baik. Pengaruhnya terhadap orang lain yaitu orang lain dapat mengikuti/patuh terhadap segala bentuk doktrin/kata yang diucapkan oleh seorang pemimpin tersebut. Adapun poin dari teori otoritas tersebut adalah :

1) Otoritas Kharismatik

Otoritas kharismatik merujuk pada sebuah kualitas individual (Weber 1947:358). Otoritas kharismatik adalah sebuah kemampuan yang ada pada individual. Otoritas kharismatik diyakini orang sekitar bahwa dengan kemampuan

yang dimiliki adalah sumber untuk menyebarkan segala perintah. Para pemimpin yang kharismatik biasanya muncul dalam segala aspek bidang kehidupan seperti Nabi, Penguasa terkemuka, Penghasut Politik. Bagi Weber, kharismatik memerankan 2 fungsi yang penting dalam kehidupan, Pertama, kharisma adalah sumber pembaharuan, dimana dalam kehidupan perubahan sosial menjadi unsur yang strategis. Perubahan sosial inilah yang dapat mempengaruhi pengikut untuk hormat dan tunduk kepada pemimpin, pemimpin juga merasa dirinya dihormati, dan diakui. Kedua, Kharisma adalah suatu hal yang melahirkan sebuah panggilan dalam keyakinan. Artinya seseorang dapat mengetahui suatu kualitas diri dengan cara bertindak sesuai kharisma tersebut. Sehingga pemimpin yang memiliki sikap kharismatik dianggap profan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Kharisma memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah daya tarik seorang pemimpin. Istilah itu juga dikemukakan oleh Weber dalam menggambarkan seorang pemimpin agama yang berkharismatik dengan dasar kepemimpinannya adalah sebuah kepercayaan bahwa orang tersebut memiliki hubungan khusus dengan ilahi. Kharisma seorang pemimpin dapat meningkat apabila pemimpin tersebut dapat menempatkan kharisma sebagai suatu penunjang dalam perubahan sosial dan dapat dirasakan manfaatnya untuk semua pengikutnya.

2) Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional merujuk pada kekuasaan kuno. Kekeuasaan kuno bisa diartikan sebagai warisan. Dalam hal ini otoritas tradisional adalah suatu kewenangan yang bersifat kuno yang dipandang suci sebab tradisional adalah suatu warisan. Sebelum sistem berkembang terdapat otoritas tradisional. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan kuno yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dalam meyakinkan pengikutnya. Weber berpendapat bahwa, Otoritas Tradisional merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin yang sebelumnya dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin yang baru (Weber 1921/1968 :223)

3) Otoritas Legal-Rasional

Otoritas Legal rasional merupakan suatu kewenangan yang dilakukan secara terus menerus. Weber berpendapat bahwa otoritas legal harus bertumpu pada keyakinan terhadap legalitas aturan yang berlaku. Dalam hal ini otoritas legal rasional adalah kewenangan dengan sebuah keyakinan terhadap aturan yang berlaku dan dilakukan dengan terus-menerus. Pemimpin saat ini tidak hanya dengan otoritas kharismatik saja, melainkan kemampuan memerintah yang rasional. Dapat dilihat bahwa otoritas legal rasional didasarkan pada suatu aturan yang

legal dimana pemimpin dipilih berdasarkan dari kemampuannya dalam kewenangan rasional nya.

Dalam hal ini teori yang dikemukakan oleh Max Weber memiliki relevansi dengan Kiai. Karena dalam hal ini kiai sebagai pemegang segala otoritas di pesantren. Otoritas tersebut bukan hanya untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk seluruh komponen disekitarnya, seperti santri dan masyarakat. Otoritas yang ada dalam kiai sangat dipengaruhi oleh kepribadian, sehingga otoritas kiai memiliki relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu otoritas Kharismatik , otoritas tradisional dan otoritas legal rasional. ketiga poin otoritas tersebut dapat disimpulkan bahwa otoritas kharismatik merujuk pada pengaruh pemimpin dengan kualitas yang dimiliki untuk mempengaruhi pengikutnya. Otoritas tradisional merujuk pada suatu kebiasaan yang tiak dapat berubah/ ditetapkan. Otoritas legal rasional merujuk pada aturan yang berlaku dan dilakukan secara terus menerus.

House (1997) dalam Yukl (2001:294) berpendapat bahwa seorang pemimpin yang kharismatik memiliki pengaruh yang tidak biasa pada bawahannya. Para bawahan merasa bahwa keyakinan yang diajarkan pemimpin adalah benar, dan bawahan juga bersedia mematuhi apa yang dibicarakan oleh pemimpin. Bahkan para bawahan memiliki kekaguman tinggi kepada pemimpin yang berkharismatik karena mengabggap pemimpin tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa.

Jadi dalam pembahasan peran kiai yang memiliki otoritas kharisma sangatlah memiliki relevansi dengan kiai yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Kiai memiliki kedudukan sebagai tokoh utama dalam tatanan kehidupan di pondok pesantren, hal ini dikarenakan kiai menjadi pemimpin bahkan pemilik pesantren sekaligus. Dalam kedudukan tersebut maka peran seorang kiai sangatlah besar dalam segala aspek seperti bimbingan/ajaran islam, penyebaran agama , pembinaan akhlak bahkan masalah politik sekaligus. Dalam hal ini peran kiai juga terbentuk langsung dalam diri kiai. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kiai sangat berpengaruh dalam keberhasilannya di segala bidang yang ia tekuni, baik agama maupun sosial politik.

Seperti yang terdapat dalam sosok kiai, kiai juga merupakan tokoh yang kharismatik dimata santri maupun masyarakat. Jadi munculnya kiai yang berkharisma tidak terlepas dari sebuah kualitas yang dimiliki. Kharisma seorang kiai berpengaruh ketika kiai berada di lingkupnya, seperti contoh lingkup pesantren ataupun lingkup sosial masyarakat. Hal tersebut menimbulkan seorang kiai dihormati dan diakui.

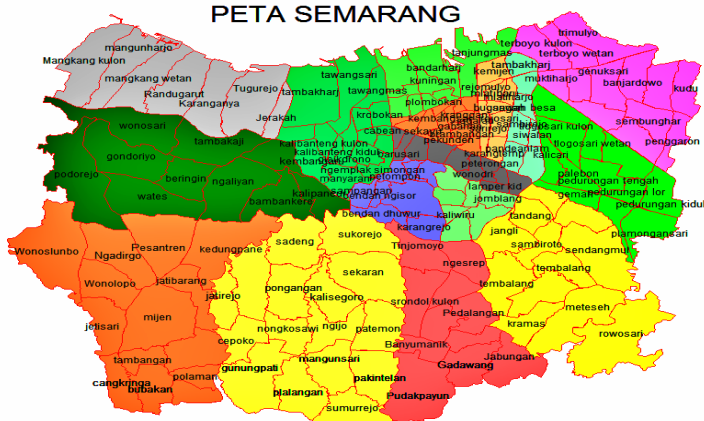
Dari beberapa teori peran yang sudah ada, saya menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto yang membagi peran sebagai politik kebangsaan yang sudah dijelaskan yakni peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif yaitu memiliki kecenderungan ikut mengimplementasikan Pancasila.

BAB III
LANDSCAPE KEBERAGAMAN KOTA SEMARANG DAN
GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL ITQON
BUGEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Pada gambaran umum diuraikan tentang informasi-informasi umum yang berkaitan dengan penelitian Peran Politik Kebangsaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh. Dalam gambaran umum Kota Semarang termuat keterangan mengenai kondisi geografis, kondisi demografi dan kondisi perekonomian Kota Semarang. Dalam Potret Keberagaman Agama Kota Semarang termua keterangan mengenai persebaran agama di Kota Semarang dan persebaran Pondok Pesantren. Pada pembahasan mengenai Gambaran Umum Pondok Pesantren terdapat keterangan umum mengenai Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang dan Kiai Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang yakni KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai objek penelitian.

Gambar 1: Peta Kota Semarang



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang pada tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang religius, Tertib dan Berbudaya. Dan Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 3) Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

1) **Kondisi Geografis Kota Semarang**

Kota Semarang terletak diantara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km² yang secara administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah. Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km². Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km² .

Letak geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi diantara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berkembang pesat karena adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis

kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Semarang memiliki iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim, yakni musim kemarau pada bulan April-September dan musim penghujan antara bulan Oktober- Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 23 derajat celcius sampai dengan 34 derajat celcius, dengan kelembapan udara tahunan rata-rata 77 persen.

2. Kondisi Demografi Kota Semarang

Tabel 1

Table 1: 1Kepadatan Penduduk Kota Semarang

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
MIJEN	83 321
GUNUNGPATI	98 343
BANYUMANIK	141 689
GAJAHMUNGKUR	55 857
SEMARANG SELATAN	61 616
CANDISARI	74 952
TEMBALANG	191 560
PEDURUNGAN	193 128
GENUK	125 967
GAYAMSARI	69 792
SEMARANG TIMUR	65 859
SEMARANG UTARA	116 820
SEMARANG TENGAH	54 696
SEMARANG BARAT	147 885
TUGU	32 948
NGALIYAN	142 131

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

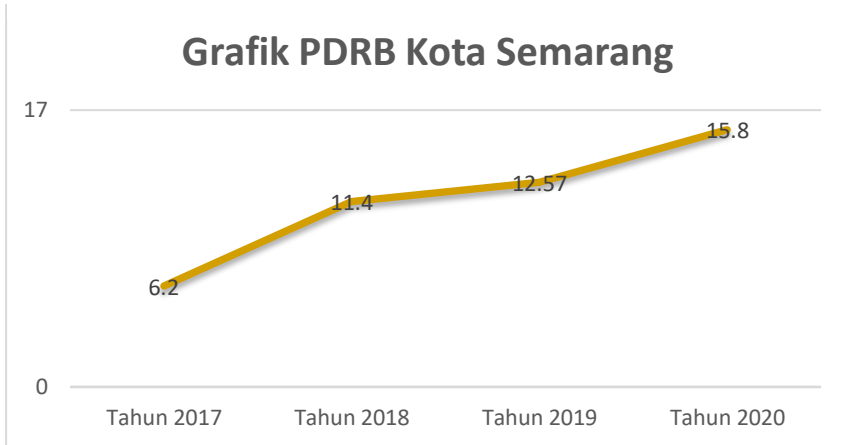
Berdasarkan data tabel diatas bahwa pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Daya tarik Kota semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus pusat perekonomian dan pusat pendidikan menjadi penyebab jumlah penduduk di Kota Semarang.

3. Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Kondisi perekonomian adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, peran pemerintah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perseorangan. Oleh karena itu perekonomian harus dilakukan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi di kota semarang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan demikian pembangunan dan pemerataan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu Kota Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan

Gambar 2: Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Semarang



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Dalam Grafik diatas sampai tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan yang signifikan. Sampai pada tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan dari 6,2 persen ditahun 2017, menjadi 12,4 pesen di tahun 2018 dan terus mningkat ditahun 2019 dan tahun 2020. Peningkatan tertinggi yakni pada tahun 2020 menjadi 15,8 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perangkat pokok dalam neraca ekonomi regional. Neraca ekonomi regional pada umumnya berhubungan dengan masalah ekonomi dinilai dalam bentuk uang, antara lain mengenai tingkat produksi, nilai tambah dan agregat ekonomi makro lainnya yang memperoleh hasil kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

B. Potret Keberagaman Agama Kota Semarang

1) Angka Persebaran Agama dan Persebaran Tempat Ibadah

Kota Semarang memiliki penduduk yang heterogen dengan campuran beberapa etnis seperti Jawa, China, Arag dan Keturunan. Terdapat nuga etnis lain dari berbagai daerah di Indonesia yang datang kesemarang untuk mengembangkan sektor usaha, menuntut ilmu dan menetap di Kota Semarang. Meskipun masyarakat kota Semarang terdapat campuran etnis seperti yang dijelaskan sebelumnya, toleransi kehidupan umat beragama sangat terasa tinggi

Table 2: Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) di Kota Semarang (2020)

Agama yang Dianut	Jumlah Pemeluk Agama
Islam	1 470 442
Katholik	86 166
Protestan	116 744
Budha	10 894
Hindu	1 236
Lain-lain	427

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*
(diolah 5 Juni 2022)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.470.442 jiwa, Katholik dengan jumlah 86.166 jiwa, Protestan 116.744 jiwa, Budha dengan jumlah 10.894, Hindhu dengan jumlah 1.236 dan yang terakhir yakni lain-lain sekitar 427 jiwa. Perbedaan agama tersebut tidak

boleh dijadikan sebagai konflik antar umat di Kota Semarang. Dengan adanya perbedaan tersebut maka sebagai warga kota Semarang dapat menjalin kebersamaan dalam hidup meski berbeda dalam memeluk agama.

Keberagaman agama juga dapat dilihat dari fasilitas tempat ibadah yang ada di titik sudut Kota Semarang. Fasilitas tempat ibadah merupakan hal yang penting untuk kegiatan keagamaan. Secara umum, di Indonesia mengakui secara sah enam agama yang dilindungi oleh undang-undang yang menjadi patokan hukum Indonesia.

Gambar 3: Banyaknya Tempat Ibadah di Kota Semarang Tahun 2019



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang* (diolah 5 Juni 2022)

Dari data diatas menunjukkan bahwa agama islam yang emnjadi mayotas penduduk di Kota Semarang memilii banyaknya fasilitas keagamaan seperti Masjid pada tahun 2020 terdapat 1.408 bangunan, langgar/Musholla/surau terdapat 1.304 bangunan, dan Gereja sekitar 288 bangunan yang terakhir yakni vihara 13 bangunan.

2) Potret Perkembangan Pondok Pesantren

Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia tidak terlepas dengan penyebaran dan penyiaran agama islam di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli indonesia (diakses pada 7 Juni 2022 <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/sejarah>)

Untuk meningkatkan pendidikan dalam bentuk pesantren, pemerintah kota semarang akan terus mengusahakan dan menunjang adanya pondok pesantren di Kota Semarang.

Gambar 4: Persebaran Pondok Pesantren

KECAMATAN	JUMLAH PONDOK PESANTREN
MIJEN	3
GUNUNGPATI	2
BANYUMANIK	3
GAJAHMUNGKUR	1
SEMARANG SELATAN	2
CANDISARI	4
TEMBALANG	17
PEDURUNGAN	20
GENUK	1
GAYAMSARI	4
SEMARANG TIMUR	5
SEMARANG UTARA	2
SEMARANG TENGAH	6
SEMARANG BARAT	1
TUGU	9
NGALIYAN	11

Sumber: <https://ponpes.net/daftar-pondok-pesantren-di-kota-semarang/> (Diolah pada 7 Juni 2022)

Pada dasarnya masyarakat juga membutuhkan adanya pembangunan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berkelanjutan. Terbukti banyaknya pondok pesantren yang dibangun di kota semarang berdasarkan gambar tabel diatas. Di kecamatan pedurungan terdapat 20 pondok pesantren dengan perbandingan lebih banyak dibanding kecamatan lain.

Pondok Pesantren adalah subsistem dalam sistem pendidikan Nasional yang termasuk ke dalam jenis pendidikan

pada jalur luar sekolah. Sebagai sistem dalam sistem pendidikan Nasional, Pondok Pesantren memiliki kedudukan dan peran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan dan pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia yang berkualitas Dalam rentang perjalanan bangsa, Pondok Pesantren dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan Ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader Ulama yang merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam Pembangunan Nasional.

C. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang

1) Profil Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang

Sebelum tahun 1800 M terdapat sebuah desa dengan keadaan sosial masyarakat dan kesadaran agama masih rendah, bahkan belum ada atau malah sulit ditemukan orang yang mengenal Islam, terlebih orang yang menjalankan syari'at Islam. Sekitar tahun 1988 , Syekh Abu Yazid dari Banjarmasin Memoperistri Nyari Rohmah putri dari Kiai Abdurrasul . Pada saat itu lurah Bugen (Kasma Wijaya) meminta Syeikh Abu Yazid Untuk menetap di desa Bugen untuk berdakwah.

Setelah menetap , Syeikh Abu Yazid juga mendirikan masjid yang dibangun dari rumah pemberian lurah Kasma Wijaya. Sejak berdirinya masjid tersebut , Syekh Abu Yazid sebagai menjadi imam di masjid tersebut. Sepeninggalan Syekh Abu Yazid, imam masjid digantikan oleh Kiai Abu Darda' (H. Syakur) yang termasuk putra Syekh Abu Yazid. Kiai Dardak meninggalkan putri yang bernama Nyai Khoiriyyah. Pada saat itu , Nyai Khoiriyyah menikah dengan KH. Abdurrosyid yang berasal dari Demak. KH. Abdurrasyid kemudian menggantikan Kiai Abu Darda'. Pertama kali KH. Abdurrasyid menjadi imam masjid menjadikan awal mula berdirinya sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren yang baru lahir dan belum mempunyai nama itu lebih menonjol dibidang tasawufnya dari pada pengajian kitab-kitab kuning. Santri yang ada disana berasal dari Banjarmasin . Mereka terus belajar agama agar kelak bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh KH . Abdurrasyid.

Periode selanjutnya , pondok pesantren diasuh oleh KH Shodaqoh Hasan . Pada saat itu pondok pesantren yang didirikan oleh KH Abdurrasyid diberi nama Al-Irsyad. KH Shodaqoh Hasan terus mengupayakan agar kelak pondok pesantren dapat berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Pondok pesantren terus melakukan kegiatan seperti pengajian kitab kuning dan berjalan lancar. Oleh karen itu , KH

Shodaqoh Hasan mendirikan Madrasan Diniyyah dan kurikulum yang siberi nama Al Wathoniyah.

Sekitar tahun 1988 , KH Shodaqoh Hasan wafat , setelah wafat Pondok pesantren yang sebelumnya dipimpin oleh KH Shodaqoh Hasan digantikan oleh putranya yaitu KH Ahmad Haris Shodaqoh. Saat dipimpin oleh KH Haris Shodaqoh diadakan pengkhususan kurikulum yaitu Ma'had Tafsir dan Sunnah Al Itqon. Pondok pesantren dibawah pimpinan KH Haris Shodaqoh berupaya terus melestarikan kegiatan seperti pengajian kitab kuning yang berlandaskan Al Quran . Seiring berjalannya waktu , Pondok Pesantren mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya santri yang datang untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren tersebut. Dibawah pimpinan KH Ahmad Haris Shodaqoh , pondok pesantren juga membuka lembaga pendidikan yang setara dengan SD , SMP ,SMA .

2) Tujuan

Sebuah lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan , bahkan pondok pesantren al itqon pasti juga memiliki tujuan agar kegiatan belajar baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama dapat berjalan sesuai arah dan tujuannya. Adapun tujuan didirikannya pondok pesantren tersebut adalah

3) Letak Geografis

Pondok Pesantren Al Itqon terletak di JL KH. Abdurrasyid Tlogosari Wetan Bugen Kecamatan Pedurungan , Jawa Tengah Semarang 50196. Pondok pesantren al itqon berada di Kelurahan Tlogosari Kulon apabila dilihat dari jarak . Dilihat dari kecamatan pedurungan pondok pesantren al itqon berada sejauh 3 km dan dari pusat kota semarang sejauh 10 km.

Lokasi madrasan juga berada di Tlogosari kulon yang berbatasan dengan Muktiharjo dan Kalicari. Pondok pesantren al Itqon terletak di ujung tenggara Kota Semarang.

4) Program Kegiatan Pondok Pesantren Al -Itqon

Pada lingkungan pesantren al itqon terdapat program kegiatan formal dan informal. Para santri akan belajar banyak hal dari semua kegiatan yang ada di pondok pesantren. Santri tidak datang hanya dari kota Semarang saja , tetapi juga berasal dari daerah lain seperti Demak , Pekalongan , Pemalang , Temanggung. Maka dari itu para santri harus menyesuaikan teman-teman lainnya. Para santri tidak hanya belajar mengaji saja tetapi harus belajar bagaimana cara menghormati karakteristik , kebiasaan bahkan bahasa dari teman-teman santri lain.

Seperti pondok pesantren pada umumnya , kegiatan yang dilakukan oleh para santri pasti dilakukan dari pagi sampai malam. Kegiatan di pondok pesantren al itqon yaitu

sekolah diniyyah yang wajib diikuti oleh para santri. Program lain seperti lembaga pendidikan formal diantaranya yaitu , RA , MI , MTS , dan MA. Pada saat pagi sampai siang hari kegiatan yang dilakukan oleh para santri yaitu sekolah formal kemudian pada saat sore sampai malam hari kegiatan yang dilakukan oleh para santri yaitu mengaji. Untuk membentuk santri yang berilmu dan berakhlakul karimah , KH Haris Shodaqoh sebagai pengasuh juga ikut mengajar langsung para santrinya. KH Haris Shodaqoh juga menuntut para santri agar mempelajari kitab kuning. Kegiatan pembelajaran lain di pondok pesantren al itqon yaitu sorogan , pembelajaran kitab tafsir , bersholawat dan ibadah malam jumat. Jadi diharapkan para santri tidak hanya berprestasi di pendidikan formal saja , tetapi juga bisa mendapatkan dan bahkan juga bisa menerapkan ilmu agama yang sudah diajarkan.

Pondok Pesantren Al Itqon juga memiliki kegiatan lain yang bisa diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk proses agar pondok pesantren al itqon dapat dikenal di masyarakat. Setiap lembaga pendidikan dakwah pasti terus melakukan kegiatan agar bisa memotivasi masyarakat sebagai bentuk dari pencapaian tujuan dalam suatu lembaga. Dalam memotivasi masyarakat sebuah lembaga dakwah semata hanya karna Allah dan sebagai sebuah tanggung jawab untuk menyebarkan agama dan membantu masyarakat agar menjadi insan yang baik dan soleh di kemudian hari.

Kegiatan yang dilakukan santri selama di Pondok pesantren meliputi :

(a) Shalat jamaah lima waktu

Kegiatan ini harus dilakukan baik didalam pondok pesantren maupun ketika santri berada diluar pondok pesantren. Shalat lima waktu hukumnya wajib. Oleh karena itu di pondok pesantren al itqon selalu menerapkan shalat jamaah untuk melatih para santri agar terbiasa melakukan shalat lima waktu. Untuk kegiatan ini dipimpin oleh kiai atau pengurus pondok

(b) Pengajian

Kegiatan pengajian ini dilakukan secara bersama-sama dengan cara menghadap seorang kiai atau ustad yang menerjemahkan kitab dalam bahasa arab. Di pondok pesantren al itqon sendiri kegiatan pengajian diikuti santri putra maupun santri putri.

(c) Wiridan

Kegiatan ini sebagai bentuk cara kita memuji nama Allah SWT. Di pondok pesantren al itqon wiridan dilaksanakan pada tengah malam di har Jumat dengan didahului shalat tasbih. Kegiatan wiridan pasti dipimpin oleh kiai atau pengurus pondok.

(d) BTQ

Kegiatan ini dilakukan agar para santri tidak salah dalam membaca al quran. Terkadang santri dapat

membaca alquran tetapi kurang memahami makhrajnya atau panjang pendeknya. Maka dari itu kegiatan ini untuk melatih para santri agar terbiasa membaca alquran dengan baik dan benar.

(e) Rebana

Kegiatan ini sebagai kegiatan dalam bidang kesenian. Kegiatan ini dapat melatih santri agar tidak hanya dalam ilmu agama saja, tetapi juga dalam kegiatan kesenian. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu setelah ashar.

Kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat umum meliputi

1. Pengajian ahad pagi

Kegiatan ini banyak diikuti oleh masyarakat. Baik itu masyarakat sekitar pondok pesantren ataupun masyarakat yang datang untuk ikut serta dalam pengajian. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan iman , menambah wawasan agama dan menambah persaudaraan. Dalam kegiatan ini pasti mendapatkan pengetahuan baru terutama ilmu agama. Kegiatan pengajian ahad pagi ini dipimpin oleh kiai yang dilakukan pada minggu pagi.

5) Visi dan Misi

Pondok pesantren Al Itqon Semarang pasti ingin menyelenggarakan pendidikan islam secara optimal dan

berkualitas. Tidak hanya nilai agama saja , tetapi terdapat nilai-nilai luhur budaya yang tercantum dalam visi misinya . Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Itqon adalah sebagai berikut:

1. Visi

Berakhlak dan berprestasi berdasarkan iman dan taqwa
(Imtaq)

2. Misi

- a. Membentuk santri yang berakhlakul karimah
- b. Membentuk santri yang berkarakter *ahlussunah waljamaah*
- c. Berfikir, bersikap, dan melakukan tindakan sesuai *Mabadi'ul Khoira Ummah* dalam kehidupan sehari-hari.

Agar tercapai visi dan misi tersebut , Pondok Pesantren Al Itqon juga melakukan beberapa hal agar dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut sebagai suatu penunjang agar visi misi dapat berjalan dengan baik , seperti :

1. Santri diharapkan dapat menghafal bacaan dan gerakan shalat.
2. Santri diharapkan dapat membaca alquran sesuai dengan makhrjanya.
3. Santri diharapkan dapat jujur , tanggung jawab dan hormat kepada kiai dan guru.
4. Santri diharapkan peduli dengan keadaan sekitar.

6) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat yang dipergunakan dalam menunjang suatu kegiatan. Kegiatan di pondok pesantren khususnya dalam kegiatan belajar mengajar pasti membutuhkan sebuah Bangunan/gedung, meja kursi, ruang kelas serta alat dan fasilitas lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebagai bentuk peranan pondok pesantren dalam hal menjalankan seluruh kegiatannya. Fasilitas prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung untu menunjang jalannya pendidikan. Seperti kebun , lapangan akan tetapi bermanfaat untuk kelancaran seluruh kegiatan yang dilakukan pondok pesantren.

Adapun sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar di pondok pesnatren al itqon adalah sebagai berikut :

1. Sarana pendukung kegiatan belajar mengajar

2.

- a. Luas bangunan : 4000 m persegi
- b. Status bangunan : Milik sendiri
- c. Kategori ruang belajar : Ruang Belajar
- d. Kamar asrama putra : 22 unit
- e. Kamar asrama putri : 17 unit
- f. Ruang belajar : dalam kondisi baik
- g. Masjid : 1 unit
- h. Ruang pimpinan : 1 unit

- i. Ruang Ustad : 2 unit
- j. Ruang TU : 2 unit
- k. Ruang Perpustakaan : 2 unit
- l. Toilet santri : Putra 17 unit. Putri
7 unit
- m. Sumber listrik : PLN

3. Tanah dan Gedung

- a. Tanah : Tanah bangunan yayasan seluas 1.228 meter persegi
- b. Gedung
 - 1. Gedung Pondok : 819 m persegi
 - 2. Gedung serba guna : 213 m persegi
 - 3. Kantor : 142 meter persegi
 - 4. Ruang asatid : 142 m persegi
 - 5. Perpustakaan : 195 m persegi
 - 6. Masjid : 320 meter persegi
 - 7. Lahan parkir : 120 m persegi
 - 8. Lapangan olahraga : 300 m persegi
 - 9. Kantin : 78 meter persegi

2. Biografi KH. Ahmad Haris Shodaqoh

1. Profile KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Pada tanggal 01 Januari 1953 KH.Ahmad Haris Shodaqoh dilahirkan di dusun Bugen Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Semarang. KH.Ahmad Haris Shodaqoh lahir dari pasangan KH.Shodaqoh Hasan dan Ibu Nyai Hikmah.

KH. Shodaqoh Hasan meninggalkan satu istri dan 12 anak salah satunya adalah KH Ahmad Haris Shodaqoh, yang hingga kini dipercaya sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Itqon. (Wawancara dengan Gus Sholah, 18 Mei 2021).

KH Ahmad Haris Shodaqoh garis keturunannya bersambung ke Sunan Kalijaga. Urutan silsilah keluarga dari KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai berikut: Ahmad Haris Shodaqoh putra Shodaqoh Hasan putra Hasan Asy'ari putra Muhammad Misbah putra R.Murthodito putra Zamsyari putra R.Wongso Taruna putra R. Bagus Towongso putra R. Satriyan putra Niti Negoro putra R.Santri putra Umar Sa'id Sunan Muria putra Syahid Sunan Gede Sunan Kalijaga putra R.Arya Wilotikto (Tumenggung Tuban).

Pada masa kanak-kanak KH Ahmad Haris Shodaqoh tidak seperti anak-anak lainnya. Beliau menghabiskan waktu kanak-kanaknya di dusunnya sendiri. Dusun Bugen Tlogosari Wetan adalah tanah kelahiran beliau. Seperti anak pada umumnya, KH Ahmad Haris Shodaqoh mudah bergaul dengan siapa saja. Teman-teman beliau adalah anak-anak yang berada di lingkungan pondok pesantren Al-Itqon yang di dirikan oleh kakeknya yaitu KH.Abdurrosyid. Setelah KH Abdurrosyid meninggal, Pondok Pesantren Al Itqon diteruskan oleh menantunya sendiri yaitu KH Ahmad Haris Shodaqoh.

Menginjak masa remaja KH Ahmad Haris Shodaqoh mulai menuntut ilmu dari pondok ke pondok. KH Ahmad Haris

Shodaqoh menuntut ilmu di Beringin Poncol Salatiga dengan tuntutan ayahnya KH. Shodaqoh Hasan. Beliau juga diasuh oleh kakak dari KH. Shodaqoh Hasan yang bernama KH. Ahmad Asyari. Dari Poncol Salatiga pindah ke Lirboyo Kediri asuhan KH. Mahrus Ali dan KH. Marzuqi, setelah dari Lerboyo Kediri kembali ke Salatiga. Kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Salatiga, namun hanya satu tahun, kemudian kembali lagi mengikuti kilatan (Pesantren kilat) di pondok pesantren dengan para kiai seperti; KH. Maimun Zubier, KH. Ahmad Hasan Asy'ari dan lain-lain. Selama satu setengah tahun beliau menjadi buruh di pon-pes Banten. Setelah pulang dari Banten KH Ahmad Haris Shodaqoh masih mengaji atau belajar di pon-pes Al-Itqon dengan asuhan ayahnya yaitu KH. Shodaqoh Hasan. Tidak lama kemudian ayahanda KH. Ahmad Haris Shodaqoh wafat. Sepeninggalan KH. Shodaqoh Hasan, dalam pengembangan pesantren dan dengan bentuk madrasah yang pada masa itu belum banyak di jumpai. Kemudian dari salah satu putra KH. Shodaqoh Hasan, yaitu KH Ahmad Haris Shodaqoh dipercaya untuk meneruskan atau mengasuh pon-pes Al-Itqon hingga saat ini. (Wawancara dengan KH. Ubaidullah Shodaqoh, SH 13 Mei 2021)

2. Karier KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Tidak hanya mengasuh pondok pesantren Al-Itqon yang telah berusia puluhan tahun, pada saat ini beliau juga menaungi lembaga pendidikan yaitu Yayasan Al-Wathoniyah. KH

Ahmad Haris Shodaqoh tidak hanya sebagai pengasuh Pondok pesantren Al-Itqon, KH Ahmad Haris Shodaqoh juga mengajar dan membina langsung kepada santrinya. Beliau juga memberikan bimbingan khusus kepada masyarakat dalam bentuk Majelis Taklim Pengajian Ahad pagi dan juga sebagai penasehat di Yayasan al Wathoniyyah. Pada tahun 1993-2000 beliau juga pernah aktif di partai politik PPP dan pernah menduduki jabatan anggota DPRD Kota Semarang. Tahun 2010 beliau juga pernah menjadi ketua Majelis Pertimbangan Wilayah. Tahun 2011 aktif sebagai wakil ketua MPW (Majelis Pakar Wilayah), Ketua MSW (Majelis Syariah Wilayah) DPW PPP Jawa Tengah. KH Ahmad Haris Shodaqoh Menjabat sebagai pengurus mutasyar NU jawa tengah, Ketua I (membidangi fatwa) di MUI Jawa Tengah tahun 2002 dan sebagai pembimbing KBIH NU Kota Semarang. (wawancara dengan KH Haris Shodaqoh tanggal 18 Mei 2021). Tidak hanya dalam organisasi saja, beliau juga memiliki Karya. Beliau juga menulis beberapa arikel, risalah. Karya yang beliau tulis adalah terjemah Tafsir Al Fatihah, Zubad, Tausiatul Asfiyah dan Khulasoh Nahjul Sayidina Ali. (Wawancara dengan KH Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021).

BAB IV
PANDANGAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH BERKAIT
RELASI AGAMA DAN NEGARA

A. Pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait Hubungan Agama dan Negara Agama menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Pemahaman tentang agama dan negara senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Muatan dan spirit keberagaman agama apa pun yang lahir belasan abad lalu dan pasti mengalami perkembangan karena zaman senantiasa berubah. Misalnya, dahulu saat Alquran turun langsung terlibat dialog dengan persoalan politik dan sosial secara langsung dalam kurun waktu 23 tahun. Itu pun dipandu langsung oleh Rasulullah Muhammad yang memperoleh otoritas tunggal dari Tuhan jika muncul perselisihan.

Mulanya semua agama diyakini sebagai firman tuhan, namun pada kenyataannya agama berkembang dibawah kekuasaan tokoh-tokohnya (Edi Gunawan, 2017: 106). Menurut Ibn Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas dikalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk

mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Ia juga berpendapat bahwa dengan adanya masyarakat, peradaban, dan negara tidak tergantung sepenuhnya akan adanya agama, tetapi agama justru sangat mempengaruhi pemikiran tentang manusia, masyarakat, dan negara. Ibnu Khaldun berupaya untuk menempatkan agama pada porsi yang sebenarnya, menurutnya agama dan negara saling memerlukan, melengkapi, dan hubungannya berlangsung secara timbal balik (simbiotik) (Syafiuddin, 2007: 151).

Secara global di dunia Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan: Pertama, aliran pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. Kedua, aliran kedua ini berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. Ketiga, aliran ketiga ini berpendapat bahwa aliran ini menolak Islam adalah agama yang lengkap, namun juga menolak pendapat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan, aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Munawir, 1993: 1)

Seperti yang dikatakan oleh KH Ahmad Haris Shodaqoh bahwa:

“Dengan adanya agama yang ada didalam diri manusia dapat menghindarkan manusia dari banyaknya resiko-resiko yang terjadi didalam negara seperti perpecahan. Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut manusia memiliki prinsip, nilai ataupun kaidah yang dianut dalam agama tersebut.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Menurut banyak kalangan, agama dipandang sebagai sebuah instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Agama islam dibandingkan dengan agama-agama lain sebenarnya adalah agama yang paling mudah untuk menerima segala sesuatu. Alasan utama dari agama islam yang paling menonjol adalah memiliki sifat dapat diterima siapa saja dan dapat hadir dimana saja. Hal ini dapat dinilai bahwa kehadiran agama islam selalu memberi nilai ataupun kaidah yang benar bagi manusia (Bahtiar effendy, 2011: 7).

Interpretasi yang luas tentang agama menjadi sempit bila diatur oleh negara. Agama tidak dbisa dikatakan sebagai religion, yaitu agama dalam artian umum yang didalamnya menghimpun semua agama-agama yang ada di bumi ini. Pengertian agama sangat terbatas pada satu agama tertentu yang diakui oleh negara sebagai agama resmi. Seperti di Indonesia yang membatasi aga menjadi lima saja, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu (Amril, 2016: 56).

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya menganut agama islam, keterlibatam agama dalam merespon bebagai masalah di kehidupan sosial masyarakat semakin jelas dan signifikan, salah satunya yaitu menempatkan hubungan yang memungkinkan dari sudut pandng islam dan negara. Hal ini karna serig kali menjadi

maslaah yang bersifat mendasar. Tidak heran jika segala pemikiran tentang agama dan negara kerap kali menjadi bahan diskusi dan perdebatan banyak ulama tempo dahulu. Aqidah, syariah, dan akhlak menjadi komponen penting di dalam agama islam dan memiliki pola hubungan yang dekat dengan dunia politik dalam artian luas. Islam memiliki peran penting sebagai sumbe motivasi untuk masyarakat dan menumbuhkan sikap dan perilaku.

Sepeerti yang dikatakan oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh mengenai peran agama

“Agama seperti penggerak bagi masyarakat. Dan agama islam diharapkan memiliki kontrol dengan posisinya yang sangat penting didalam kehidupan sosial masyarakat islam. Agama sebagai unsur keyakinan menjadi lebih nyata apabila memberikan kehidupan bagi seluruh manusia.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Menurutnya, peran agama sangatalah besar didalam kehidupan manusia, sebab agama adalah sistem kepercayaan, sebagaimana kepercayaan tersebut dibangun oleh penganutnya. Bahkan didalam kehidupan manusia apabila ingin selamat dan bahagia di dunia maupun diakhirat harus bertumpu pada kaidan atau aturan agama tersebut.

Menurut Fadhal AR Bafadal (2004: 170) mengutip pendapat Charles Y. Glock dan Rodney Starck mengemukaakan, bahwa agama itu memiliki 5 aspek keagamaan (religiusitas). Yaitu ideologi, ritual, intelektual, pengalaman keagamaan, dan kegiatan agama sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan ajaran agama islam, maka kelima aspek tersebut meliputi:

1. Akidah dan keimanan yang berkaitan dengan penghayatan agama atau internalisasi nilai-nilai agama
2. Ibadah keagamaan berkaitan dengan intensitas keberagamaan dan loyalitas (kepatuhan)
3. Aktivitas pengembangan nalar, pikir dan budaya keilmuan.
4. Pengalaman keagamaan berkaitan dengan tafakur, tadabur, tazakur, refleksi, membangun kesadaran dan memperkuat keimanan.
5. kegiatan keagamaan sehari-hari berupa ibadah sosial yang berkaitan dengan kepedulian sesama, persaudaraan, persatuan, kegiatan kemasyarakatan dan kebangsaan.

Oleh karena itu, agama bukan hanya soal pengakuan saja tetapi juga memiliki kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga agama menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang memiliki sifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan. Maka dalam konteks ini agama lah yang dapat dijadikan acuan atau pegangan hidup masyarakat untuk tujuan di dunia dan di akhirat.

Dalam konteks hubungan sosial, masyarakat menjalankan norma-norma termasuk norma agama. Interaksi yang berlangsung antara satu individu dengan individu lain yaitu dengan mentaati pedoman yang sesuai dengan nilai dan norma. Norma lain selain agama yaitu norma-norma sosial. Dalam masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini karena ketika didalam masyarakat, bagi mereka yang tidak dapat mentaati norma atau aturan maka dapat dikatakan sebagai orang yang menyimpang.

Menurut Ibn Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan sebuah negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas dikalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran, dengan agama pula tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai sebuah tujuan (al-Qahthani, t.th:264).

“Agama dalam pembahasan ini memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial. Dan agama pula yang dapat membangun kehidupan manusia. Maka dari itu manusia yang beragama dapat hidup di tengah masyarakat secara baik dan berbudi.”
(Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Agama islam oleh pemeluknya diyakini dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat spiritual maupun fisik material. Hal ini sepeerti yang dikatakan oleh KH Ahmad Haris Shodaqoh bahwa agama dapat emmbangun kehidupan manusia, agama selalu dilibatkan oleh pemeluknya untuk menaggapi berbagai maslaah karena kehadirannya dapat dirasakan karena memiliki posisi yang sentral dalam kehidupan sosial.

“Agama itu seperti pengendali, pengendali yang saya maksud yaitu dapat memberikan tuntunan atau bimbingan di kehidupan manusia agar manusia memiliki suatu sikap yang tenang, damai. Tenang dan damai itulah yang dapat menjauhkan manusia dari segala sikap yang buruk. Sikap manusia yang buruk itu dalam agama secara tidak langsung dapat merusak

batin manusia. Contoh suatu hari kita terkena musibah, kita terus menerus berfikir negatif terhadap Allah, kenapa cobaan selalau datang bertubi-tubi kepada saya. Saya salah apa. Saya melaksanakan shalat sudah, saya berdoa sudah. Tetapi Allah terus menguji saya. Nah hal ini yang daat merusak batin manusia. Orang yang tidak kuat agama nya akan merasa sedih dan terus menerus menyalahkan diri sendiri. Agama yang saya maksud tadi sebagai pengendali ya seperti ini. Segala pengalaman , segala cobaan kita harus bisa mnegdalikan dalam diri” Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

“Agama menurut saya juga sebagai penolong, penolong yang saya maksud yaitu manusia yang beragama yang selalu mengagungkan nama Allah SWT disetiap doanya, disetiap langkahnya kelak esok dapat menolongnya ketika sudah wafat. Orang yang selalu ingat dengan Allah kelak allah juga akan selalu mengingat. Setiap kita mengawali suatu kegiatan kita tidak lupa dengan berdoa. Berdoa menurut agama itu tadi menjadi penolong kita kelak.” Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Dari penjelasan KH. Ahmad Haris Shodaqoh diatas dapat dikatakan bahwa agama dangat dibutuhkan didalam kehidupan manusia, baik tua, muda, anak-anak maupun dewasa. Menurut KH Ahmad Haris Shodaqoh, Agama bukan tentang pengakuan saja, arti agama sangat luas dan memiliki peran tersendiri. Agama menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang memiliki sifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan. Agama lah yang dapat dijadikan acuan atau pegangan hidup masyarakat untuk tujuan di dunia dan di akhirat. Peran agama yang dijelaskan dalam wawancaranya dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Agama sebagai Penggerak

Agama islam diharapkan memiliki kontrol dengan posisinya yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat islam. Agama sebagai unsur keyakinan menjadi lebih nyata apabila memberikan kehidupan bagi seluruh manusia. Peran agama sangatlah besar didalam kehidupan manusia, sebab agama adalah sistem kepercayaan, sebagaimana kepercayaan tersebut dibangun oleh penganutnya. Bahkan didalam kehidupan manusia apabila ingin selamat dan bahagia di dunia maupun diakhirat harus bertumpu pada kaidan atau aturan agama tersebut. Hal ini menjadi kan agama sebagai penggerak didalam kehidupan manusia. Agama sebagai penggerak untuk mengontrol individu maupun kelompok dalam segala aktivitasnya.

Agama sebagai penggerak menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki kesamaan dengan Muhammad Zaini dalam Jurnal “Kontribusi Agama sebagai Kemajuan Sosial” yang membahas agama sebagai sistem keyakinan dapat emnjadi bagian dari sistem yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan dan agama menjadi pendorong atau penggerak bagi tindakan para agnggota masyarakat tersebut agar tetap sesuai dengan nilai kebudayaan dan ajaran agamanya. Dengan demikian agama berfungsi membakukan nilai budaya yang ada di masyarakat yang bersangkutan (Zaini, 2016: 10)

2. Agama sebagai Pengendali

Agama islam diharapkan dapat memberikan tuntunan atau bimbingan di kehidupan manusia agar manusia memiliki suatu sikap yang tenang, damai. Tenang dan damai itulah yang dapat menjauhkan manusia dari segala sikap yang buruk. Sikap manusia yang buruk itu dalam agama secara tidak langsung dapat merusak batin manusia. Pengendali ini adalah kontrol diri. Kontrol diri sama dengan pengendalian menghadapi hawa nafsu, emosi, dan hal lain yang nantinya berdampak buruk.

Agama sebagai pengendali menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki kesamaan dengan Khaeron Sirin dalam Jurnal “Pembinaan Mental Agama dalam Membentuk Perilaku Prososial” yang membahas pembinaan mental agama merujuk pada pikiran atau akal. Jika dihubungkan dengan agama maka agama menjadi pengendali moral bagi seseorang dalam pembinaan kepribadiannya. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan mental agama adalah suatu usaha berupa kegiatan dalam memberikan bimbingan atau bantuan tentang agama islam kepada seseorang atau kelompok untuk membentuk dan memelihara kondisi mental spiritual dengan kesadaran mampu mengamalkan ajaran agama islam sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang diterapkan oleh Allah SWT (K. Sirin, 201: 223)

3. Agama sebagai penolong

Agama islam diharapkan menjadi penolong. Doa yang terucap setiap waktu dapat menolong ketika manusia sudah wafat.

Berdoa agar selalu dimudahkan dalam segala urusan dan segala kebutuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda “Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, Dan, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah.” (HR. Ahmad)

Sebagai Muslim, kita harus terus melibatkan Allah dalam semua hal. Kita membutuhkan pertolongan Allah dan Allah-lah tempat yang tepat untuk kita meminta dan bernaung saat menderita.

Agama sebagai penolong menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki kesamaan dengan Freud dalam Jurnal bahwa agama adalah sebagai tempat pelarian dari kelemahan manusia. Manusia memiliki banyak kelemahan dan dengan menyelesaikan problematika hidup manusia melibatkan tuhan untuk menghadapi kesukaran tersebut (Shodiq dan Azka, 2021:48)

Negara menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah memiliki kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama dengan menetapkan cara dan batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu maupun golongan atau asosiasi, ataupun juga oleh negara sendiri (Dede Rosyada, 2000: 31-33)

Menurut Miriam Budihardjo, tatanan yang melekatkan ruang gerak negara dalam lingkup sempit didorong oleh keinginan untuk

menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif dengan cara membatasi kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi (Miriam Budihardjo, 2008) dalam hal ini, konstitusi itu sendiri menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif dapat diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga hukum lalu muncul ide konstitusionalisme. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Dalam suatu negara, tiap individu ingin meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan hal ini negara hadir untuk menjamin hak hak politik bahkan menjamin kesejahteraan mereka melalui fungsi dan tujuan negara tersebut”
(Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki sebuah payung konstitusi yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan diatur didalamnya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara Konstitusi yang berbentuk republik kesatuan (Hanif, 2007: 100).

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai payung konstitusi tersebut untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang dapat melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana dan

berkelanjutan. Dan memuat norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah ada didalam diri masyarakat.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Perkembangan di masa klasik, negara sudah diorientasikan pada ketuhanan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa negara merupakan suatu entitas yang bersinggungan langsung dengan agama. Al mawardi dan Ibnu Khaldun mengkonsepsikan definisi negara sebagai misi berlanjut yang dilakukan nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Hal ini diperkuat dengan pendapat KH Ahmad Haris Shodaqoh bahwa :

“Negara ditinjau dari tujuannya yakni mampu mewujudkan cita-citanya untuk melindungi seluruh masyarakatnya dengan sistem hukum yang berlaku dan masyarakat harus tunduk untuk kehidupan bersama” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

KH Ahmad Haris berpendapat negara yang baik dapat berjalan diatas sistem yang tidak bertentangan dengan nilai nilai atau ajaran islam karena pemahaman masyarakat mengenai negara tidak lagi dalam belenggu negara islam , masyarakat sekarang lebih kepada bagaimana negara dapat mencerminkan prinsip atau tujuannya untuk mengatur kebebasan masyarakatnya dalam memeluk agama.

Islam sebagai agama juga tidak menentukan sistem pemerintahan bagi kaum muslim. Karena islam secara eksplisit tidak menyebutkan adanya negara islam tetapi pada dasarnya bahwa nilai-nilai hidup bermasyarakat, nilai keadilan, maupun nilai politik

lainnya tertuang dalam Al-Quran sebagai pedoman umat muslim. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang ada di negara Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan ajaran pada agama Islam. Karena pada dasarnya negara, telah mengintegrasikan ajaran Islam.

Ibnul Khaldun juga mengutarakan pendapatnya yakni, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Proses berdirinya suatu negara memerlukan kerja perjuangan yang sungguh-sungguh bahkan mempertaruhkan hidup atau mati. Rasa solidaritas yang tercermin dalam masing-masing individu adalah untuk kepentingan kelompok bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga menurut Ibnu Khaldun adalah suatu gejala yang alami bagi manusia (A. Rahman, 1992: 160).

Seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Agama yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai agama dapat menghindarkan manusia dari banyaknya resiko-resiko yang terjadi didalam negara seperti perpecahan. Nah peran agama kepada itu sangat positif sekali. Dan pasti akan menuju ke kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula masyarakat dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah itu tadi. Maka dari itu menurut saya agama dan negara harus sama-sama diperjuangkan. Mengapa? Karena ada misi atau tujuan yang selalu menuju kebaikan dan kebenaran.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Negara itu sendiri bisa dikatakan negara yang baik yang dijalankan berdasar konstitusi dan hukum apabila diarahkan untuk

kepentingan umum dan sebaliknya negara bisa dikatakan buruk atau tidak berjalan sesuai konstitusi apabila selalu diarahkan kepada penguasa saja. Sebagaimana dikutip dalam wawancara, KH Ahmad Haris Shodaqoh berpandangan bahwa negara yang baik adalah negara yang berlandaskan atas hukum, norma, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini akan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dan dalam memerintah suatu negara harus memiliki pikiran yang baik tidak boleh kita berfikir yang buruk. Hancur pasti negara itu, maka bisa dikatakan negara yang sempurna apabila pemimpin negara memiliki sikap keadilan untuk seluruh warganya dan warganya dengan rasa senang dan terjamin akan ikut andil dalam segala urusan untuk penyelenggaraan negara.

Lebih jauh lagi, Magnis Suseno berpendapat ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara yang diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dari segi politik : (1) Kepastian hukum, (2) Tuntutan perlakuan sama, (3) Legitimasi Demokratis dan (4) Tuntutan akal budi (Magnis Suseno,1999). Kemudian dari Ilmu Politik, Magnis suseno mengambil empat ciri negara hukum yang secara etis dan relevan, (1) kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan (3) berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia (4) menurut pembagian kekuasaan (Frans Magnis, 1999: 295-298).

Jika diperjelas kembali bahwa negara adalah suatu tatanan atau organisasi yang berlandaskan pada konstitusi untuk mencapai tujuan-tujuan dari kehidupan bersama yang setiap warga negara memiliki hak yang sama, perlakuan yang sama agar tidak menimbulkan perpecahan. Dan negara juga memiliki payung konstitusi yang menjamin terhadap kebebasan dalam beragama. Maka dari itu hubungan agama dan negara dapat bersifat harmonis. Pada titik ini, penulis menggaris bawahi bahwa negara Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya diatur oleh seorang kepala negara dimana untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan konstitusi untuk mencapai tujuan kebenaran.

Hubungan Agama dan Negara Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Agama adalah dimensi dari perilaku sosial manusia yang dapat dilihat oleh masyarakat sebagai ukuran hidup berdampingan dengan sesama manusia, agama juga terkadang berfungsi sebagai penyeimbang kehidupan manusia dikala manusia keluar dari kehidupan, jadi tanpa adanya agama manusia dapat melakukan hal yang tidak sepatasnya dilakukan. Agama itu lahir berdasarkan keyakinan yang didalamnya terdapat aturan atau hukum untuk hidup bersama-sama. Dengan demikian, hak untuk memeluk agama atau keyakinan tersebut harus dilindungi baik, oleh individu, masyarakat, maupun negara. Hak untuk memeluk agama atau keyakinan bagi warga negara Indonesia, tertuang dalam UUD 1945 BAB XI Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kemudian terjadi perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000 yang diatur dalam BAB XA Pasal 28E ayat (1), juga menyatakan bahwa:

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
(Harun, 2004: 106)

Hal ini menjadikan sebuah konsekuensi dari ayat sebelumnya yakni ayat (1) yang menyebutkan

“Negara berdasar atas Ketuhanan yang maha Esa”

Kedudukan agama menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/pnps/Tahun 1965 menjelaskan bahwa umumnya agama yang dianut masyarakat Indonesia dan mendapat perlindungan hukum adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Penjelasan pasal ini tidak tertutup kemungkinan agama atau aliran lain juga diberikan perlindungan oleh negara sepanjang tunduk pada ketentuan dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Komaruddin Hidayat berpendapat bahwa secara historis, hubungan agama dan negara selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena agama dan negara memiliki tekanan yang berbeda. Agama menekankan keimanan, aspek ritual, dan moralitas, sedangkan wilayah negara memiliki aturan tersendiri terutama

berkaitan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara yang dalam praktiknya saling mempengaruhi (Komaruddin Hidayat, 2019: 210)

Sudah banyak diskusi tentang relasi agama dan negara. Per pembahasan tentang relasi agama dan negara tidak pernah surut dari kajian yang dilakukan oleh para teoritis atau pemikir baik itu kalangan muslim maupun barat. Agama menjadi kunci yang mendasar dalam kehidupan umat manusia. Keberadaan agama sudah ada sejak kemunculan manusia itu sendiri. Dahulu kepercayaan yang paling tradisional yaitu animisme, dan dinamisme sampai pada keyakinan yang paling atas yaitu agama. Gagasan pembentukan suatu negara adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar masyarakat dapat hidup aman, dan bahagia. Akan tetapi realitanya, keberadaan negara sebagai realitas sosial yang ada tidak bisa ditolak keberadaannya karena memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Disatu sisi dapat membahagiakan dan di satu sisi dapat menyengsarakan (Rumadi, 2012: 29). Hal ini dapat kita lihat juga dengan agama, agama memiliki tujuan yang mulia, akan tetapi juga masih terdapat konflik antara pemeluk agama. Konflik tersebut semakin memanas dan selalu menjadi masalah yang serius antar pemeluk agama.

Dalam masalah ini negara sebagai konstitusi yang formal harus melakukan intervensi terhadap warganya untuk mengatur bagaimana masyarakatnya beragama. Realitas kemasyarakatan ini yang bisa melahirkan sebuah masalah baru, yaitu relasi agama dan

negara. Dimana titik permasalahannya adalah bagaimana relasi agama dan negara dapat diatur (Rumadi,2012: 29)

Uraian diatas dipertegas dengan wawancara saya dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh

“Relasi agama dan negara dan dilihat dari sudut pandang mana saja. Negara dapat mengatur masyarakatnya melalui agama. Dan agama pula yang dapat mengatur masyarakat dalam bernegara. Dapat dipahami bahwa relasi agama dan negara sangat bermacam-macam. Kita tidak dapat menyamakan satu negara dengan negara lain dan agama satu dengan lain. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi bagaimana kekurangan itu dapat ditutup dengan banyaknya kelebihan yang ada. Seperti contoh negara Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Karena di indonesia terdapat agama lain tidak hanya islam saja.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

KH Ahmad Haris Shodaqoh adalah seorang kiai sekaligus pengasuh dari Pondok Pesnatren Al Itqon Bugen Semarang. Beliau memiliki latar belakang islam nasionalis, sehingga beliau dapat beradaptasi dengan politik. Dalam wawancara saya dengan KH. Ahmad Hari Shodaqoh, beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD fraksi PPP pada tahun 1992-2000. Mungkin ini adalah salah satu alasan beliau dapat menyesuaikan dirinya dengan politik. Menurutnya relasi agama dengan negara sama dengan kiai dan negara.

Seperti pendapat KH. Ahmad Haris Shodaqoh bahwa:

“Kiai dan politik itu sangat kental dan berhubungan. kiai bisa saja mendekati pemerintah, tetapi pada misi seorang kiai

adalah membenarkan dan biasa disebut dengan Amar Maruf Nahi Munkar, agar pemerintah tidak salah dalam mengambil arah jalan. Dan saat seorang kiai mencebur didalamnya sangat dapat terjadi didalam agama mengajarkan politik. Agama dan politik itu menurut saya tidak boleh bertentangan, walaupun bertentangan adalah dari pihak atau personalnya saja. Tetapi terkadang setiap orang yang tiak memakani faedah atau kaidah agama maka orang tersebut dapat mengalami benturan. Menurut saya atara pemerintah dan kiai memiliki fungsinya sendiri. Kiai adalah orang yang memiliki fungsi membenarkan, sedangkan mereka yang tidak memiliki motivasi agama biasanya terjadi banyak perbedaan. Dan kiai dan agama adalah dua elemen yang positif.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Pada penjelasan beliau terlihat bahwa terdapat relasi anantara negara dan agama yang diibaratkan dengan kiai dan negara. Kiai membawa pengaruh positif di kalangan masyarakat. Tugas dari kiai yaitu menegakkan keadilan, moralitas dan keagamaan bukan sebaliknya yakni menyebabkan kesenjangan atau perbedaan atau mengakibatkan terpecah belah. Dukungan kiai untuk negara seperti contoh adalah kegiatan doa bersama untuk pemenangan calon anggota dewan. Doa bersama yang dipimpin oleh seorang kiai menunjukkan bagwa kiai yang membawa pengaruh kuat tentang agama sangat besar dalam kegiatannya untuk negara. Dalam hal ini untuk meraup masyarakat ikut andil dalam kegiatan tersebut adalah cara meraih kemeangan untuk berkuasa dengan cara menggunakan agama.

Seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Banyak para calon anggota dewan yang sowan dan meminta doa untuk kemenangannya kepada kiai. Yang jelas kiai hanya bisa memberikan doa karena dengan cara itu diharapkan para calon anggota dewan dapat melakukan tugasnya seperti apa yang diharapkan masyarakat.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam wawancaranya

“Relasi agama dan negara memiliki hubungan mutualistik, yaitu memiliki hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya, agama juga membutuhkan negara. Dengan melalui negara, agama dapat berkembang dengan baik. Bahkan hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan yang tegakkan oleh suatu negara. Sebaliknya dengan negara, negara juga membutuhkan kehadiran agama. Dengan agama negara dapat berjalan dengan baik. Dan dengan agama pula dapat mengatur masyarakatnya mengikuti dengan kaidah atau norma yang ada dalam suatu negara tersebut. Selain hubungan mutualistik relasi agama dan negara bisa saling mengontrol satu sama lain. Dengan adanya agama sebagai acuan dapat mengontrol aparatur agar tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada. Nah dalam hal agama dapat dicontohkan yaitu seorang kiai, kiai yang memiliki posisi yang strategis tidak bisa berjalan apabila negara tidak mengontrol kiai tersebut. Dalam hal ini sangat jelas bahwa hubungan atau relasi agama dan negara yaitu saling membutuhkan satu sama lain dan saling mengontrol satu sama lain. Tidak liupa dengan tujuannya baik agama maupun negara yaitu untuk kehidupan yang lebih baik.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Paradigma ini memandang bahwa negara menurut kelompok ini memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu agama sendiri memerlukan negawa

untuk melestarikan eksistensinya sebagai penolong di dalam negara. Corak teologi politik dari kelompok ini memandang bahwa relasi agama dan negara didasarkan pada prinsip etis , karena mereka menyatakan tuntutan ataupun indikasi kuat adanya acuan baku tentang sistem politik atau pemerintahann dalam islam sama sekali tidak ditemukan dan terbukti, artinya secara argumentatif tidak ada konsepsi yang berisi ketentuan sumber kekuasaan negara, bagaimana kekuasaan itu didapat bahkan kepada siapa pelaksana bertanggung jawab. Dengan logika ini, mnyatakan bahwa islam sama sekali tidak mewajibkan umatnya untuk menjadikan atau membuat islam sebagai suatu ideologi negara (Abd. Salam,2004: 11)

Keragaman masyarakat di indoneis dimulai ketika semua tunduk dibawah Pancasila sebagai dasar negara dsn Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun saat realisasinya penghargaan terhadap keragaman di indoneia muncul sebelum Pancasila dan Undang-Undang 1945 ditetapkan sebagai falsafah ideologi bangsa dan landasan dalam kehidupan berbnagsa dan bernegara di Indonesia, namun keduudukan suku bangsa yang ada di Indonesia terhadap pancasila membuktikan bahwa betapa umat islam begitu toleran , emnghargai perbedaan , dan mengutamakan keutuhan bangsa dengan urusan yang bersifat pribadi. Kendala dalam mengaktualisasikan kebebasan beragama menjadi hal yang berkaitan dengan ketentuan regulasi suatu negara, yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat sepenuhnya bisa

mengekspresikan agama yang emereka percaya. Agar kebebasan beraga dapat terwujud , membutuhkan upaya dari perubahan regulasi suatu negara (Siti Musdah,2007: 8)

Seperti kutipan wawncara berikut:

“Semua yang lakukan baik itu untuk urusan pribadi ataupun kelompok diatur oleh negara. Respon negara terhadap segala aktifitas masyarakat dapat dilihat dari banyaknya dibentuk lembaga yang mengatur urusan masyarakat, seperti yang kita tahu yakni Kementrian Agama, Peradilan Agama, dan Mahkamah agung. Hal ini menunjukkan masyarakat indonesia tunduk kepada negara maupun kepala negara yang mengaturnya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Pelayanan negara terhadap para pemeluk agama dalam hal peribadatan haruslah adil dantidak meemandang besar atau kecilnya jumlah penganut agama tersebut. Negara harus bisa membina kehidupan beragama warganya tanpa ikut mengatur cara peribadatannya (Mahfud MD,2010). Pada saat yang sama semua warga negara harus menyadari bahwa memeluk agama adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikitpun dan diganggu oleh siapapun.

Negara juga tidak bisa memaksakan agama dan kepercayaannya terhadap tuhan karena hal itu merupakan suatu keyakinan seseorang yang tercermin dalam hati sesorang penganutnya dan tidak dapat dipaksakan oleh siapa pun. Dengan hal ini negara menjamin kemerdekaan setiap warganya memeluk

agama menurut kepercayaannya tersebut. Seperti kutipan wawancara berikut

“Sebenarnya payung hukum tentang kebebasan memeluk agama bagi penganutnya adalah salah satu cara dasar memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat. Ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan negara yang menyangkut masalah keagamaan, setidaknya terdapat payung hukum yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila”

Pemikiran tentang relasi agama dan negara selalu muncul gagasan-gagasan pembaharuan. Dahulu terdapat upaya yang ingin menjadikan indonesia sebagai negara islam. Hal ini tidak dapat dilakukan atau di jalankan karena pada dasarnya negara adalah salah satu kehidupan duniawi yang semesti ya bersifat rasional dan kolektif. Begitu juga dengan agama seperti yang kita tahu adalah aspek spiritual dan bersifat pribadi. Dengan demikian, upaya atau wacana negara indonesia sebagai negara islam hanya sebuah obrolan saja dan tidak boleh di sahkan. Indonesia bukan negara agama sebab negara agama hanya memberlakukan hukum satu agama dalam hukum negara. Dan indonesia juga bukan negara sekuler karena negara sekuler dapat memisahkan urusan negara dengan urusan agama, agama digunakan untuk mengatur kehidupan manusia yang juga dapat berbentuk hukum-hukum. Dan negara indonesia adalah negara nasional yang tidak memberlakukan hukum agama tertentu.

Seperti dalam wawancara berikut

“Negara indonesia tidak boleh didasarkan hanya pada satu agama saja . karena negara indonesia bukan hanya memberlakukan hukum agama saja, tetapi bagaimana seluruh warga negara dapat terjamin menjalankan agamanya. Disinilah pancasila hadir sebagai suatu dasar negara yang dapat memahami masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa , bahkan pancasila bersifat sebagai pemersatu bukan untuk terpecah belah” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Dalam konteks Indonesia , baik dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini hubungan atau relasi antara agama dan negara tetap dalam bentuk hubungan persinggungan antara agama dan negara. Hal ini berarti hubungan antara agama dengan negara tidak sepenuhnya dapat terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya dapat dipisahkan, sering dikatakan bahwa indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama tertentu, tetapi negara indonesia adalah negara demokrasi yang tetap akan menghargai keberadaan agama dan negara. Negara indonesia adalah negara yang secara lembaga berbentuk sekuler tetapi secara filosofis tetap mengakui agama dalam kehidupan bernegara. Bahkan agama sebagai dasar negara secara eksplisit disebutkan dalam pasal 29 ayat 1, yakni *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Pengakuan tentang eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentudalam negara serta adopsi

nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik. Dalam kutipan wawancara berikut

“Negara juga mengakui eksistensi adanya partai-partai politik dan organisasi yang hadir di masyarakat yang berbasis agama. Hanya saja, terdapat banyak perkembangan yang menarik dalam orientasinya. Untuk itu dalam sebuah negara yang emmeiliki masyarakat yang majemuk tidk lah mudah untuk mewujudkan perstuan dan kesatan karna masing masing masyarakat atau individu memiliki kepentingan dan aspirasi mereka sendiri, maka dari itu negara harus dapat meredam konflik yang bisa saja dilatar belakangi oleh agama karena dapat mengganggu kedamaian dalam kehidupan bangsa dan negara bahkan fatalnya lagi dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebhinekaan.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Dalam konteks penguatan nilai-nilai atau norma yang berkembang, memunculkan bahwa agama semestinya menjadi pemersatu bukan pemecah belah negara itu sendiri. Dan fungsi atau nilai agama dan pancasila menjadi modal untuk mengintegrasikan bangsa. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang toleran terhadap sesama pasti harus memephatikan sikap dan watak yang psoitif pula.

Menurut KH Ahmad Haris Shodaqoh dalam wawncaranya:

“Pondasi dasar masyarakat politik haruslah bersifat religius. Agama adalah komponen yang paling vital dalam kehidupan, tanpa adanya agama menurut saya negara akan dihancurkan oleh agama itu sendiri” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Melihat fakta saat ini , banyak persoalan yang harus diurai lebih jauh mengenai islam dan demokrasi, negara indonesia masih memiliki banyak problem kenegaraan hal ini bukanlah masalah yang serius karna negara itu sendiri memiliki dasar negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Pembahasan relasi atau hubungan agama dan negara pasti terdapat kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kekurangan negara dapat ditutup oleh negara dan kelemahan negara itu pula dittutupi oleh negara. Agama dan negara sama sama aktif untuk memerangi musuh kemanusiaan dan sama-sama memperjuangkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dalam kutipan wawancara berikut dipertegas mengenai kekurangan dan kelebihan relasi agama dan negara:

“Antara agama dan negara memiliki sifat sama-sama mengisi jiwa atau pikiran masyarakat. Hal buruk yang ada didalam negara pasti juga akan membawa pengaruh buruk didalam agama. Maka dari itu sifat baik yang harus dikembangkan dalam suatu negara harus dikembangkan juga dalam agama karena agama dan negara menurut saya saling mendukung satu sama lain. Memandu untuk sama sama saling mengontrol, saling menjaga. Kita tidak bisa menitik beratkan pada satu pilihan saja. Entah itu lebih condong ke agama atau condong ke negara. Kita harus berjalan beringingan tidak memberatkan di satu titik. Negara juga tidak boleh mengonrol ketat agama, karna agama dikawatirkan dijadikan target atau sasaran kebijakan. Idealnya agama dan negara harus saling mengontrol dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan. Saya yakin dengan adanya pancasila dan Undang-undang dasar 1945 relasi aagama dan negara dapat berjalan dengan semestinya dan cita-cita bangsa dapat dicapai.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Berdasarkan data analisis, apabila disinkronkan dengan teori relasi agama dan negara , maka penulis berpandangan bahwa teori relasi agama dan negara sudah mampu menjawab persoalan yang penulis teliti. Jadi sebenarnya teori relasi agama dan negara yang dikemukakan oleh para pemikir terdahulu sudah relevan dengan jawaban atau fakta yang dikemukakan oleh kiai yang notabene pernah terjun kedalam dunia politik.

Dan paradigma pemikir terdahulu yang terbagi menjadi 3 paradigma dalam hal ini relasi agama dan negara lebih condong kepada paradigma simbiotik mutualistik karena agama dan negara adalah hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya, agama juga membutuhkan negara. Dengan melalui negara, agama dapat berkembang dengan baik. Bahkan hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan yang tegakkan oleh suatu negara. Sebaliknya dengan negara, negara juga membutuhkan kehadiran agama. Dengan agama negara dapat berjalan dengan baik. Dan dengan agama pula dapat mengatur masyarakatnya mengikuti dengan kaidah atau norma yang ada dalam suatu negara tersebut. Jika dibandingkan dengan dua paradigma lain yakni paradigma integralistik dengan paradigma sekuleristik menurutnya tidak dapat menyatu karena paradigma integralistik didasarkan pada kedaulatan ilahi, atau dengan kata lain yakni paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat islam dalam corak negara teokratis , biasanya dengan islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan corak kepemimpinannya

cenderung lebih bersifat terbatas dan tertutup. Paradigma ini biasa dianut oleh kelompok syiah yang memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan memiliki fungsi keagamaan. Jika dibandingkan dengan paradigma sekularistik juga tidak dapat menyatu sebab paradigma sekuleristik paradigma ini berusaha memisahkan antara agama dan negara. Paradigma ini menjelaskan bahwa agama dan negara adalah 2 hal atau bentuk yang berbeda, bahkan satu sma lain memiliki fungsi nya masing-masing sehingga keberadaannya harus dipisahkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Maka dari itu paradigma mutualistik sudah dapat menggambarkan relasi hubungan agama dan negara saat ini karena saling membutuhkan dan memiliki hubungan timbal balik.

B. Pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait Politik Kebangsaan

Hubungan antara ulama dan politik adalah kajian yang sangat unik dan menjadi pembahasan yang tiada henti. Bahkan saat ini banyak berkembang dalam berbagai studi ilmu pengetahuan agama, fiqh, ilmu pemerintahan, sosiologi dan yang terakhir yakni ilmu poitik. Hal ini dikarenakan keterlibatan seorang kiai dalam kancah perpolitikan di negara yang mayoritas penduduknya menganut agama islam dan kehadiran sosok kiai mempunyai pengaruh yang cukup besar pula. Hubungan atau relasi ulama dan politik adalah hal yang bersifat wajar, karena dalam Islam tidak mengenal adanya pembatasan agama dnegan politik. Dengan kata

lain, tidak ada institusi khusus dalam islam yang hanya membahas masalah politik saja.

Padaha jaman dahulu kiai hanya mengkhususkan dirinya pada subjek keagamaan saja, namun pada era modern seperti sekarang kiai sudah mulai merambah ke ranah politik di masyarakat. Hal ini karena kiai memiliki ciri kharismatik sehingga memiliki nilai lebih dimata masyarakat., maka tidak heran kiai sebagai sumber jawaban atas segala pertanyaan di mata masyarakat.

Melalui berbagai perannya baik itu dalam bidang keagamaan dan bisang sosio kultur, sosok kiai tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat. Dan ditinjau dari segi ilmu politik, ulama merupakan aktor politik yang memiliki sumber daya politik berbasis kharismatik yang membawa ulama tersebut membentuk sikap aytau karakter tertentu dalam struktur sosial masyarakat sekitar (Wasisto, Raharjo Jati, 2016)

Seperti kutipan pada wawancara:

“Saat ini ulama tidak hanya berkaitan dengan ilmu ilmu agama, melainkan sudah banyak mempelajari tentang sosial masyarakat, ulama juga diminta pandangannya mengenai masalah-maslah yang ada dan terjadi di sekitar masyarakat. Demgan hal demikian, kiai dipandang memiliki nilai kharismatik dimata masyarakat. Bahkan politik atau pemerintahan pun sudah mulai menyoroti ulama untuk terjun ke dalam dunia politik.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Dalam hal ini kiai mampu mentransformasikan nilai ajaran islam dengan nilai nilai politik atau kebangsaan. Bahkan peran kiai dalam proses politik jugam memiliki kedudukan yang strategis dan sangat berpengaruh. Seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Kiai dan politik itu sangat kental dan berhubungan. kiai bisa saja mendekati pemerintah, tetapi pada misi seorang kiai adalah membenarkan dan biasa disebut dengan Amar Maruf Nahi Munkar, agar pemerintah tidak salah dalam mengambil arah jalan. Dan saat seorang kiai mencebur didalamnya sangat dapat terjadi didalam agama mengajarkan politik. Agama dan politik itu menurut saya tidak boleh bertentangan, walaupun bertentangan adalah dari pihak atau personalnya saja. Tetapi terkadang setiap orang yang tiak memakani faedah atau kaidah agama maka orang tersebut dapat mengalami benturan. Menurut saya atara pemerintah dan kiai memiliki fungsinya sendiri. Kiai adalah orang yang memiliki fungsi membenarkan, sedangkan mereka yang tidak memiliki motivasi agama biasanya terjadi banyak perbedaan. Dan kiai dan agama adalah dua elemen yang positif.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Terlihat jelas bahwa kiai dan politik itu adalah dua elemen yang saling berhubungan. Kiai sebagai benteng moralitas , memiliki integritas tinggi kepada agama mengharuskan terjun kedalam politik untuk membenarkan yang salah.

Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan kendali atas pembuatan keputusan publik didalam masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu, dimana kendali tersebut disokong melalui instrumen yang bersifat otoritatif (Almond dalam seta:3). Hal ini senada dengan pandangan KH. Ahmad Haris Shodaqoh mengenai politik,

menurutnya politik itu menyatu dengan kita. Mengapa bisa dikatakan politik, karena politik itu perangkat sarana atau prasarana untuk meraih satu jabatan atau sebuah kekuasaan yang memiliki arah positif dan kekuasaan tersebut untuk mengatur rakyat atau masyarakat dengan nilai adil, jujur bahkan nilai-nilai baik lainnya. Dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa orientasi kiai terjun kedalam dunia politik maka akan berdampak positif. (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Dalam konteks politik sendiri, menurut KH Ahmad Haris Shodaqoh,

“Seorang kiai dapat diukur dengan cara melihat gagal maupun berhasilnya seorang kiai dalam membawa dirinya, kiai bisa saja mengikuti arus, dan menurut saya pemerintah itu politik ansih atau kekuasaan ansih. Politik ansih itu sendiri bukan selalu kekuasaan saja. Dan hadirnya sosok kiai adalah sebagaimana tugasnya yakni membenarkan aplikasi mereka, terhadap kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan agama. Kiai juga sudah tidak tabu lagi jika dirinya menceburkan dirinya didalam dunia politik. Politik yang dimaksud dari kiai itu sendiri adalah politik dengan konsep kebangsaan, politik untuk semua bangsa, kedamaian, kesejahteraan, kebangsaan. Maka para pelaku politik mestinya harus orang yang terpilih dan baik, sebab pelaku politik tersebut akan membawa bangsa ini ke arah tujuan tertentu seperti kesejahteraan.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Selanjutnya politik kebangsaan menurut pandangan beliau adalah politik yang tidak sempit jangkauannya. Politik yang untuk semua bangsa, untuk kedamaian. Bangsa itu meliputi siapa saja

yang menjadi pendukungnya. Kita terkadang terjebak dalam politik yang parsial atau politik yang berkelompok-kelompok. Itu biasanya orang yang sudah memasuki dunia politik praktis, tapi menurut saya kiai tidak seperti itu, kiai mengharapkan semua bangsa bisa terjamin kesejahteraannya, keamanannya, kesehatannya dan seterusnya yang menjadi kepentingan bangsa itu tadi.

Definisi kebangsaan adalah identitas dalam hal bangsa ataupun cara memandang suatu bangsa (Badudu-zain, 2001: 122: 1624). Kebangsaan sendiri sebenarnya sudah ada dalam diri kita, sebab kebangsaan sudah melekat dan tertanam kepada setiap warga negara dan terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siswono juga berpendapat bahwa, semangat dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuh kembangkan, karena, rasa kebangsaan itu sebagai salah satu rasa cinta kita kepada tanah air, yang pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan mahalnya nilai rasa kesatuan dan kesatuan bangsa (Adi S, 1996 :17).

Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Politik kebangsaan adalah politik yang orientasinya adalah bangsa. Jadi, tidak untuk kepentingan tertentu baik itu partai politik maupun organisasi tertentu. Lintasnya dalam hal lebih luas bagi saya, lebih sulit karena merangkul semua partai, merangkul semua organisasi, sebab partai dan organisasi memiliki kepentingan sendiri, kepentingan yang sifatnya pribadi, kalau kebangsaan tidak seperti itu, kebangsaan yang sifatnya pribadi, yang tujuannya untuk pribadi ditiadakan terlebih dahulu. Intinya untuk bangsa dahulu.” (Wawancara Gus Basro Jamhar anak KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Dalam suatu sistem politik, budaya politik dipengaruhi oleh aktor atau pelaku yang menjalankan sistem politin tersebut. Pelaku politik itulah yang menentukan jalan atau tidaknya sistem politik. Sehingga, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan budaya pada sistem politik tersebut.

Lebih lanjut dengan dengan pandangan KH Ahmad Haris Shodaqoh mengenai pelaku politik, *“menurutnya pelaku politik juga haruslah orang yang terpilih atau orang yang baik. Karena mereka akan membawa bangsa ini menuju kepada tujuan bangsa itu tadi , kesejahteraan. Kebangsaan itu kalau dilokalisir akan menjadi masalah tersendiri. Tapi sebenarnya adalah masalah kita semua yang tujuan nya sama, jadi kalau kita berbicara tentang kebangsaan secara khusus atau secara garis. Kebangsaan itu mestinya kita harus memahami semua kehendak bangsa ini, keinginan bangsa ini, orang-orang harus diapahmi. Kemudian keinginan dan aspirasi mereka harus bisa tersalurkan. Karna bangsa ini butuh demokratisasi yang harus terjamin semuanya. Wawasan kebangsaan seperti ini kita tanamkan kepada masyarakat, maka seorang kiai tidak boleh memisahkan diri dengan masyarakatnya, karena kiai adalah sebagian dari masyarakat.nah untuk misinya adalah untuk kebaikan dan arahnya yang dikerjakan harus menuju ke positif yang diridhoi oleh Allah SWT dan disenangi masyarakatnya.”* (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Lebih lanjut dengan langkah-langkah politik kebangsaan menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh,

Politik itu sesuai dengan porsinya, tentu kiai tidak seperti walikota atau lurah atau camat, karna segmennya berbeda, tetapi kalau semuanya punya tujuan sama untuk kesejahteraan bangsa akan ketemu dalam satu jalan atau ketemu dalam satu titik karna tujuan kita semua mensejahterakan bangsa. Dan menurut saya alur atau langkahnya dapat berbeda-beda.

Karena orang itu sejahtera tidak hanya materi saja”
(Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Berdasarkan data analisis, apabila disinkronkan dengan konsep politik kebangsaan, penulis berpandangan bahwa konsep kebangsaan itu memiliki tujuan satu yaitu bangsa. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi karena pada intinya tujuan dari politik kebangsaan itu ialah mensejahterakan bangsa.

BAB V

PERAN KH. AHMAD HARIS SHODAQOH DALAM POLITIK KEBANGSAAN

A. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam Kancanah Perpolitikan

Kyai dan politik adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Sejak zaman kemerdekaan kyai memang sudah berkaitan erat dengan politik dengan cara ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Relasi antara kyai dan politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dalam lingkup lokal. Peran kyai dalam politik memiliki peran yang berbeda-beda seperti pemain inti (sebagai politisi), sebagai pendukung (menjadi tim sukses), atau hanya sebagai guru spiritual yang selalu memberikan doa dan restu).

Dalam perpolitikan di Indonesia, kyai tidak hanya sebagai ahli agama tetapi juga sebagai sosok yang memiliki banyak pengikut jamaah yang kerap kali segala perilaku dan semua tindakannya ditiru oleh umatnya atau jamaahnya tersebut. Kyai dalam pandangan masyarakat Indonesia bukan hanya figur biasa di tengah-tengah masyarakat, tetapi lebih dari itu sosok kyai dipandang sebagai wakil Tuhan yang semua perilakunya serba benar dan harus diikuti. Inilah yang menjadi daya tarik ulama sehingga mereka dibidik dan dijadikan komoditas politik (Akbar Faqih, 2017: 42).

Figur kyai sebagai tokoh agamais yang paham ilmu agama dianggap sebagai penjaga moral dan akhlak yang pada umumnya memiliki basis pesantren, sekolah-sekolah islam dan pengikut yang tersebar di berbagai wilayah. Dua hal ini lah yang emnajdi faktor pendukung mengapa sosok kyai selalu memiliki daya tarik politik baik hanya direkrut sebagai anggota partai maupun terjun sebagai tim sukses dalam pemilukada dan pemilu.

Terdapat argumen menagpa kyai terjun kedalam politik praktis. Yang pertama, dianggap sebagai panggilan dakwah bagi mereka. Sebagian kyai berpandangan bahwa menjadi kyai tradisional saja tidak cukup karena itu mereka harus terjua dlam lingkup yang lebih luas salah satunya yakni politik. Kyai menjadikan ranah politik sebagai medan dakwah yang lebi luas karena untuk menyamoaikan hal kebaikan. Kyai juga berharap bahwa kebaikan dan nilai yang didapatkan dapat diimplementasikan dalam konteks politik. Seperti dalam kutipan wawancara sebgai berikut:

“Politik itu adalah perangkat sarana dan prasarana meraih satu jabatan atau kekuasaan yang memiliki arah yang positif. Dan dengan kekuasaan tersebut sapat mengatur rakyat atau masyarakat dengan adil, jujur dan nilai-nilai yang baik. Politik itu juga menyatu dengan kita” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 juni 2021)

Dalam hal ini politik dan kiai memiliki hubungan keterkaitan apabila kyai tersebut dapat mengatur rakyatnya dengan nilai-nilai yang baik

Hal ini diperkuat dengan pendapat beliau sebagai berikut:

“Dalam konteks politik sendiri kekuatan moral kyai akan diukur, bisa ada yang gagal, bisa saja mengikuti arus. Dengan adanya kyai sebagai membenarkan aplikasi mereka, terhadap kebijakan yang bertentangan dengan agama. Kyai sudah tidak asing lagi menceburkan dirinya dalam dunia politik, tetapi tetap politik dengan konsep kebangsaan. Politik untuk semua bangsa, kedamaian, kesejahteraan, kebangsaan. Para pelaku politik akan membawa bangsa ini kepada tujuan tertentu seperti kesejahteraan rakyatnya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Selain menjadi figur agama kyai juga memiliki kepentingan dalam banyak hal baik dibidang lain yakni sosial, ekonomi, maupun politik. Di era sekarang banyak kyai yang terlibat dalam dunia politik baik langsung maupun tak langsung. Dan keterlibatan kyai dalam politik praktis bukan fenomena yang baru. Secara normatif keterlibatan kyai dalam dunia politik mendapat dasar hukum yang kuat dari syaria’at. Secara empiris keterlibatan kyai sebagai tokoh politik telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan keterlibatan kyai dalam politik harus dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Politik praktis atau politik tingkat tinggi dalam hal politik kyai sendiri, kyai tidak memiliki teritorial, sedangkan kyai dan politik itu kental, bisa saja mendekati pemerintah, tetapi misinya membenarkan yang biasa disebut amar maruf nahi munkar, agar pemerintah juga tidak salah. Agama dan politik juga tidak bertentangan.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Mengenai pernyataan diatas terlihat bahwa seorang kyai sudah memiliki pedoman agama yakni Amar Maruf Nahi Munkar untuk masuk kedalam lingkup politik yakni bertujuan untuk membenarkan pemerintah.

Hal tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan KH. Ahmad Haris Shodaqoh pada periode 1993-2000 beliau menduudki kursi DPRD Kota Semarang Fraksi Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dalam wawancara dengan KH Ahmad Haris Shodaqoh bhawa:

“Kyai dalam konteks politik kebangsaan, ketika menjabat sebagai anggota DPRD Fraksi PPP yakni masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Semua keputusan atau kebijakan disesuaikan dengan visi dan misi kita sebagai kebenaran, keadilan. Wawasan ulama dengan kebangsaan itu tidak dapat dipisahkan, karena bangsa dan masyarakat adalah bagian dari kyai itu sendiri. Dan kyai memiliki kewajiban bagaimana mengatur bangsa dan masyarakat agar tidak myimpang dengan nilai-nilai agama.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Jika disinkronkan dengan meleteakkan konsep amar maruf nahi munkar seperti yang beliau katakan sebelumnya maka kyai jika mengambil peranan agar tidak melenceng atau menyimpang. Karna itu lah peran kyai akan lebih besar jika masuk kedalam politik praktis yang sellau menerapkan konsep amar maruf nahi munkar.

Adapun Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Anggota DPRD Fraksi PPP dari hasil penelitian yakni:

KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai pengasuh pondok pesantren al itqon Bugen Tlogosari wetan Pedurungan semarang. Pada tahun 1993 hingga tahun 2000 beliau dipercaya menduduki posisi sebagai anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PPP. Peran politik KH Ahmad Haris shodaqoh yakni peran politik aktif dan beliau sebagai ketua Komisi E. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Saya sebagai ketua komisi E. dimana ada beberapa bidang harus saya tangani, seperti keolahragaan, kesehatan, buruh, termasuk juga panti asuhan dan sebenarnya yang berkaitan dengan masyarakat atau pun masalah kesejahteraan.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk (<https://dprd.jatengprov.go.id> diakses pada 4 Juni 2022).

Seperti kutipan wawancara berikut:

“Segala kebijakan ya itu saya perjuangkan, bagaimana masyarakat kota semarang dalam hal tertentu, soal kesehatan bagaimana masyarakatnya bisa sehat, soal pekerjaan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya dengan sesuai, dan dalam bidang olahraga bagaimana dapat berprestasi.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

“Masalah yang terpenting itu adalah masyarakat. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial nya. Itu yang terus menjadi masalah. Dan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan itu tidak mudah dan harus dilakukan

secara bertahap” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Salah satu masalah yang beliau hadapi ketika menjabat sebagai anggota DPRD yakni kesejahteraan sosial masyarakat dimana sekitar tahun 1997-1998 Indonesia menagalami krisis moneter yang ditandai dengan melemahnya ekonomi di indonesia dan berpengaruh juga terhadap Kota Semarang. Tidak cuma itu saja permasalahan musim kemarau yang panjang mengakibatkan harga barang kebutuhan pokokm seperti beras, kedelai, gandum dan buah meningkat drastis. Dan dampak dari krisis moneter sendiri sangat besar terhadap kesejahteraan sosial karena dimana berkurangnya lapangan kerja karena pabrik-pabrik pada tahun itu terpaksa untuk gulung tikar.

Disini nyawa pemerintah menjadi taruhannya. Kebijakan untuk meningkatkan suku bunga sehingga suku bunga dapat naik dan ternyata membenahi sektor perbankan dinilai tidak efisien dan dalam sektor riil juga berdampak karena sektor tersebut sebagai penggerak ekonomi di indonesia

Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Pemerintah benar-benar diuji ketika harus berhadapan dengan kesejahteraan masyarakat karena pada saat itu pemerintah masih banyak kekurangannya dalam menangani masalah seperti itu.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Kesejahteraan sosial masyarakat adalah hal yang cukup serius. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu sebagai pertanggung jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial selalu difikirkan. Sedikit demi sedikit dengan memberikan bantuan, memberikan pelayanan itu sebagai bentuk partisipasi untuk masyarakat.

Seperti halnya di Kota Semarang sendiri, pemerintah Kota Semarang juga merencanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial masyarakat (PMKS) telah dilakukan secara terus menerus agar mencapai hasil yang signifikan. Agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin pada saat itu, dibutuhkan upaya untuk menanggulangi kemiskinan sebab sejak tahun 1997-1998 krisis moneter dan ekonomi sudah melanda Indonesia dan Kota Semarang sendiri. Fenomena ini ditandai dengan masih banyaknya keluarga miskin hingga tahun 2004 sebanyak 59.550 KK dan penyandang masalah sosial 2.294 orang. (RPJMD, 2006-2010)

Program pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan antara lain (JPS, P3EMDN, PPIKM, P4K, PPKM, PPSM, PIK, IDT, P2KP). Upaya penanggulangan dengan program pemerintah tersebut dapat dikatakan berhasil sebab dapat menekan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 1996. Pada

tahun 1997 angka kemiskinan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena krisis moneter dan dengan cepatnya meningkatkan angka kemiskinan di perkotaan.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK, 2003) terdapat kelemahan dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang berjalan di antaranya yaitu:

1. Program Penanggulangan kemiskinan bersifat parsial dan belum terpadu.
2. Belum tersedianya instrumen upaya dalam penanggulangan kemiskinan yang spesifik.
3. Lemahnya birokrasi pemerintah, kecilnya angka peran masyarakat ditandai dengan tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan atau pola dalam menangani kemiskinan yang lebih merujuk kepada upaya masyarakat, pemerintah dan kelompok setempat. Untuk itu perlunya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya di kota Semarang sebagai bentuk upaya menangani masalah kemiskinan yang terjadi pada tahun 1997-1998.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial yakni:

1. Pendidikan. Tingginya pendidikan maka dapat meningkatkan kesejahteraan
2. Penghasilan. Semakin tinggi penghasilan, masyarakatnya akan semakin bagus

3. Gizi, semakin tinggi konsumsi gizi, maka akan meningkat pula kesejahteraannya.

Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial adalah indikator yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu pemerintah juga harus membuat strategi dan membuat program untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Hal ini seperti kutipan wawancara berikut:

“Kesejahteraan sosial masyarakat akan lebih mudah meningkat apabila sejalan dengan faktor faktor yang dapat memperbaiki kualitas hidupnya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Kesejahteraan sosial juga tidak sepenuhnya menjadi permasalahan di pemerintah, masyarakat juga perlu mnegerti bahwa kesejahteraan itu juga dibutuhkan dalam diri sendiri, karena yang dapat mengubah kualitas hidup adalah diri sendiri. Pemerintah hanya membantu dengan harapan mampu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut

“Saya berharap nanti pada periode berikutnya, anggota dewan juga memiliki pemikiran seperti itu yakni menyejahterakan masyarakatnya. dan ketika menjadi anggota dewan itu adalah milik rakyat dan bertugas menyejahterakan rakyat sesuai dengan bidangnya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, pemerintah perlu mengkaji dan harus diupayakan dalam penanggulannya. Cara pemerintah menanggulangi kemiskinan di Perkotaan sendiri juga

melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan dengan cara peminjaman dana untuk modal suatu usaha di perkotaan, memberikan pendampingan masyarakat untuk membantu pembentukan organisasi dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.

Peran KH Ahmad Haris Shodaqoh sangat relevan dengan kebangsaan itu sendiri karena menitik beratkan rakyat atau masyarakat dibanding keperluan pribadinya dan tetap mengontol kekuasaannya agar tidak menyimpang dari aturan moral, hukum maupun aturan agama karena arahnya yakni persatuan, kesatuan dan kesejahteraan masyarakat. Saat menduduki anggota parlemen beliau juga membuat kebijakan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan pada tahun 1997-1998 karena krisis moneter dan ekonomi melanda Kota Semarang. KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga memiliki peran aktif ketika terlibat di pemerintah yakni sebagai Ketua Komisi E bidang kesejahteraan rakyat dengan merencanakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada saat beliau menjabat.

B. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Pengasuh Pondok Pesantren

Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dan terbesar di dunia. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sudah mencapai angka 85%, sebelumnya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 95% (Republika, 2016). Meskipun demikian bukanlah hal yang asing lagi bahwa seorang kyai memiliki peran yang berarti di mata masyarakat Indonesia. Kyai juga dapat dikatakan tokoh non formal apabila perilaku dan tingkah lakunya di contoh oleh komunitas di sekitarnya seperti di masyarakat. Salah satu unsur yang paling dominan adalah seorang kyai mengatur segala kelangsungan perkembangan di pondok pesantren dengan segala keahlian baik agama maupun sosial politik, kharismatik dan skill keterampilannya (Mashud, 2003: 67).

Pondok pesantren adalah suatu lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan dan pengajaran yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna ketika didalam rumah dan lingkungan masyarakat. Pondok pesantren tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu agama dan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bimbingan, pembinaan dan bantuan terhadap anak-anak yang memiliki masalah dalam emosional maupun sosial sehingga anak tersebut dapat

berkembang secara penuh sesuai dengan minat dan potensi masing-masing.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesantren dapat diartikan sebagai asrama, tempat santri mengaji atau menguasai ilmu agama secara detail. Aturan ini adalah untuk melatih para santri agar nantinya setelah keluar dari pondok pesantren dapat beradaptasi dengan masyarakat secara baik seperti yang diajarkan oleh kyai ketika santri menimba ilmu di pondok pesantren. Seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saya selaku pengasuh selalu memberikan anak-anak tentang ilmu-ilmu garis kebenaran, tentang hal-hal yang baik. Oleh karena itu, nanti santri bakal tahu dengan sendirinya ketika berada di dalam masyarakat, man yang baik dan mana yang harus diubah.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 juni 2021)

Jadi kyai selaku pengasuh memberikan kesempatan kepada santriya untuk bertanya dan dengan harapan agar kyai itu tahu apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik ataupun tidak, karena kyai sudah membekali santri nilai-nilai atau ilmu tentang kebenaran. Dengan adanya sikap terbuka dan saling berhubungan timbal balik maka pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh kyai untu santrinya akan lebih meningkat dan santri akan lebih mengerti. Dalam hal ini kyai dan santri adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, santri menghormati kyai nya dan kyai juga menyayangi santri nya. Dan menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh, kehidupan di pesantren sangatlah memiliki persamaan

dengan pemerintahan. Dimana kyai diibaratkan sebagai kepala negara dan santri sebagai rakyatnya.

Pemahaman tentang kebangsaan juga seharusnya sudah dimiliki oleh semua warga negara yang hidup di suatu negara, seperti yang dikatakan oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon sebagai berikut:

“Kebangsaan memiliki arti yang tidak sempit, kebangsaan itu menurut saya untuk semua bangsa, untuk kedamaian, kesejahteraan. Bangsa dalam Indonesia sendiri meliputi siapa saja di dalamnya termasuk santri itu yang merupakan bagian dari kyai. Politik kebangsaan itu sendiri untuk kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. Kita tidak berbicara tentang etnis dan agama, atau soal hal yang berhubungan dengan SARA, tetapi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan, kyai juga sangat mengharapkan semua bangsa terjamin kesejahteraannya, keamanannya, kesehatannya, dan seterusnya yang menjadi kepentingannya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 Juni 2021)

Berdasar hasil wawancara di atas terlihat bahwa KH. Ahmad Haris Shodaqoh begitu memahami makna kebangsaan itu sendiri yakni semua hal yang orientasinya bangsa yang menurutnya harus dimiliki oleh setiap warga negara tidak terkecuali oleh para santri.

KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga menganggap nilai kebangsaan itu sangat penting dimiliki oleh para santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Saya selalu mengajarkan bahwa kita hidup di Indonesia punya hak yang sama, kewajiban yang sama, menghormati satu sama lain. Saya selalu mengajarkan itu agar santri mengerti

garis-garis kebenaran, tentang hal-hal yang baik nanti santri akan tau dengan sendirinya ketika berada di masyarakat. Mana yang baik, dan mana yang harus dirubah.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 juni 2021)

“Saya juga memeberikan contoh tentang demokratisasi di pesantren, di suatu sisi saya juga menerapkan sopan santun yang itu berkaitan dengan masalah budaya bangsa kita ini. Seperti murid menghormati gurunya, merasa kasih sayang kepada muridnya, yang tua kita harus sayang kepada yang muda, yang muda harus hormat kepada yang lebih tua itu menurut saya adalah bagian dari politik kebnagsaan karena bangsa kita mengajarkan sepeerti itu” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 juni 2021)

Seperti yang sudah dijelaskan oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh bahwa kaitannya dengan kebangsaan sanagat pengting dimiliki oleh para santri pondok pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, dengan wawasan kebangsaan yang ditanamkan dalam santri sepeerti menghormati satu sma lain, menagajarkan garis kebenaran itu bertujuan agar ketika santri keluar dari pondok pesantren dapat beradaptasi dengan masyarakat secara baik sepeerti yang diajarkan oleh kyai ketika menimba ilmu di pondo pesantren.

Dengan demikian santri akan memiliki motivasi kebangsaan. Santri juga harus melestarikan budaya bangsa yakni sopan santun yang sudah diajarkan KH. Ahmad Haris Shodaqoh karena itu juga masuk dalam politik kebangsaan. Jadi disini dapat dilihat bahwa politik kebangsaan atau wawasan kebangsaan akan terus dibentuk

dan akan selalu ditanamkan oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh ketika di pesantren.

Peran seorang pemimpin atau pengasuh pondok pesantren dalam membentuk karakter santri dengan cara menanamkan wawasan kebangsaan itu ditunjukkan pada kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren terdapat banyak kegiatan dari bangun tidur sampai malam hari kegiatan santri tidak ada hentinya. Maka dari itu pemimpin atau pengasuh pondok pesantren adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan santri di pondok pesantren.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh terkait perannya dalam mengajarkan konsep kebangsaan kepada santrinya:

a) Sebagai penasehat

Kyai dalam perannya sebagai penasehat yakni dimana kyai tidak hentinya selalu memberikan nasehat kepada santri Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang betapa pentingnya wawasan kebangsaan bagi para santri dalam kutipan wawancara dengan KH Ahmad Haris Shodaqoh yakni sebagai berikut:

“Kyai selalu mengajarkan bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan atau politik kebangsaan kepada santri nya, nasehat seorang kyai dalam bahasan tentang kebenaran atau kebaikan dengan maksud untuk mengajak santri untuk dapat membawa santri ke arah yang benar. Dan dengan cara menyampaikan apa isi atau makna pancasila dan UUD dan juga mengambil sumber hukum islam yakni Al Quran. Maka dengan

menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada santrinya, maka santri dapat memiliki pemikiran bahwa kita hidup di Indonesia harus berpedoman dengan Pancasila sebab Pancasila berisi nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Jadi dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa dalam menanamkan wawasan kebangsaan melalui nasihat kyai kepada santri yang dalam penyampaiannya sebagai maksud untuk mengajak santri ke arah yang lebih baik atau tujuan yang baik dengan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam.

KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga menjelaskan cara memberikan wawasan tentang kebangsaan melalui nasihat di pondok pesantren Al-Itqon Bugen Semarang yaitu:

“Tidak ada kurikulum tersendiri tentang politik kebangsaan. Saya sebagai kyai selalu mengarahkan santri agar sadar bahwa sangat penting rasa kesatuan dan persatuan karena kita hidup di Indonesia punya hak yang sama, kewajiban yang sama, dan harus menghormati satu sama lain.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Seperti yang dikatakan KH. Ahmad Haris Shodaqoh

“Komunikasi yang baik antara santri dan kyai mampu meningkatkan keeratan kyai dengan santri dan komunikasi dengan santri tidak hanya dalam lingkup kurikulum saja” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Dalam hal ini diharapkan santri mampu memahami arti kebangsaan karena bangsa itu sebenarnya adalah masalah kita semua. Dan diharapkan mampu mempelajari bangsa agar santri itu tumbuh rasa nasionalisme. Karena nasionalisme sendiri adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara maka dari itu kyai harus mampu menumbuhkan wawasan kebangsaan terhadap kyai dengan cara memberikan nasihat-nasihat dan tidak mengacu pada kurikulum di pondok pesantren.

b) Sebagai contoh

Setelah memberikan nasehat kepada santrinya, selanjutnya peran kyai adalah sebagai contoh. Dimana tingkah laku atau perbuatan kyai akan diikuti oleh santrinya. Dan dalam kehidupannya kyai harus mampu memberikan contoh tentang politik kebangsaan di pesantren seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Hubungan kyai dengan santri itu bagaimana seorang santri bisa menerima apa yang diterangkan oleh kyai, dan konsep-konsep kyai bisa diterima, kyai yang baik itu yang demokratis. Dengan adanya kyai yang demokratis maka santri akan mengikuti secara total apa yang diajarkan oleh kyai maka dari itu kyai haruslah orang yang arif dan bijaksana” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Pendapat lain juga di jelaskan oleh salah satu santri di pondok pesantren”

“Mbah yai itu sebagai guru dan kita sebagai murid otomatis mbah yai mengajarkan tentang apa yang ada di pondok. Tetapi di sisi lain mbah yai juga mengajarkan

kita hidup di masyarakat, bagaimana kita hidup berpolitik misalnya kayak waktunya kita pakai masker, itu kan juga intruksi dari mbah yai dan mbah yai tidak serta merta menyuruh saja tetapi juga mencontohkan bagaimana cara memakai masker yang benar, kita harus mematuhi peraturan dari atasan. Kalau dari santri sendiri pelajaran kan dari sekolah, kita memanfaatkan ilmu politik didalam pondok.” (Wawancara dengan Mbak Arum santri putri Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, 9 Juli 2021)

Pendapat lain juga dijelaskan oleh santri putri di pondok pesantren al itqon:

“Kita juga diberi pengertian kalau kita itu hidup didalam lingkup masyarakat, dimana kita harus bergandengan dan harus menghargai satu sama lain terlebih di masyarakat juga terdiri dari suku yang berbeda atau mungkin agama yang berbeda. Mbah yai selalu mencontohkan seperti itu mba saling menghargai dan saling menghormati” (Wawancara dengan Mbak Evi santri Putri Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, 9 Juli 2021)

Sebgaimana penejlasan diatas kyai mampu memberikan contoh kepada santrinya dengan cara menerapkan nilai kebangsaan yakni menghargai satu sama lain baik itu di pondok pesantren sendiri maupun di lingkup masyarakat. Dan kyai tidak serta merta memberikan nasihat saja, tetapi kyai juga memiliki andil memberikan contoh langsung kepada santrinya. Yang mana nantinya akan menjadi bekal santri pondok pesantren al itqon tersebut.

c) Sebagai motivator dan penyelesaian masalah

Untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan sendiri, kyai sebagai pengasuh tidak hanya memberikan nasihat dan contoh saja, selebihnya kyai adalah sebagai motivator dan tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan.

Dalam hal ini KH. Ahmad Haris Shodaqoh tidak hentinya memberikan motivasi kepada santri tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan, dengan harapan nilai-nilai atau wawasan tentang kebangsaan dapat melekat karena selalu diajarkan dan selalu diberikan. Seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kebangsaan itu kan meliputi moderasi, keseimbangan dan keadilan untuk seluruh masyarakat. Memang di pesantren juga arahnya kesitu dan diharapkan dapat dikembangkan juga agar santri itu memiliki semangat kebangsaan. Dan kebangsaan itu didalam agama sudah diajarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan sosial itu juga terdapat di agama.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

“Cara mengajarkan dan memberikan semangat kebangsaan terhadap santri itu juga tidak langsung, sedikit demi sedikit dulu diberi pengertian agar ketika nanti santri dihadapkan dalam masyarakat santri itu tidak bingung harus gimana, maka dari itu santri dan kyai tidak boleh memisahkan dirinya dengan masyarakat” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga berharap wawasan atau ilmu tentang kebangsaan yang orientasi ke bangsa dapat dibiasakan.

“Para santri merupakan masalah yang sangat penting dan menonjol, jika para santri dibiasakan dan diajari yang baik tentu akan menjadi orang yang berguna bahagia dunia dan akhirat, namun apabila para santri diajarkan hal-hal buruk, tentunya para santri akan menderita dan dapat merusak moralnya. Snatroi dalam bimbingan ini juga harus dididik ke jalan yang benar yakni jalan yang diridhai Allah SWT seperti keimanan, ibadah, akhlak dan tingkah laku pada kebaikan” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kyai selalu terlibat dalam memberikan pembekalan agar dapat menjadi motivasi bagi para santrinya, dan apa yang dilakukan kyai diharapkan santri dapat meniru sebab pelajaran tersebut sudah dibiasakan. Seperti kutipan wawancara berikut:

“KH Ahmad Haris Shodaqoh bukan hanya sebagai pengasuh pondok pesantren al-itqon saja tetapi ia juga terlibat langsung memberikan contoh yang baik kepada santrinya. Ia memantau langsung di lapangan untuk memberikan dukungan secara moril terhadap santrinya agar dalam bertindak berfikir lebih dahulu sebelum mulut, tangan dan kaki berbuat. (Wawancara Ust. Abdul Mujib, 18 Mei 2021)

Memang apa yang dilakukan oleh kyai akan diikuti oleh santrinya, dan apa yang diperintahkan oleh kyai akan juga dilaksanakan oleh santrinya. Kyai di pondok pesantren al itqon juga memberikan pengertian bahwa politik kebangsaan itu sendiri sudah tercakup dalam pelajaran di pondok pesantren yakni Fiqh

Siyasah. Fiqh yang berkaitan dengan masalah politik. Untuk itu kyai sellau menekankan kepada santri nya untuk selalu menghormati dan toleransi kepada umat beragama karena itu juga termasuk dalam muatan fiqh siyasah.

Hal tersebut juga dikatakatakan oleh KH Ahmad Haris Shodaqoh dalam wawancaranya:

“Sudah banyak yang saya sampaikan terkait bagaimana nilai, wawasan tentang kebangsaan di pondok pesantren ini. Bahkan memberikan pengajaran tentang ketauhidan agar nantinya para snatri tidak melenceng dari ajaran-ajaran allah. Dan apabila nantinya santri berada di masyarakat, ia bisa menerima perkembangan jaman dan tidak terpengaruh dalam hal keburukan. Dan dengan arahan tersebut maka santri akan siap untuk turun d masyarakat dan kelak dapat berguna dari segi agama dan moral sosialnya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Dalam memotivasi nilai kebangsaan di pondok pesantren kyai juga berpegang teguh pada sumber al quran dan hadist, selain itu juga KH. Ahmad Haris Shodaqoh memberikan pesan bahwa ketika nanti sudah berada di masyarakat harus bisa menghormati/ toleransi, menjauhkan dari hal hal yang buruk agar kelak dapat berguna di masyarakat.

Dalam memecahkan persoalan yang dimiliki santri, kiai sebagai pengasuh juga memberikan perhatian dengan cara berdialog sebagai wujud kepedulian kiai kepada snatrinnya. Snatri yang tinggal di pondok pesantren alitqon sebagian juga berasal dari daerah pedesaan dan perkotaan pinggiran. Dan alasan snatri memilih untuk tinggal di pondok pesantren sendiri juga bermacam-

macam. Ada yang berdasar kemauan orang tua, ada yang kemauan sendiri, bahkan ada yang mengikuti kemauan teman ataupun saudaranya

Persoalan ataupun ketimpangan yang muncul di pondok pesantren sendiri bukan lah hal yang belum pernah terjadi. Sepeerti dalam kutipan wawancara beriku:

“Masalah yang sering dihadapi santri selama tinggal di pondok pesantren itu sebenarnya masalah yang saya rasa tidak besar juga, seperti mungkin perbedaan pendapat dengan teman satu kamarnya atau mungkin anak itu baru mengenal pondok pesantren jadi ada rasa tidak betah di dalam pondok trus kurang bisa menyesuaikan diri dengan ustadnya” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Dalam hal ini saya sebagai pengasuh juga menjadi penengah atau penghubung komunikasi terkait apa saja masalah yang ada di pesantren. Maka dari itu sikap toleransi yang sudah saya jelaskan diatas sebagai salah satu penunjang dalam kehidupan pesantren atau pun kehidupan di masyarakat sikap toleransi sendiri adalah untuk persatuan dan kesatuan agar hubungan itu tetap terjaga.

Maka dari itu peran kyai didalam pondok pesantren sepeerti yang sudah dijelaskan di atas yakni sebagai penasehat, sebagai pemberi contoh dan sebagai motivator dan penyelesaian masalah ialah salah satu penunjang berkembangnya nilai kebangsaan di pesantren. Sebagai pengasuh dalam pondok pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, peran KH. Ahmad haris Shodaqoh termasuk dalam peran aktif sebab beliau selalu membimbing dan bertanggung jawab penuh terhadap santrinya dengan cara

memberikan pembekalan dan kajian baik itu ketika saat pengajian ataupun saat berada di pendidikan formal seperti Madrasah.

C. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Warga Negara

Setiap negara memiliki ideologi sebagai dasar negara, yang berasal dari pemikiran-pemikiran bangsanya. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian dari pertahanan bangsa dan negara.

Pancasila juga sebagai ideologi yang dapat diterima oleh semua paham, semua golongan dan kelompok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila juga telah dimiliki oleh seluruh bangsa indonesia yang meliputi nilai budaya, nilai adat istiadat, nilai religiusitas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya masyarakat indonesia sudah mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai pancasila dalam ranah adat, agama dan kebudayaan. Untuk itu dengan mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai pancasila tersebut dapat menjadi tameng agar bangsa indonesia tidak mudah terprovokasi dalam menghadapi permasalahan yang ada di negara” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 juni 2021)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pancasila sebagai ideologi atau sebagai falsafah bangsa indonesia dapat diterima oleh

bangsa indonesia dan masyarakat indonesia sudah mengamalkan nilai pancasila dalam kehidupannya dan pada hakikatnya melaksanakan nilai-nilai pancasila juga sebagai pondasi agar bangsa indonesia tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bertentangan dengan pancasila. Sebagai dasar negara, pancasila yang digali dari budaya dan pengalaman kehidupan masyarakat Indonesia sebagai rujukan bagi penyelenggara negara dan segenap warga negara dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya dalam berbagai bidang dan aspeknya termasuk sosok kyai.

Untuk memperjelas peran KH Ahmad Haris shodaqoh sebagai warga negara sebelumnya kita perlu tahu dahulu salah satu fundamen terpenting dalam negara adalah warga negara. Dan warga negara selaknya sesuai dengan payung hukum mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hukum yang layak dari negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum pada Pasal 1 yang berbunyi

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (UUD 1945 Nomor 9 Tahun 1998)

Negara dalam menciptakan kebebasan dalam berpendapat dan mengemukakan pikiran membuat regulasi demi terwujudnya jaminan Hak Asasi Manusia warga negara sesuai dengan pancasila dan konstitusi, payung konstitusi tersebut akan selalu berkembang

sesuai dengan berkemabngnya zaman namun akan tetap menjamin agar memenuhi hak warga negaranya dalam mewujudkan kreativitas warga negara. Dan warga negara harus selalu menjaga dan menciptakan situasi kondusif dan aman dalam menyampaikan pemikirannya atau pendapatnya.

Kebebasan berpendapat juga sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena dalam menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana partisipasi publik yang pada akhirnya dapat berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan pun tidak serta merta dalam bidang pendidikan saja, melainkan bidang sosial. Pada dasarnya agama islam memiliki titik singgung yang kompleks dengan berbagai masalah sosial, karena syariat islam selain mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan juga menagtur hubungan antara manusia dengan sesamanya baik hubungan secara individu maupun kelompok. Misalnya contoh yang paling sederhana yakni tolong menolong yang merupakan nilai sosial yang juga terkandung dalam ajaran islam.

Dalam pembahasan mengenai kyai, kyai juga memeiliki pengaruh yang besar dan kuat bahkan merupakan salah satu kekuatan penting dalam kehidupan sosial. Peran sendiri memiliki arti kedudukan yang dimiliki seseorang. Jadi peran kyai adalah sebagai pemimpin di masyarakat harus mampu mengayomi atau membimbing masyarakat. Kyai merupakan ulama atau warga negara yang menjadi panutan sebagai tempat bertanya serta belajar

ilmu-ilmu agama. Saat ini keberadaan kyai menjadi sangat esensial bagi pesantren maupun bagimasyarakat. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Kyai dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan karna kyai sendiri adalah bagian dari masyarkat. Kyai hanya sebutan saja dimasyarakat. Sebutan kyai itu biasanya muncul di masyarakat dimana tokoh tersebut memiliki kemampuan dalam ilmu agama. (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 7 juni 2021)

Dengan melihat penjabaran diatas terlihat bahwa sosok kyai yang notabene juga tinggal di lingkup masyarkat juga dpat menjalankan peran yang dimilikinya. Seorang kyai mmapu menuntun masyarakatnya ke arah yang lebih baik dan kyai dlaam masyarakat memeiliki peran sendiri yakni mbinging masyarakatnya untuk berbuat kebaikan.

KH. Ahmad Haris Shodaqoh adalah salah satu kyai atau tkoh agama tepatnya di Desa Bugen Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang. Beliau adalah salah satu tokoh yang disegani dalam masyarakat. Keberadaan KH. Ahmad Haris Shodaqoh di Desa Bugen Tlogosari Wetan memiliki banyak pengaruh positif dan kegiatannya didalam masyarakat. KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakatnya yang membuat perannya semakin berpengaruh di lingkup masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan, KH. Ahmad Haris Shodaqoh hidup ditengah masyarakat dan menyatu dengan masyarakat tanpa ada jarak apapun, sehingga dapat menegtahui secara lansung berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kedekatan KH. Ahmad

Haris Shodaqoh dengan masyarakat terlihat ketika beliau mengikuti segala macam kegiatan atau aktivitas yang ada didalam masyarakat. Sepeerti dalam kutipan wawancara berikut:

“Masyarakat disekitar desa bugen selalu membutuhkan sosok kyai. Karena menurutnya kyai itu dapat membimbing mereka.dan segala kegiatan disekitar pondok juga pasti melibatkan kyai karena mereka berdampingan dengan kyai. Kyai sering dimintai pendapat ataupun pertimbangan-pertimbangan sebelum kegiatan masyarakat” (Wawancara denganBapak Slamet Warga Desa Bugen Tlogosari Wetan, 10 Juni 2022)

Desa Bugen Kelurahan Tlogosari Wetan termasuk desa yang bisa disebut dengan desa Agamis karena di lingkup desa tersebut terdapat Beberapa Pondok pesantren yang mayoritas warganya memeluk agama islam.

Seperti data tabel jumlah warga Desa Bugen Kelurahan Tlogosari Wetan sebagai berikut:

TABEL 3

Table 3: Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dipeluk

Data Warga Pemeluk Agama		
No.	Golongan Agama	Bnyaknya Pemeluk
1	Islam	8163
2	Katholik	204
3	Kristen Protestan	197
4	Budha	-
5	Hindu	7
6	Lain-lain	-
	Jumlah	8571

Sumber data :

<https://tlogosariwetan.semarangkota.go.id/profilkelurahan>, diakses pada 4 Juni 2022

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah warga mayoritas memeluk agama islam. Dan seperti yang sudah dijelaskan diatas yakni terdapat masjid sebahai sarana ibadah dan banyak terdapat pondok pesantren salah satunya yaitu Pondok Pesantren Al Itqon. Masyarakat Desa Bugen Keluaran Tlogosari Wetan yang mayoritas memeluk agama islam juga mengikuti organisasi yang berkembang dalam Kelurahan Tlogosari Wetan tersebut yakni Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini seperti kutipan wawancara KH. Ahmad Haris Shodaqoh:

“Masyarakat sekitar pondok pesantren juga mengikuti kegiatan ke NU an. Sepeerti disebut dengan IPNU dan IPPNU, anshar, Fatayat dan Muslimat, dan saya juga senang jika masyarakat sekitar dapat mengikuti jejak rasulullah.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Dalam hal ini KH. Ahmad Haris Shodaqoh menanamkan nilai nilai keislaman yang menciptakan masyarakat yang religius dan dengan dibuktikan negan masyarakat Kelurahan Tlogosari Wetan mengikuti Organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama.

Untuk menunjang peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai warga negara dibuktikan dalam 2 aspek yakni Aspek Agama dan Aspek Sosial yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pertama, Aspek Agama

Secara kenyataan bahwa Agama dalam kehidupan sosial saling berpengaruh dan saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi jalannya kehidupan masyarakat, demikian pula

sebaliknya. Dan pertumbuhan masyarakat juga memengaruhi pikiran terhadap agama (Mukti Ali,1982.32)

Peranan KH. Ahmad Haris Shodaqoh di Desa Bugen Kleurahan Tlogosari Wetan tidak hanya terbatas pada lingkungan pesantren yang dipimpinnya. KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga menyadari pada hakekatnya juga memimpin masyarakatnya lebih-lebih soal agama yang diamati melalui perannya sangat memperhatikan masyarakatnya.

a) KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Pembimbing Majelis Taklim Ahad Pagi

Majelis Taklim Ahad pagi merupakan kegiatan atau tempat pengajaran agama islam dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan para jamaahnya terhadap ajaran agama islam dan pada kenyataannya majelis taklim ahad pagi yang di bimbing oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh bersifat terbuka segala usia, lapisan atau strata sosial dan jenis kelamin.

Majelis Ta'lim juga sebagai wadah penyampaian dakwah yang keberadaannya diakui dan diatur dalam peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan nomor 55 tahun 2007, pasal 2 yang berbunyi:

1. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu

menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

2. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang meyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Seperti kutipan wawancara KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai berikut:

“Saat ini tidak bisa dihitung lagi mbak jamaah yang ikut ngaji. Dulu Cuma diikuti sama warga sekitar saja, tetapi sekarang banyak masyarakat diluar desa bugen juga ikut ngaji sama saya. Saya juga senang jika saya dapat mengarahkan dan membimbing masyarakat lewat lingkup majelis taklim.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 3 Juni 2022)

Terlihat jelas bahwa KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam perannya di Majelis Taklim ahad pagi yang ia pimpin bertujuan membimbing dan mengarahkan untuk memperbaiki ataumengubah perilaku tertentu menjadi pribadi yang lebih baik yang ditandai dengan banyaknya jamaah yang ikut serta dalam pengajian ahad pagi. Ini berpedoman pada salah satu ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl: 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Depag RI, QS. An-Nahl: 125).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mengajak kepada mereka untuk bermusyawarah dan belajar untuk menuju ke jalan yang lebih baik.

Menurut Bapak Sapto sebagai jamaah pengajian ahad pagi dalam wawancara:

“Pengajian ahad pagi sangat bermanfaat sekali, terkadang kita susah untuk menerjemahkan isi al quran, tetapi dipandu oleh kyai haris saya dapat memahami isi alquran sebab kyai haris menjelaskan secara detail bagian surah dan apa isi yang terkandung dalam surah tersebut” ” (Wawancara dengan Bapak Sapto Jamaah Pengajian Ahad Pagi, 12 Juli 2021)

Hal ini diperkuat dengan pendapat KH. Ahmad Haris Shodaqoh:

“Banyak masyarakat yang ikut mengaji karena ingin mendapatkan ketentraman hati, materi pada pengajian ini yaitu membahas kandungan isi dalam al quran dan biasanya saya contohkan dengan hal-hal kehidupan sehari-hari. Dan saya selama mengaji tidak pernah mengajak kemana-mana itu tidak, tetapi saya selalu mengajak untuk hidup bersinggungan dengan budaya

dan masyarakat kita.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Juga diperkuat kembali dengan pendapat Gus Basro Jamhar dalam wawancara sebagai berikut:

“Kultur masyarakat bawah menurutnya dawuhnya kyai itu sangat berpengaruh sekali. Hal ini mengakibatkan peran kyai sangatlah besar untuk kalangan bawah. Kyai sendiri mampu bersentuhan dengan masyarakatnya langsung.” (Wawancara dengan Gus Basro Jamhar Anak KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Hubungan kyai dengan masyarakat seperti yang dicontohkan KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam aspek agama adalah semata-mata untuk membimbing masyarakatnya menuju ke hal lebih baik dengan cara membedah isi surah dalam al-quran dan tidak memihak pihak manapun terlepas beliau pernah menduduki jabatan yang tinggi.

Terlihat jelas bahwa peran KH. Ahmad Haris sodaqoh sebagai warga negara juga dapat menagajak masyarakat nya menuju hal yang lebih baik dengan cara mengadakan Pengajian ahad pagi. Terlepas dari beliau pernah menduduki jabatan yang tinggi beliau juga tidak melakukan atau membicarakan hal yang berbau etnis atau SARA. Pengajian ahad pagi yang beliau pimpin memiliki tujuanagar masyarakat yang mengikuti pengajian tersebut sennatiasa

berada di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan dengan dilandaskan al-Quran sebagai pedomannya.

b) KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Penggerak Keagamaan

Selain menjadi kyai dan pemimpin pengajian ahad pagi, di Desa Bugen beliau juga sering berinteraksi di masyarakat. Seperti mengikuti shalat berjamaah yang mengharuskan beliau menjadi imam ketika shalat. Dalam kaitannya dengan masyarakat antara kyai dengan masyarakat sekitar menurut bapak Slamet sebagai warga sekitar Pondok Pesantren Al-Itqon dalam wawancara dikemukakan sebagai berikut:

“Hampir setiap hari mbah Kyai haris selalu berinteraksi dengan masyarakat. Seperti mengikuti Shalat jumat berjamaah dengan warga sekitar, dan beliau juga ramah sekali dengan warga sini, maka dari itu warga disini tidak sungkan terhadap beliau. Dan beliau juga sering membantu warga dalam kegiatan apapun.” (Wawancara dengan Bapak Slamet Warga Bugen Tlogosari Wetan, 10 Juni 2021)

Hal ini diperkuat dengan pendapat beliau bahwa:

“Saya juga sering jadi imam ketika shalat wajib 5 waktu dan ketika jumat juga saya ngimami shalat. Dan alhamdulillah warga sini juga banyak yang shalat di masjid mbak.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Dapat disimpulkan bahwa peran beliau dapat diamati melalui praktik atau kegiatannya di desa Bugen Kelurahan Tlogosari Wetan. Selain menjadi imam dalam setiap shalat 5

waktu dan shalat jumat, KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga sering mengikuti kegiatan masyarakat lain seperti tahlilan, sholawatan, pengajian, slametan, halal bihalal, atau acara sejenisnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut tidak lepas dari peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh di masyarakat karena masyarakat menganggap sosok kyai mampu dijadikan panutan dan pemimpin.

Seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Mbah haris itu di masyarakat selalu dilibatkan dalam hal apapun. Selain sebagai imam shalat 5 waktu dan shalat jumat, mbah haris juga memimpin yasinan, tahlilan, sholawatan, slametan.” (Wawancara dengan Bapak Slamet Warga Bugen Tlogosari Wetan, 10 Juni 2021)

Sosial memiliki peranan yang penting dalam kehidupan di masyarakat karena menyangkut bagaimana seseorang berinteraksi dengan Individu lain atau dengan kelompok. Dengan sosial masyarakat akan mengetahui bagaimana individu berhubungan, dengan begitu masyarakat akan saling berhubungan untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari kejahatan dan konflik.

Masyarakat dengan kyai tidak dapat dipisahkan hal ini terlihat dengan adanya sosok kyai di masyarakat, kyai selalu diminta bantuan untuk memimpin dan mengikuti segala acara keagamaan. KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai seorang kyai atau tokoh agama dapat berperan sebagai

pendakwah dan pemimpin dalam berbagai aktivitas sosial keagamaan dan KH. Ahmad Haris Shodaqoh membuktikan perannya dalam kegiatan keagamaan masyarakat.

2. Kedua, Aspek Sosial

Para kyai sebagai pemimpin agama di masyarakat juga menyadari bahwa ajaran-ajaran islam bukan hanya terbatas pada masalah ibadah saja, tetapi juga menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Seperti kesehatan, ketertiban, perekonomian, sosial, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu peran kyai dalam hal ini adalah sebagai tantangan untuk menggali, menterjemahkan agama itu dan di aktualisasikan kepada masyarakat. Itu adalah sebagai tuntutan masyarakat terhadap para kyai pada masa sekarang dan esok yang akan datang.

Kyai memang sering dihadapkan dengan suatu masalah yang ada didalam masyarakat. Akan tetapi, kebijaksanaan kyai juga harus mendengarkan pendapat masyarakat maupun pihak lain diluar masyarakat itu. Dalam suasana adanya keadaan bertentangan itu, sosok kyai harus lebih sering mendengar pendapat. Hal ini merupakan salah satu hubungan timbal balik antara kyai dan masyarakat. Sehingga dengan semua itu akan tercipta suasana atau keadaan yang tentram dan damai.

Kyai sebagai perantara proses komunikasi di masyarakat.

Kekuatan kyai sebagai tokoh sentral dapat dilihat dari dua hal:

- Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan begitu tinggi, dimana sosok kyai memiliki kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi anggota masyarakat, karena dapat memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Sanggup menjawab berbagai persoalan yang ingin diketahui oleh masyarakat dan juga mampu mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah
- Melandaskan sesuatu pada kesepakatan bersama. Kyai dianggap sebagai orang yang mempunyai pengaruh karena keilmuannya, dimana kyai adalah ahli dalam bidang agama sehingga kyai dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan beliau menjadi patron masyarakat atau sanggup melayani masyarakat dan juga berperan sebagai pressure Group di pedesaan. Kyai juga mampu menolak kebijakan yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma wilayahnya, dan beliau dengan kemampuan karismanya mampu melakukan perlawanan (Turmuzi,2003: 5)

Melalui peran kyai yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap masyarakat dalam menjalani hubungan, maka tercipta suatu keadaan dimana masyarakat akan memiliki rasa aman dan tentam. Oleh karena itu kyai dapat

memberikan arahan kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di masyarakat.

Seperti pendapat KH Ahmad Haris Shodaqoh dalam wawancara berikut:

“Didalam masyarakat terkadang sosok kyai adalah sebagai tempat bertanya dan bagaimana aspirasi masyarakat itu dapat tersalurkan.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Dalam kelebihan personalnya, hubungan kyai dan masyarakat terjalin dengan baik dan hubungannya dengan masyarakat adalah pada kepentingan masyarakatnya. Hubungan yang dekat antara masyarakat dengan kyai sebagai sosok yang dapat menerjemahkan penjelasan dalam konteks agama dan kerap kali dapat dimintai pendapat untuk berbagai masalah. Posisi ini menjadi nyata sebab kyai dapat mempersatukan umatnya. Kyai dengan cara nya yakni memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat akan tercipta suatu keadaan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat kyai selalu menekankan untuk berbuat kebajikan agar terjauh dari kemungkaran.

Dalam kehidupan masyarakat juga kyai sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan kyai dengan cara mendengarkan pendapat masyarakat. Masyarakat dalam penjelasan ini adalah orang kecil dan pinggir yang hidup diantara sosok kyai. Kyai harus mendengarkan pendapat orang kecil itu. Hal ini

merupakan pola timbal balik antara kyai dengan masyarakat sehingga didalam kehidupan masyarakat akan tercipta kehidupan yang aman dan tentram. Selain meningkatkan ketentraman masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, kyai juga ikut menegakkan kerukunan didalam kehidupan masyarakat yakni ketika dilaksanakan pemilihan kepala desa. Hal ini terlihat saat pemilihan kepala desa Bugen Kelurahan Tlogosari wetan pada tahun 2017.

Seperti dalam kutipan wawancara berikut

“Saya dan masyarakat itu dekat sekali, bahkan saya juga dilibatkan dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2017, terkadang juga maslaah-masalah kecil sebelum pemilihan kepala desa itu nyata adanya.” (Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, 9 Juli 2021)

Hal ini menjawab bahwa, kyai juga dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dan menurutnya saat akan pemilihan kepala desa 2017 kehidupan masyarakat bugen terjalin kurang baik karena perbedaan calon yang dipilih serta perbedaan pendapat dari kedua calon tersebut. Menjelang pemilihan kepala desa tahun 2017 diadakan pertemuan warga dan dengan perantara kyai kyai di tujukan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada warga masyarakat agar dapat hidup dengan rukun walaupun terjadi perbedaan calon pemilih. Dan KH. Ahmad Haris Sodaqoh menjelaskan bahwa orang yang nantinya akan dipilih sebagai kepala desa terpilih karena dapat melindungi warga nya. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

Menjelang pemilihan kepala desa waktu itu saya ditunjuk untuk mengumpulkan masyarakat dan menghimbau agar tetap menjaga tali sedulur dan tidak terbawa oleh perbedaan calon pemilihan kepala desa”

Dengan kaitannya peran kyai dalam aspek sosial, kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari sosok kyai, karena kyai menjadi tokoh masyarakat yang dapat berperan untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang agamais, aman tentram dan damai. Selain itu dengan adanya sosok kyai mampu mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan mengajarkan masyarakat untuk berbuat kebaikan. Dan dengan adanya kyai pula dapat menjadi penengah ketika pemilihan kepala desa pada tahun 2017.

Penulis menemukan bahwa hubungan peran kyai dengan masyarakat adalah hubungan timbal baik antara kyai dengan masyarakat desa bugen kelurahan tlogosari wetan. Dan ketika disinkronkan dengan konsep kebangsaan secara tidak langsung sudah masuk dan tertanam dalam diri kita termasuk sosok KH. Ahmad Haris Shodaqoh. Teori peran dan kosep kebangsaan mampu membawa kyai ke dalam gerbang menuju dalam hal kebangsaan yakni menitik beratkan bangsa. Bangsa yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni kyai mampu membimbing masyarakatnya menuju ke hal lebih baik dengan cara agama maupun sosial.

Setelah menganalisis bentuk peran kyai dalam politik khususnya pada kancah perpolitikan dan pondok pesantren. Dalam teorinya weber berpendapat bahwa terdapat tiga otoritas yang terdapat kehidupan sosial diantara yakni otoritas tradisional, otoritas kharismatik dan otoritas legal rasional. Kyai memiliki peran yang sangat penting dalam perpolitikan di Kota Semarang, oleh karena itu peran ulama sangat erat dengan otoritas kharismatik yang dimiliki kyai.

Otoritas merupakan bagian dari suatu relasi kekuasaan sekaligus mengandung unsur perintah atau unsur kontrol. Sedsngkan khasrisma sendiri memiliki arti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang karna sifat kharisma yang dimilikinya. Otoritas tersebut juga dapat hilang apabila sesorang yang memiliki nya melakukan kekeliruan atau keslaahan yang bertentangan dengan norma-norma sosial, hukum, adat dan agama. Sehingga pandangan masyarakat terhadapnya ikut berbeda bahkan dapat berubah. Kharisma yang dimiliki oleh seorang kyai akan melahirkan sebuah otoritas yang memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakat. Masyarakat juga akan segan dan mengikuti segala perintah atau perilaku kyai. Karena peintah dan perilaku kyai sebgai acuan masyarakat untuk melakukan hal yang sama dengan sosok yang diikutinya. Hal ini dapat terwujud karena kyai sendiri memiliki peran yang nyata dalam kehidupan masyarakat. kaitannya dengan KH Ahmad Haris Shodaqoh yakni beliau adalah sosok yang kharismatik yang dapat memimpin

kehidupan masyarakat karena mampu mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan mengajarkan masyarakat untuk berbuat kebaikan. Ketika problematika sosial juga muncul di dalam interaksi sosial masyarakat, peran kyai sebagai figur yang sangat diharapkan dan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk keterkaitan dengan kebangsaan sendiri kyai juga memiliki peran yakni untuk membangun bangsa yang lebih maju, memperkuat ketahanan nasional dan mengembangkan semangat kepedulian antar umat beragama. Dalam konteks perpolitikan, wawasan kebangsaan dimaknai dalam aspek kesejahteraan bangsa, dalam konteks pondok pesantren dan kehidupan bermasyarakat, wawasan kebangsaan lebih dimaknai dalam aspek sosial. Menegnai bagaimana dapat hidup harmonis dengan menerapkan nilai kebnagsaan seperti toleransi dan rukum antar sesama santri, antar warga pesantren dan warga diluar pesantren. Sebagaimana kita tahu bahwa sebuah nilai kebangsaan harus dapat dimulai dari diri sendiri karena itu sudah tertanam setiap warga negara dan terealisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai warga negara KH. Ahmad Haris Shodaqoh termasuk dalam peran partisipatif sebab beliau hanya menjalankan perannya ketika berada dalam masyarakat seperti setiap minggu ahad beliau memimpin pengajian ahad pagi dengan tujuan membimbing, mengarahkan, memberikan kesadaran penuh ingin memperbaiki, memberi bantuan, pertolongan dalam mengubah satu

perilaku tertentu menjadi yang lebih baik. Serta dalam keadaan tertentu KH. Ahmad Haris Shodaqoh diminta bantuan dalam segala hal yang berkaitan di masyarakat seperti mendengarkan pendapat masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman tentang kebangsaan sudah seharusnya dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat yang hidup dalam suatu negara, tidak terkecuali Kyai. Politik kebangsaan itu cakupannya untuk kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. Tidak tentang etnis dan agama, atau soal hal yang berhubungan dengan SARA, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan agar terjamin kesejateraan, keamanannya, kesehatannya, dan seterusnya yang menjadi kepentingannya. KH. Ahmad Haris Shodaqoh adalah sosok kyai yang memainkan dua peran sekaligus, yakni sebagai kyai/pengasuh di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang dan sebagai Anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1993 sampai tahun 2000.

Setelah penulis menemukan beberapa peran yang menyangkut pokok bahasan yakni berkaitan dengan peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam politik kebangsaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam Kancah Perpolitikan

Kyai dan politik adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan KH. Ahmad Haris Shodaqoh pada periode 1993-2000 beliau menduduki kursi

DPRD Kota Semarang Fraksi Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Peran politik KH Ahmad Haris shodaqoh yakni peran politik aktif dan beliau sebagai ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat). Peran beliau saat menjabat sebagai anggota DPRD adalah membuat kebijakan dimana pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang ditandai dengan melemahnya ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan suku bunga sehingga suku bunga dapat naik dan ternyata membenahi sektor perbankan dinilai tidak efisien dan dalam sektor riil juga berdampak karena sektor tersebut sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. Sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk mengatasi krisis moneter pada tahun 1997-1998 pemerintah sedikit demi sedikit memberikan bantuan, memberikan pelayanan itu sebagai bentuk partisipasi untuk masyarakat. Hal ini relevan dengan kebangsaan itu sendiri karena menitikberatkan rakyatnya dibanding keperluan pribadinya dan tetap mengontol kekuasaannya agar tidak menyimpang dari aturan moral, hukum maupun aturan agama karena arahnya yakni persatuan, kesatuan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Pengasuh Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah suatu lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan dan pengajaran yang tidak dapat

dilaksanakan secara sempurna ketika didalam rumah dan lingkungan masyarakat. Peran seorang pemimpin atau pengasuh pondok pesantren dalam membentuk karakter santri dengan cara menanamkan wawasan kebangsaan itu ditunjukkan pada kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Dengan demikian santri akan memiliki motivasi kebangsaan. Perannya KH. Ahmad Haris Shodaqoh dalam mengajarkan konsep kebangsaan kepada santrinya adalah sebagai berikut

- a. Sebagai penasehat yakni menanamkan wawasan kebangsaan melalui nasihat kyai kepada santri yang dalam penyampaiannya sebagai maksud untuk mengajak santri ke arah yang lebih baik atau tujuan yang baik dengan berpedoman pada pancasila sebagai dasar negara dan al quran sebagai sumber hukum islam.
- b. Sebagai contoh yakni kyai mampu memberikan contoh kepada santrinya dengan cara menerapkan nilai kebangsaan yakni menghargai satu sama lain baik itu di pondok pesantren sendiri maupun di lingkup masyarakat. Dan kyai tidak serta merta memberikan nasihat saja, tetapi kyai juga memiliki andil memberikan contoh langsung kepada santrinya. Yang mana nantinya akan menjadi bekal santri
- c. Sebagai motivator dan penyelesaian masalah yakni Dalam memotivasi nilai kebangsaan di pondok pesantren kyai juga berpegang teguh pada sumber al quran dan hadist, selain itu juga KH. Ahmad Haris Shodaqoh memberikan pesan bahwa

ketika nanti sudah berada di masyarakat harus bisa menghormati/ toleransi, menjauhkan dari hal hal yang buruk agar kelak dapat berguna di masyarakat. Dalam memecahkan persoalan yang dimiliki santri, kyai sebagai pengasuh juga memberikan perhatian dengan cara berdialog sebagai wujud kepedulian kyai kepada santrinya. Maka dari itu sikap toleransi sebagai penunjang dalam kehidupan pesantren atau pun kehidupan di masyarakat karena untuk persatuan dan kesatuan agar hubungan itu tetap terjaga.

3. Peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Warga Negara

KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakatnya yang membuat perannya semakin berpengaruh di lingkup masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan, KH. Ahmad Haris Shodaqoh hidup ditengah masyarakat dan menyatu dengan masyarakat tanpa ada jarak apapun, sehingga dapat mengetahui secara langsung berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk menunjang peran KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai warga negara dibuktikan dalam 2 aspek yakni Aspek Agama dan Aspek Sosial yang akan dibahas sebagai berikut:

- b) Aspek Agama yakni KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Pembimbing Majelis Taklim Ahad Pagi dan KH. Ahmad Haris Shodaqoh sebagai Penggerak Keagamaan
- c) Aspek Sosial yakni KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga ikut menegakkan kerukunan didalam kehidupan masyarakat

yakni ketika dilaksanakan pemilihan kepala desa Bugen Kelurahan Tlogosari wetan pada tahun 2017.

B. Saran

Beberapa hal yang penulis sarankan sehubungan dengan berakhirnya penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Peran kyai baik didalam maupun diluar pondok pesantren adalah sebagai acuan bahwa kyai tidak hanya figur tokoh agama saja tetapi juga memiliki peran lain yang cukup besar diantara sebagai aktor politik.
2. Peran kyai haruslah seimbang dalam segala aspek baik itu agama maupun sosial politik agar tidak menyimpang dari aturan moral, hukum maupun aturan agama

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, Robert, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, alih bahasa A. Rahman Zaenudin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ,2001).
- A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Ibn Khaldun (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Abd. Salam, Arif, Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara' dalam A. Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004).
- Abdillah, Masykuri, Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik Era Reformasi, (AHKAM Jurnal Ilmu Syariah Vol XIII No 2, 2013).
- Abdul Mu'nim, Islam di Tenag Arus Transisi, (Jakarta: Kompas:2000).
- Abdul, mu'nim d.z (ed), Islam di Tengah Arus Transisi, (Jakarta: Kompas, 2000).
- Abdul, Mun'im DZ , Islam di Tengah Arus Transisi, (Jakarta: Kompas, 2000).
- Abu al-'Ala Al-Mawdudi, Teori Politik Islam dalam John J Donhue dan John L posito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah , (Jakarta :CV Rajawali ,1984).

- Abu Bakar, Abyhara, Pengantar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010).
- Agustian, R.A, Julianti, Fitri, Pendidikan Kewarganegaraan, (Pangkalpinang, UBB Press: 2010).
- Ahmad Fauzan, “Kepemimpinana Kiai”, Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004).
- Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Usul al-Ahkam, Mesir: 1925, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, (Yogyakarta: Jendela, 2000).
- Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisnaeni, Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1 No 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019).
- Amril, Marzali, Agama dan Kebudayaan, (Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Athropology, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016).
- Arifin, Zaenal, Runtuhnya Singgasana Kyai, (Yogyakarta, Kutub: 2003).
- Asyari, Hasyim, Relasi Negara dan Agama di Indonesia, (Jurnal Rechsvinding, 2014).
- Berry, David, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2009).

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dede, Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*, (Jakarta: IAN Jakarta Press, 2000).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES: 1982).
- Edi, Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, (Jurnal vol 11 no 2 IAIN Manado, 2017).
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy, 2011).
- Endang Saifuddin, Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta: GIP, 2004).
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004).
- Faqih Maula Nahdli, Akbar, *Keterlibatan Ulama dalam Politik (Studi Terhadap Peran Ulama dalam Kemenangan Idris-Pradi pada Pemilu Kota Depok Tahun 2015)*, Skripsi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Harun al-Rasid, *Naskah Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR* (Jakarta. UI Press, edisi revisi pertama, 2004).

- Hidayat, Komaruddin dan M. Yudhie Haryono, Manuver Politik Ulama, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).
- Hidayat, Komaruddin, Agama untuk Peradaban Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan, (Jakarta: Pustaka Alfabet cet 1, 2019).
- Hidayat, Komaruddin, Agama untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan, (Jakarta, Pustaka Alvabet cet 1, 2019).
- Huda, Syaiful, Pesantren dan Otoritas Kiai; studi tentang Pola Komunikasi di Pesantren Darussalam, Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000).
- Ibnu, Hajar, Kiai Di Tengah Pusaran Politik, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009).
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkaamus-Sulthaniyyah wal-wilaayatud-Diniyyah’, ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Hukum tata negara dan Kepemimpinan dalam Takaran islam, (Jakarta: Gema Insani Press Cet ke 2, 2000).
- Imam Bonawi, Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam: Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).
- Indah Safitri, Mawar, Peran Kiai Dalam Membimbing Perilaku Santri di Pondok Pesantren Jabal an Nur al Islami Batuputu

- Bandar Lampung”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).
- J. Suyuthi, Pulungan, Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Paradigma, 2002).
- Kiki muhammad, Hakiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, (Wawasan Jurnal islamiah agama dan sosial budaya I , I, 2016).
- Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18.
- M. Din, Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara dan Sejarah Pemikiran Politik Islam dalam andito (abu zahra) (ed) Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia., (Bandung: Pustaka Hidayah cet 1,1999).
- M. Mahfud MD, Politik hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press 2017).
- Magnis Suseno, Franz, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

- Marzuki wahid dan rumadi, *Fiqih Madzab Negara Kritik atas Politik Hukum Negara Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKISS cet 1, 2001).
- Mismubarak, *Integrasi Agama dan Politik (Telaah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-ayat Politik dalam Tafsir al Azhar, (Tesis Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2019).*
- Mubarok, Romli, *Studi Islam: Merespon Perkembangan Zaman*, (Semarang: CV Bima Sejati cet 3, 2008).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Mukti, Ali, *Pee Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).
- Mulia, Siti Musdah, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama. (Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP. (Aliansi RKUHP, 2007).*
- Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Siddiq*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2002).
- Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Nasiwan, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: FISE UNY Press, 2007).
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007).

- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008).
- Nursi, Said. *Sirah Dzatiyah*, diterjemahkan oleh Ihsan Qasim al-Sahalihi. (Kairo: Syarikat Sozler, 2011).
- Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, (Yogyakarta, LkiS: 1999).
- Pradjarta, Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar*, (Jakarta: Lkis, 1994).
- Rosyada, Dede, et. al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. ke-1, 2000).
- Rumadi, *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, Jakarta: Erlangga, t.th., hal. 250. Lihat juga Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, dari *Islamic Goverment*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2012).
- Sadi “kyai dan politik: Mengintip Motif Kyai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi, (Jurnal *Khazanah Pendidikan UMT.ac.id*, 2016).
- Salamiah, Eka Zalika, *Peran Ulama dalam Pragmatisme Politik pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi

- Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Sayfa Auliya Achidsti, Eksistensi Kyai dalam Masyarakat, (Jurnal Kebudayaan Islam, 2014, Vol. 12 No. 2).
- Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2001), cet ke-31.
- Subagyo, Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta, Rineka Cipta: 2011).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Sururin, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Suzanne Killer, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995), hlm. 213 dalam Hasanatul Jannah, Kyai, Perubahan Sosial dan dinamika politik kekuasaan, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol.3 No.1,2015.
- Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun. (Yogyakarta: Gema Media, 2007).
- Syamsudin, Din, Etika dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,2000).
- Tampubolon, Agustinus dan Darmawan, Cecep, Fashion Budaya Nasional dalam konteks Wawasan Kebangsaan:

- Studi kasus pada ember Fashion Carnaval, (Journal Of Urban Society's Arts, Vol 3 No 1 Institut Seni Indonesia, 2016).
- Taniredja, Tukiran dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Bandung, Alfabeta: 2012)
- Thayyib, Anshari, (1997) Siasat Kyai Pinggiran, Surabaya; Risalah Gusti dalam Ahmad Nashiruddin, Fenomena Bullying di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati, Vol 7 ,No 2, 2019
- Tukiran, Pendidikan Multikultural dan Nasionalisme Indonesia, (Socio Didaktika: 2014)
- Turmudi, Endang, Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: Lkis, 2004).
- Ulya, Zaki, Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyasa, Jurnal Al-Qadha Vol 2 no.2, Tahun 2015
- Vellayati Hajad, Politik kiai dan Resistensi Sosial, (Jurnal public Policy Vol 1 No 1, 2015).
- Wasisto Raharjo, Jati, Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama Jurusan politik dan pemerintahan FISIPOL UGM , 2016.
- Weber, Max. 1947. *Economy and Society*, I (London: Unimenurutty of California Press, Barkeley).
- Wogeman, J. Paul, Christian Perspective on Politics, (wensminter: John Knox Press 2000).

Yukl Gary, Kepemimpinan dalam Organisasi Edisi Lima Terjemahan
(Jakarta, PT Indeks: 2001).

Zaini, Muhammad, Kontribusi Agama Bagi Kemajuan Sosial, (Jurnal
Substantia Prodi Ilmu Al Quran dan Tafsir fakultas
Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh Vol 18
No.1), 2016

Sirin, Khaeron, Pembinaan Mental Agama dalam Membentuk
Perilaku Prososial, (Jurnal Kependidikan Al-
Riwayah Vol 9 no 1 PTIQ Jakarta), 2017

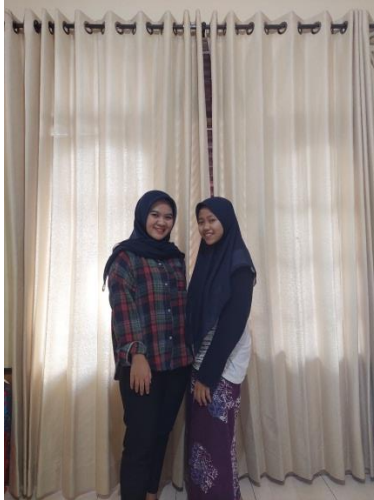
LAMPIRAN



Wawancara dengan KH Ahmad Haris Shodaqoh



Wawancara Dengan Gus Basro Jamhar anak dari KH. Ahmad Haris Shodaqoh



Wawancara Dengan Santriwati Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang (Mbak Ria)



Wawancara Dengan Santriwati Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang (Mbak Evi)



Wawancara Dengan Santriwati Pondok Pesantren Al Itqon Bugen Semarang (Mbak Arum)



Suasana Pengajian Ahad Pagi yang dipimpin oleh KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Pedoman Wawancara

Sebelum membahas tentang politik kebangsaan saya akan menanyakan terkait relasi agama dan negara. Seperti yang kita tahu bahwa relasi agama dan negara tertulis dalam UUD 1945 yang intinya setiap warga negara bebas memeluk agama dan negara juga menjamin kemerdekaan warga untuk memeluk agama tersebut

Yang ingin saya tanyakan

1. Bagaimana pemahaman bapak mengenai relasi agama dan negara atau hubungan agama dengan negara?
2. Apa arti negara menurut bapak dan negara menurut bapak?
3. Menurut bapak, apa makna tentang sila pertama yakni “ketuhana yang maha esa?”
4. Selanjutnya, bagaimana sila pertama Pancasila “ketuhanan yang maha esa” menurut sudut pandang dalil dalam Al Quran dan Hadist?
5. Bagaimana peranan pancasila sila pertama menurut perspektif islam dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
6. Bagaimana realitas umat islam indonesia menyikapi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945?
7. Menurut bapak apa saja bentuk toleransi umat beragama di suatu negara?
8. Menurut Bapak, apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan toleransi umat beragama di suatu negara?

9. Dalam konteks hubungan sosial, apakah menurut bapak peranan agama di negara Indonesia sudah benar?
10. Dari kacamata seorang kyai, Menurut bapak apakah agama dan negara itu saling berhubungan dan timbal balik?
11. Menurut bapak apakah NU sebagai organisasi Islam mendukung hubungan agama dan negara?
12. NU memiliki andil penting dalam kemerdekaan Indonesia, lantas apakah NU setuju dengan konsep Indonesia adalah negara Pancasila?
13. Bagaimana pandangan bapak terhadap organisasi keagamaan yang tidak sesuai dengan NKRI?

Setelah saya menanyakan relasi agama dan negara saya akan melanjutkan tentang politik kebangsaan. Seperti yang kita tahu bahwa politik sendiri adalah cara atau upaya untuk meraih sebuah kekuasaan dan kebangsaan itu orientasinya adalah bangsa

Yang ingin saya tanyakan

1. Apa pandangan bapak mengenai politik kebangsaan?
2. Apa yang sudah dilakukan bapak untuk mewujudkan politik kebangsaan?
3. Apakah yang sudah bapak lakukan tercermin dalam peranan kebangsaan sesuai dengan konsep kebangsaan? (Konsep kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran terhadap diri dalam kehidupan berbangsa seperti contoh cinta tanah air, musyawarah untuk mencapai mufakat, nasionalisme)

4. Apa yang sudah bapak lakukan dalam mengimplementasikan pancasila di dalam menghubungkan antara hukum agama dengan hukum politik seperti penerapan pancasila
5. Bagaimana internalisasi pancasila didalam diri bapak sebagai tokoh agama?
6. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa? Dan apakah sudah sejalan dengan syariat islam?
7. NU memiliki visi misi kebangsaan, apakah perpolitikan di Indonesia sudah dianggap politik yang menitik beratkan bangsa dan menghargai keberagaman?

Seperti yang sudah bapak jelaskan pada wawancara saya dahulu, bapak pernah menduduki posisi DPRD fraksi PPP pada tahun 1993

Yang ingin saya tanyakan

1. Bagaimana peran politik bapak selama menjabat sebagai anggota DPRD fraksi PPP?
2. Bagaimana strategi bapak dalam menerapkan politik kebangsaan selama menjabat sebagai anggota DPRD Fraksi PPP?
3. Nilai apa saja yang pernah bapak perjuangkan selama menjabat sebagai DPRD
4. Apakah bapak diikuti sertakan dalam pembuatan/penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Dan apa saja

kebijakan bapak selama bapak menjabat sebagai anggota DPRD ?

5. Apakah pada tahun 1993 banyak terjadi perubahan terhadap kota Semarang selama periode bapak menjabat?
6. Apakah terdapat kendala selama bapak menjabat sebagai anggota DPRD?
7. Bagaimana kesan bapak selama bapak menjabat sebagai anggota DPRD?

Selain berkiprah dalam kancah politik bapak juga sebagai kyai, pengasuh di Pondok pesantren Al -Itqon yang ingin saya tanyakan

1. Apakah peran bapak sebagai kyai dapat mengimplementasikan politik kebangsaan di dalam pondok pesantren?
2. Bagaimana cara bapak mewujudkan budaya kebangsaan di dalam pondok pesantren
3. Apakah internalisasi Pancasila itu juga terdapat dalam pondok pesantren?
4. Apakah terdapat kendala dalam mengimplementasikan kebangsaan kepada santri bapak?

Terlepas dari peran bapak dulu menjabat sebagai anggota DPRD dan saat ini bapak juga sebagai kyai, bapak juga sebagai warga negara yang hidup berdampingan dengan masyarakat

Yang ingin saya tanyakan

1. Apakah didalam masyarakat bapak juga mengembangkan nilai kebangsaan ?
2. Dan apakah peran bapak didalam masyarakat yang berhubungan dengan nilai kebangsaan?
3. Apakah di lingkup sekitar bapak dapat menerapkan nilai kebangsaan?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan di lingkungan bapak guna menunjang nilai kebangsaan?
5. Dalam pengajian ahad pagi yang bapak pimpin apakah ada internalisasi pancasila?
6. Apakah bapak merasakan bahwa bapak berstatus sebagai warga negara di suatu negara dan bagaimana pengaruh kebijakan politik yang dibuat pemerintah dalam kehidupan sehari-hari?
7. Apakah bapak mengikuti berita-berita politik dan pemerintahan dari waktu ke waktu? Dan apakah terdapat perubahan?
8. Menurut bapak apakah terdapat peran yang seharusnya dilakukan oleh orang awam dalam kegiatan politik di lingkungan bapak?
9. Bagaimana intensitas keterlibatan dan kepedulian bapak dalam aktifitas sosial?

10. Diantara peran bapak sebagai anggota DPRD dan sebagai kyai, menurut bapak mana yang lebih melekat di didalam diri bapak sendiri?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1. Nama :Akiko Shavira Priyono
2. Tempat dan Tanggal Lahir :Semarang , 7 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin :Perempuan
4. Agama :Islam
5. Status Pernikahan :Belum Kawin
6. Warga Negara :Warga Negara Indonesia
7. Alamat KTP :Perum Permata Wolter Monginsidi Permai No.20 RT 01 RW 11 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan ,Semarang
8. Alamat Sekarang :Perum Permata Wolter Monginsidi Permai

No.20 RT 01 RW 11 Kel.
Pedurungan Tengah
Kec. Pedurungan
,Semarang

9. Nomor Telepon / HP :089670979935

10. e-mail :akikoshavira@gmail.co
m

11. Kode Pos :50192

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Supriyadi Semarang Tahun 2004–2010
2. SMP Negeri 15 Semarang Tahun 2010–2013
3. SMA Negeri 10 Semarang Tahun 2013–2016
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Program Studi S1 Ilmu Politik 2016–2022

III. Riwayat Pengalaman Kerja

1. PT Fuji Metec Semarang Tahun 2020–2023

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Maret 2023



Akiko Shavira Priyono